



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN TAHUNAN 2019



<http://ditjennak.pertanian.go.id>

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu - Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Nawa Cita, visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan memilih kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak. Pemilihan aspek kedaulatan dan keamanan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi Kementerian Pertanian dan telah sesuai dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan bidang produksi ternak dan kesehatan hewan dengan fungsinya mencakup kebijakan bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta kesekretariatan.

Program Ditjen PKH Tahun 2019 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung pencapaian target program tersebut harus dilaporkan sebagai upaya pendokumentasian hasil capaian program/kegiatan, serta mengetahui permasalahan yang muncul pada tahun 2019, sehingga menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019. Diharapkan Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2019.

Jakarta, Maret 2020
Direktur Jenderal



Ketut Diarmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	1
1.3. Ruang Lingkup	1
II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2019	
2.1. Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.....	3
2.2. Kebijakan Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.....	7
2.3. Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.....	20
III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2019	
3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro	20
3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Peternakan	20
3.1.2 Investasi Sub Sektor Peternakan.....	24
3.1.3 Ekspor dan Impor Sub Sektor Peternakan.....	32
3.1.4 Daya Beli Peternak	38
3.1.5 Tenaga Kerja Sub Sektor Peternakan	39
3.2. Capaian Kinerja Utama	43
3.2.1 Optimalisasi Reproduksi Melalui Kegiatan SIWAB (Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting).....	43
3.2.2 Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Melalui Kegiatan BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera).....	49
3.3. Capaian Kinerja Fungsi	43
3.3.1 Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak.....	50
3.3.2 Kinerja Fungsi Pakan.....	59
3.3.3 Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan.....	63
3.3.4 Kinerja Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner	79
3.3.5 Kinerja Fungsi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan	82
3.3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	97
3.4. Realisasi Anggaran	138

3.5.	Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019	141
3.5.1	Ekspor Pakan	141
3.5.2	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan	142
3.5.3	Ekspor Obat Hewan.....	144
3.5.4	Pengembangan Belgian Blue	144
3.5.5	Kemandirian GPPS.....	146
3.5.6	Pemenuhan Produk Hewan yang ASUH	147
3.5.7	Penataan Tata Niaga Menggunakan Kapal Ternak	148
3.5.8	Pengembangan Peternakan Organik.....	150
IV.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN	
4.1.	Sapi dan Kerbau.....	153
4.2.	Kambing/Domba.....	153
4.3.	Unggas	153
4.4.	Babi	154
4.5.	Lain-lain.....	154
V.	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan.....	155
5.2.	Rekomendasi Tindak Lanjut	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekomendasi Pemeriksaan Kebuntingan melalui Palpasi Rektal/USG	9
Tabel 2.2	Anggaran Ditjen PKH Per Kewenangan Tahun 2019.....	22
Tabel 2.3	Anggaran Ditjen PKH Per Jenis Belanja Tahun 2019	22
Tabel 2.4	Anggaran Ditjen PKH Per Kegiatan Tahun 2019	22
Tabel 3.1	Jumlah Kompartemen Bebas AI Tahun 2017-2019	34
Tabel 3.2	Produksi Semen dan Embrio UPT Nasional 2015-2019.....	51
Tabel 3.3	Produksi Bibit 2017 – 2019	51
Tabel 3.4	Realisasi Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	55
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak.....	58
Tabel 3.6	Rincian Target dan Realisasi Pengembangan HPT di UPT Tahun 2019	59
Tabel 3.7	Lokasi Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan	60
Tabel 3.8	Capaian Kegiatan Pakan Konsentrat di UPT	62
Tabel 3.9	Rincian Hasil Pemeriksaan Sampel di Kab. Dompu.....	65
Tabel 3.10	Alokasi Vaksin Rabies di Indonesia Tahun 2019	66
Tabel 3.11	Jumlah Kematian Ternak Babi di Sumatera Utara	71
Tabel 3.12	Realisasi Kegiatan Produksi Tahun 2015-2019	75
Tabel 3.13	Nilai Investasi PMA Sub Sektor Peternakan Tahun 2016-2019	83
Tabel 3.14	Nilai Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2016-2019	84
Tabel 3.15	Data Ekspor Pakan Tahun 2019	141
Tabel 3.16	Lokasi Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019	142
Tabel 3.17	Pengadaan Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019	143
Tabel 3.18	Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2019	148

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Trend PDB Sub Sektor Peternakan.....	23
Grafik 3.2	Kinerja Investasi Sub Sektor Peternakan	24
Grafik 3.3	Grafik Perkembangan Investasi untuk Budidaya Sapi/Kerbau dan Ayam Ras.....	25
Grafik 3.4	Realisasi Bantuan Premi dan DPD AUTS Dari Tahun 2016-2019	31
Grafik 3.5	Jumlah peserta AUTS/K Nasional berdasarkan DPD Tahun 2019	32
Grafik 3.6	Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Peternakan Tahun 2015-2019	32
Grafik 3.7	Perkembangan volume dan Nilai Impor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019	37
Grafik 3.8	Kinerja UPSUS SIWAB	43
Grafik 3.9	Realisasi Kegiatan Pengadaan Ternak Ruminansia Potong	54
Grafik 3.10	Realisasi Kegiatan Pengadaan Kambing dan Domba.....	56
Grafik 3.11	Peningkatan Jumlah Puskesmas Tahun 2014-2019	77
Grafik 3.12	DAK Puskesmas Tahun 2015-2019	78
Grafik 3.13	Perbandingan Tingkat Cemaran dan Residu Tahun 2018-2019	80
Grafik 3.14	Perkembangan Harga Komoditas Sapi Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2019	91
Grafik 3.15	Perkembangan Harga Komoditas Sapi Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2019	92
Grafik 3.16	Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras di Tingkat Produsen Tahun 2019.....	93
Grafik 3.17	Serapan Anggaran Ditjen PKH 2015-2019.....	140
Grafik 3.18	Komposisi dan Penyerapan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2019	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pelaporan SIWAB.....	18
Gambar 2.2	Jenjang Pelaporan Kinerja SIWAB	18
Gambar 2.3	Kronologis Perubahan Anggaran Tahun 2019.....	21
Gambar 3.1	Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan.....	27
Gambar 3.2	Jumlah Debitur dan Realisasi Akad Kredit KUR 2019 Sub Sektor Peternakan Per Sektor Usaha	27
Gambar 3.3	Realisasi Fasilitas Program Kemitraan BUMN Tahun 2014-2019 Untuk Sub Sektor Peternakan.....	29
Gambar 3.4	Sebaran Realisasi Fasilitas Program Kemitraan BUMN Tahun 2014-2019 Untuk Sub Sektor Peternakan.....	29
Gambar 3.5	Jumlah Peternak Asuransi Sapi/Kerbau Dari Tahun 2015-2019 ...	30
Gambar 3.6	Rincian Perkembangan Ekspor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019	33
Gambar 3.7	Jumlah Unit Usaha Bersertifikat Kompartemen Bebas Penyakit Avian Influenza (AI) Tahun 2019 di Indonesia	35
Gambar 3.8	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan	36
Gambar 3.9	Jumlah Unit Usaha yang sudah Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tahun 2015-2019	37
Gambar 3.10	Rincian Impor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019	38
Gambar 3.11	Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Sub Sektor Peternakan (NTUPT) Tahun 2015-2019	39
Gambar 3.12	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja sub sektor peternakan dari tahun 2015-2019	40
Gambar 3.13	Sebaran Tenaga Kerja Sub Sektor Peternakan Tahun 2019	40
Gambar 3.14	Peta Ketersediaan/Stock Semen Beku	43
Gambar 3.15	Peta Ketersediaan/Stock N2 Cair	44
Gambar 3.16	Realisasi Penanganan Gangguan Reproduksi	47
Gambar 3.17	Capaian Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	48
Gambar 3.18	Realisasi Kegiatan BEKERJA Tahun 2018-2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	50
Gambar 3.19	Peta Status Rabies	64
Gambar 3.20	Peta Status Brucellosis Tahun 2019	68
Gambar 3.21	Kronologi Kematian Ternak Babi di Sumatera Utara	72
Gambar 3.22	Peta Sebaran Puskesmas Tahun 2019.....	78
Gambar 3.23	Hubungan Implementasi Fungsi Monitoring-Surveilans dan Pengawasan Peredaran Produk Hewan pada Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Hewan.....	80
Gambar 3.24	Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2019.....	100
Gambar 3.25	Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2019.....	144

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Tahunan merupakan laporan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Laporan tahunan berisikan uraian secara menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan, serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Atas dasar hukum tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun laporan tahunan sebagai gambaran kondisi secara menyeluruh disepanjang tahun 2019.

Laporan tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan kegiatan strategis Unit Kerja Eselon II diantaranya : 1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 2) Direktorat Pakan; 3) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 4) Direktorat Keswan; 5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 6) Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 didanai berdasarkan DIPA Nomor-018.06-0/2019 tanggal 5 Desember 2018 satuan kerja Ditjen PKH.

1.2. Tujuan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya laporan tahunan ini adalah memberikan informasi pencapaian program/kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Laporan Tahunan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi :

1. Capaian Kinerja Indikator Makro.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Utama.
3. Capaian Kinerja Fungsi.
4. Realisasi Anggaran.
5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2019

2.1. Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019 mengacu dengan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional 2015-2019.

Sebagaimana Visi Kementerian Pertanian: “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Misi Kementerian Pertanian adalah:

- a. mewujudkan ketahanan pangan;
- b. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
- c. mewujudkan kesejahteraan petani; dan
- d. mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Pertanian tersebut dan menjaga konsistensi pencapaian Sasaran Program maka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dirumuskan visi, misi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Visi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ialah Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak. Visi ini menghendaki kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak yaitu komoditas daging, telur dan susu yang berasal dari 11 (sebelas) jenis ternak yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan aneka ternak. Menurut Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selanjutnya, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Kebijakan pembangunan pertanian tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi

Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak tersebut, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi:

a. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak

Ketahanan pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak

Nilai tambah dan daya saing diperoleh dari berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam komoditas ternak dan produk ternak sehingga menjadi lebih efisien. Saat ini ternak dan produk ternak masih belum optimal untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya karena inovasi dan teknologi masih rendah terutama ditingkat *off farm*, khususnya dalam bidang pengolahan dan pemasaran.

c. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan

Usaha yang berkelanjutan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan berarti bidang ini harus ramah lingkungan, tidak merusak alam serta mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan usaha pemanfaatan sumber daya alam setempat dan daur ulang limbah peternakan. Dengan demikian bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan usaha yang berkelanjutan dan merupakan *renewable product*.

d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

Misi ini merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pada kurun waktu 2015-2019 reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan ikut berperan dalam nawacita.

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

a. Meningkatkan produksi ternak

Peningkatan populasi dilakukan dengan peningkatan kelahiran, penekanan kematian dan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi daging telur dan susu sebagai dampak dari peningkatan populasi yang akan meningkatkan produksi ternak. Produktivitas ternak diperoleh dengan peningkatan berat badan, produksi karkas, meningkatnya jumlah induk yang bertelur dan induk yang menghasilkan susu dan pencegahan penyakit hewan menular sehingga peningkatan populasi, produksi dan produktivitas merupakan segitiga yang saling tidak terpisahkan.

b. Meningkatkan kualitas komoditas ternak

Kualitas komoditas ternak diperoleh dengan penyediaan bibit yang baik (*good breeding practices*), budidaya yang baik (*good farming*), penyediaan pakan yang baik (*good feeding practices*), penanganan pengolahan yang baik (*good process practices*), pemotongan yang baik (*good slaughtering*) dan penanganan produk pemasaran hasil ternak (*good marketing practices*). Peningkatan kualitas komoditas ternak ini dimulai sejak hulu sampai hilir (*from the farm to table*).

c. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor

Karena Indonesia merupakan negara terbesar yang beragama Islam maka produk ternak yang dihasilkan harus Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Selain produk yang ASUH maka produk peternakan tersebut sudah mulai harus berorientasi ekspor. Pada kasus perunggasan seharusnya telah mengalami hilirisasi industri dan berorientasi ekspor guna mencegah terjadinya surplus produk dan gejolak harga di dalam negeri. Demikian juga untuk ternak babi, kambing dan domba produksinya harus berorientasi ekspor. Oleh karena itu proses budidayanya harus menerapkan standar ekspor.

d. Meningkatkan status kesehatan hewan

Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular strategis seperti yang tertuang pada Kepmentan No. 4026/Kpts/OT.140/4/2013. Saat ini wabah penyakit semakin berkembang dan menjadi endemik. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan ini, status penyakit yang bersifat wabah harus secara bertahap dibebaskan pulau per pulau.

e. Meningkatkan investasi peternakan

Investasi peternakan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Padahal sektor peternakan mempunyai peluang untuk dikembangkan jika melihat kebutuhan akan produk peternakan yang semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan

investasi bidang peternakan akan dapat meningkatkan produk ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

f. Meningkatkan kesejahteraan peternak

Kesejahteraan peternak dapat meningkat sebagai akibat dari pendekatan teknis yaitu pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi, pakan, bibit, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil. Selain itu peningkatan pendapatan nasional yaitu dengan permodalan, kebijakan suku bunga atau akses ke sumber-sumber keuangan dan teknologi. Kedua pendekatan ini harus saling bersinergi untuk mendapatkan pendapatan peternak.

Dalam mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan yang akan dicapai maka disusun arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah selaras dengan Kementerian Pertanian. Arah kebijakan dan strategi peternakan dan kesehatan hewan yaitu:

1. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
 - a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - b. Pengembangan pakan ternak;
 - c. Kesehatan hewan;
 - d. Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan, dan
 - e. Dukungan manajemen kesekretariatan.
2. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
 - a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - b. Pengembangan pakan ternak;
 - c. Kesehatan hewan;
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - e. Penjaminan pangan asal hewan, dan
 - f. Dukungan manajemen kesekretariatan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan: 1) Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal; 2) Peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing; 3) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; 4) Peningkatan pendapatan keluarga petani; 5) Peningkatan kualitas petani dan kelembagaannya; 6) Peningkatan kualitas aparatur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.2. Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

Pembangunan sektor pertanian menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan dan capaian pembangunan nasional secara keseluruhan. Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab dalam proses pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian, secara berjenjang terus memacu berbagai bidang pertanian agar tujuan pemenuhan kebutuhan pangan berkualitas terpenuhi dan kesejahteraan para petani-peternak juga bisa tercapai melalui pembangunan sub-subsektor di dalamnya.

Kementerian Pertanian memiliki beberapa program utama dalam meningkatkan produksi pangan, termasuk didalamnya peningkatan produksi pangan asal ternak. Kegiatan Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2019, yaitu: 1) Optimalisasi Reproduksi melalui kegiatan Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting (SIWAB); dan 2) Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak melalui kegiatan #BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera).

2.2.1. Optimalisasi Reproduksi melalui Kegiatan Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting (SIWAB)

Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting (SIWAB) merupakan salah satu program pembangunan pertanian, dengan konsentrasi kepada pengembangan subsektor peternakan yang dicanangkan Pemerintah pada akhir tahun 2016. Kegiatan ini didukung dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016. Permentan tersebut memberikan batasan kegiatan, bahwa SIWAB merupakan kegiatan untuk mendukung percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau dalam rangka mendukung penyediaan pangan nasional. Melalui SIWAB, diharapkan akan terjadi percepatan penambahan populasi ternak dengan kelahiran pedet yang memiliki performa baik untuk menambah produksi daging dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. SIWAB mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dan merupakan program lanjutan dari beberapa kegiatan serta program di sektor peternakan sebelumnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan utama Ditjen PKH hingga tahun 2019.

Upaya ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada saat ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan daging sapi di dalam negeri yang terus meningkat. Untuk itu, telah dirancang kegiatan SIWAB yang merupakan upaya percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau melalui kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Percepatan peningkatan populasi dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan pangan asal hewan dan dilakukan melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi.

Secara teknis, keberhasilan Program SIWAB diukur melalui keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing instrumen tersebut, sekalipun output yang diharapkan dalam pelaksanaan SIWAB, adalah keberhasilan capaian tingkat kebuntingan hingga 70 persen dari akseptor yang dilakukan melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) serta kelahiran dari akseptor yang bunting hingga mencapai 80 persen.

Target dari kegiatan SIWAB tahun 2019 adalah terlaksananya layanan IB pada akseptor sebanyak 3 juta ekor, dengan target kebuntingan 80 persen atau setara 2.400.000 ekor dan target kelahiran 70% dari kebuntingan atau sebanyak 1.680.000 ekor. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mencapai swasembada daging tahun 2026.

Kegiatan SIWAB dilaksanakan dengan fokus kegiatan pada beberapa instrumen yang menjadi rangkaian sistem dan tahapan capaian kegiatan di dalamnya. Instrumen kegiatan yang menjadi bagian dari upaya peningkatan populasi, meliputi (1) peningkatan pelayanan reproduksi dan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB); (2) peningkatan penyediaan dan distribusi semen beku, N2 Cair dan kontainer; (3) penyediaan hijauan pakan, melalui penyediaan benih dan bibit HPT dalam rangka kecukupan pakan berkualitas; (4) penanggulangan gangguan reproduksi dan penanganan kesehatan hewan; (5) pengendalian pemotongan sapi betina produktif; selain dukungan pelaksanaan administrasi dalam kaitan pertanggungjawaban keuangan, pengendalian internal, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1) Pelayanan Reproduksi

Terdapat 4 (empat) kegiatan dalam pelayanan reproduksi yaitu: a) Layanan Penentuan Status Reproduksi; 2) Layanan IB; 3) Layanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb); dan 4) Pelaporan Kelahiran. Layanan dilakukan untuk menentukan apakah ternak dapat digunakan sebagai akseptor dalam kegiatan IB. Layanan memerlukan keterampilan dari Asisten Teknik Reproduksi (ATR) untuk melakukan deteksi dan memberikan rekomendasi kondisi reproduksi calon resipien. Deteksi kondisi reproduksi dilakukan melalui palpasi rektal atau USG. Rekomendasi yang diberikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekomendasi Pemeriksaan Kebuntingan melalui Palpasi Rektal/USG

Hasil Palpasi Rektal/USG	Kondisi Reproduksi	Rekomendasi
Bunting	Normal	-
Tidak bunting	Normal	IB
Tidak bunting	Gangguan	Layanan gangrep*
Tidak bunting	Tidak normal	Culling

*Ternak tidak bunting dengan gangguan reproduksi akan mendapatkan layanan gangrep sampai sembuh yang ditunjukkan gejala birahi sehingga dijadikan akseptor IB.

Layanan Inseminasi Buatan (IB) dilakukan saat adanya laporan estrus dari peternak, untuk memudahkan dalam pengamatan estrus dan pelaksanaan inseminasi. Stimulasi ternak birahi juga dilakukan program sinkronisasi estrus. Layanan IB dilaporkan langsung oleh inseminator ke iSIKHNAS. Pelaksanaan IB reguler dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara intensif atau semi intensif. Ternak yang terdeteksi birahi langsung dilakukan IB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Ternak yang sudah 3 (tiga) kali di IB tetapi tidak menunjukkan adanya kebuntingan dilaporkan kepada petugas ATR/Medik di wilayah tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan.

Pelaksanaan IB introduksi dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara semi intensif dan/atau ekstensif serta adanya perlakuan sinkronisasi (penyerentakan birahi). Pada pelaksanaan IB introduksi terlebih dahulu ternak dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan reproduksi secara palpasi per rektal. Ternak yang tidak bunting dengan reproduksi normal dilakukan tindakan sinkronisasi (penyerentakan birahi), selanjutnya selama 2-3 hari diamati gejala birahi untuk dilakukan IB.

Kegiatan IB introduksi dilakukan secara sinergi antara UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (BVet/BBVet) dengan OPD provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan IB introduksi dilengkapi dengan kandang jepit, pengumpulan ternak, vitamin, obat-obatan dan pelayanan sinkronisasi.

Layanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan melalui *palpasi rectal* dan/atau dapat menggunakan alat ultrasonografi (USG). Pemeriksaan kebuntingan melalui *palpasi rectal* dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk pemeriksaan kebuntingan akseptor IB, dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB. Untuk pemeriksaan kebuntingan pada kawin alam, dilakukan pada saat pengumpulan ternak. Pelaksana pemeriksaan kebuntingan adalah dokter hewan atau petugas PKb yang sudah ditetapkan.

Layanan PKb paling cepat dilakukan 60 (enam puluh) hari setelah dilakukannya IB oleh petugas yang telah memiliki sertifikat PKb atau ATR. Ternak yang tidak bunting dan birahi kembali akan inseminasi buatan oleh inseminator, layanan PKb dan hasil kebuntingan dilaporkan langsung oleh petugas PKb ke iSIKHNAS.

Pelaporan kelahiran ternak hasil IB (reguler maupun introduksi) dan hasil kawin alam dilakukan oleh petugas teknis reproduksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui sistem iSHIKNAS. Melalui SIWAB diharapkan akan terjadi percepatan penambahan populasi ternak untuk menambah produksi daging dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Selain itu juga, melalui program Upsus Siwab diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan peternakan kepada masyarakat, perbaikan manajemen reproduksi dan produksi ternak, serta perbaikan sistem pelaporan dan pendataan reproduksi ternak melalui sistem aplikasi iSIKHNAS.

2) Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N2 Cair dan Kontainer

Semen beku dalam SIWAB diproduksi oleh BIB, BBIB, dan BIBD provinsi atau kabupaten/kota. Semen beku yang diproduksi harus memenuhi standar sesuai SNI atau lulus uji laboratorium yang terakreditasi. Semen beku yang dimaksud disimpan dan didistribusikan menggunakan N2 Cair sesuai dengan ketentuan Permentan. Penyediaan semen beku sepenuhnya menjadi tanggung jawab Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sesuai Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 22134/PK.040/F/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang distribusi semen beku UPSUS SIWAB dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan SIWAB.

Pengadaan semen beku, N2 cair dan kontainer dilaksanakan melalui *e-katalog* dan/atau pelelangan umum. Pengadaan semen beku, N2 cair dan kontainer dilakukan pada awal tahun untuk menjamin

pelaksanaan IB berjalan lancar. Penyedia semen beku, N2 cair dan kontainer mendistribusikan sampai ke kabupaten/kota. Dalam hal permintaan distribusi sampai ke provinsi, distribusi ke kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi. Dalam pendistribusian memperhatikan pengaturan pola distribusi dan *handling* yang baik.

Kriteria semen beku yang digunakan dalam rangka mendukung SIWAB : a) Memenuhi persyaratan SNI, dan/atau lulus uji dari laboratorium terakreditasi; b) Semen beku yang berasal dari luar negeri memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan; c) Dapat menggunakan stok semen beku tahun-tahun sebelumnya dan produksi tahun 2019; d) Sebelum didistribusikan, produsen mendaftarkan semen beku di-SIKHNAS.

Penyediaan semen beku dapat berasal dari produsen dalam negeri (B/BIB/D) ataupun impor. Penyedia semen beku dalam negeri adalah institusi/lembaga yang memenuhi persyaratan : a) Penyedia yang telah mendapat sertifikat SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) benih dan bibit ternak yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian; atau b) Penyedia belum tersertifikasi tetapi telah menerapkan sistem manajemen mutu dan produknya sesuai SNI yang dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi; c) Bila penyedia memiliki laboratorium uji yang terakreditasi, pernyataan produk yang dihasilkan sesuai SNI dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium lain yang terakreditasi bukan dari milik sendiri.

Pengadaan semen beku dilaksanakan pada awal tahun melalui *e-katalog* dan/atau pelelangan umum untuk menjamin pelaksanaan IB berjalan lancar. Distribusi semen beku dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Semen beku didistribusikan dalam kontainer yang baik dan dikemas secara baik; b) Penyedia semen beku mendistribusikan semen beku sampai ke kabupaten/kota. Dalam hal permintaan distribusi semen beku sampai ke provinsi, distribusi ke kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi; c) Untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (*inbreeding*) BIB Nasional/Daerah mengatur pola distribusi semen beku ke daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Wilayah sumber bibit menggunakan semen beku sesuai dengan rumpun yang telah ditetapkan untuk wilayah tersebut; e) Wilayah yang memiliki sumber daya genetik ternak lokal mengutamakan penggunaan semen beku dari ternak lokal atau asli dominan setempat; f) Penanganan semen beku selama pengiriman memperhatikan penanganan/*handling*

semen yang baik termasuk pemantauan level N2 cair dalam kontainer oleh petugas yang berkompeten.

Pengadaan N2 cair dilaksanakan melalui *e-katalog* dan diutamakan dilakukan pada awal tahun sesuai dengan ketersediaan N2 cair dan semen beku. Distribusi N2 cair dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a) N2 cair didistribusikan dalam kontainer yang berkualitas dan dikemas secara baik; b) Distribusi N2 cair diutamakan sampai kepada kabupaten/kota; c) Satker provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa N2 cair selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator; d) Penanganan N2 cair (*handling*) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk.

Penyediaan kontainer berasal dari kontainer yang masih layak dari tahun-tahun sebelumnya dan pengadaan kontainer tahun 2019. Kebutuhan kontainer mempertimbangkan kondisi kelayakan dan ketersediaan kontainer, topografi wilayah distribusi, dan jumlah semen beku di provinsi/kabupaten/kota. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat kabupaten/kota, yaitu 2 unit kontainer depo semen beku, 2 unit kontainer depo N2 cair. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat inseminator sebanyak 1 unit kontainer lapangan untuk setiap inseminator.

Pengadaan kontainer dilaksanakan melalui *e-katalog*. Untuk kontainer yang belum terdaftar dalam *e-katalog* pengadaan dilakukan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diutamakan dilakukan pada awal tahun untuk menjamin kelancaran distribusi semen beku dan N2 cair. Distribusi kontainer dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas secara baik; b) Distribusi kontainer sampai ke Provinsi; c) Satker provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa kontainer selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator; d) Penanganan kontainer (*handling*) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk; e) Untuk memastikan kualitas kontainer dalam kondisi baik dan layak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas BIB atau petugas yang ditetapkan di lokasi distribusi.

3) Penanganan Gangguan Reproduksi

Kesehatan reproduksi ternak memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan populasi. Adanya gangguan kesehatan reproduksi ternak atau dikenal dengan istilah gangguan reproduksi ditandai dengan efisiensi reproduksi dan produktifitas yang

rendah. Dampak adanya gangguan reproduksi dapat dilihat dari rendahnya angka kelahiran dan ketidakmampuan betina bunting atau melahirkan. Penetapan target penanganan gangguan reproduksi pada tiap tahunnya didasarkan pada besaran anggaran kegiatan dan persentase gangguan reproduksi dari total ternak yang diperiksa berdasar data di iSIKHNAS, catatan petugas inseminator atau *anamnese* peternak.

Penanggung jawab kegiatan penanganan gangguan reproduksi adalah 8 UPT Veteriner yaitu BVet Medan, BVet Bukittinggi, BVet Lampung, BVet Subang, BVet Banjar Baru, BBVet Wates, BBVet Denpasar, dan BBVet Maros bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi di lapangan dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai Veteriner didampingi oleh tim ahli reproduksi dari perguruan tinggi.

Identifikasi ternak yang mengalami gangguan reproduksi (gangrep) dilakukan melalui 2 (dua) cara berdasarkan : a) surveillans aktif gangguan reproduksi; b) surveillans pasif. Surveillans aktif dilakukan terhadap sapi betina produktif yang memperlihatkan kriteria gangguan reproduksi. Pemeriksaan bertujuan untuk menentukan status reproduksinya dan status kesehatan ternak khususnya terhadap ada tidaknya infeksi penyakit terutama *Brucellosis*. Surveillans pasif dilakukan dengan dua cara : a) Gejala klinis berdasarkan *anamnese* peternak atau inseminator. Kegiatan surveillans ini dilaksanakan sebagai seleksi awal atau sebagai dasar penanggulangan gangguan reproduksi berdasarkan pengumpulan informasi dari peternak atau inseminator; b) Laporan daftar akseptor yang telah 2 atau 3 (dua atau tiga) kali di IB dan tidak bunting berdasarkan data iSIKHNAS. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penanggulangan gangguan reproduksi Balai Veteriner (BBVet/BVet) dengan melakukan pengelolaan data (identifikasi dan analisis) serta berkoordinasi dengan wilayah kerjanya.

Pemeriksaan dalam rangka penetapan status reproduksi ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan cara *palpasi rectal* dan/atau menggunakan alat ultrasonografi yang dilakukan oleh Petugas ATR dan/atau Dokter Hewan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status reproduksi sapi atau kerbau akan dilakukan penetapan status reproduksi, yaitu: a) bunting; b) tidak bunting dengan status reproduksi

normal; c) tidak bunting dengan status mengalami gangrep; d) tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen.

Ternak yang telah ditetapkan status reproduksinya dan mengalami gangguan reproduksi akan diterapi dengan perlakuan dan pengobatan, proses kesembuhan bervariasi tergantung permasalahan reproduksinya sehingga memerlukan terapi 2-3 kali tergantung ketersediaan anggaran. Selanjutnya sapi yang telah dilakukan tindakan perbaikan atau terapi dan dinyatakan sembuh dijadikan sebagai akseptor IB. Sapi yang tidak sembuh pada terapi pertama dilakukan pemeriksaan dan terapi kedua.

Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan kedua tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sementara sapi yang tidak sembuh pada terapi kedua, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dan terapi ketiga tergantung kepada ketersediaan anggaran di masing-masing satker. Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan ketiga tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sementara sapi yang tidak sembuh dinyatakan sebagai sapi tidak produktif atau mengalami gangguan reproduksi permanen. Sapi yang telah dinyatakan sembuh dan siap menjadi akseptor dilaporkan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IB. Petugas penanggulangan gangguan reproduksi yang bertanggung jawab di lokasi tersebut memonitor tentang realisasi pelaksanaan IB.

Tindakan penanggulangan gangguan reproduksi dijadikan sebagai dasar dalam penentuan ternak yang dapat disembuhkan (*fausta*) atau tidak dapat disembuhkan (*infausta*). Keberhasilan penanggulangan gangguan reproduksi dinyatakan berhasil apabila kondisi ternak menunjukkan gejala *estrus*. Setiap sapi/kerbau yang diberikan penanggulangan gangguan reproduksi dan belum memiliki Nomor Kartu Ternak yang dikeluarkan iSIKHNAS, harus diberikan : a) *ear tag* atau *neck tag*; b) Nomor Kartu Ternak yang didaftarkan melalui iSIKHNAS.

4) Penanggulangan Pematangan Betina Produktif

Pematangan betina produktif menjadi salah satu permasalahan dalam upaya pencapaian target ketersediaan sapi indukan. Banyaknya pematangan betina produktif dikhawatirkan akan mengganggu tercapainya target tersebut karena sapi/kerbau betina produktif akseptor program SIWAB yang telah di IB atau telah bunting dapat masuk ke RPH dan dipotong karena belum adanya upaya untuk

pencegahannya. Pada prinsipnya kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif bertujuan untuk:

- 1) Menyelamatkan betina produktif dari pemotongan;
- 2) Mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor;
- 3) Menyelamatkan kelahiran pedet.

Pengendalian pemotongan betina produktif dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif serta kegiatan-kegiatan pendukung yang dilaksanakan baik di Pusat maupun di daerah. Untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baharkam Polri) yang ditanda tangani pada bulan Mei 2017 dan diikuti dengan penyusunan Pedoman Kerja Pembinaan. Kerjasama dengan Baharkam Polri ini selanjutnya ditindak lanjuti di daerah ke tingkat Polda, Polresta sampai tingkat lapangan bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Penetapan lokasi kegiatan (Calon Penerima/Calon Lokasi), dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk diantaranya ketersediaan anggaran, maka lokasi kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif tahun 2019 dilaksanakan di 32 provinsi (83 kabupaten/kota target). Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi;
- b. Merupakan daerah sentra peternakan (daerah produksi);
- c. Memiliki Rumah Potong Hewan (RPH);
- d. Komitmen organisasi di daerah dan;
- e. Alokasi anggaran yang tersedia

Pelaksanaan kegiatan pada lokasi *pilot project* dengan kriteria tersebut diharapkan akan berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pemotongan betina produktif secara nasional. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung kepada seberapa baik koordinasi dan komitmen antara *stakeholders*. Komitmen dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program pengendalian pemotongan betina produktif.

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif tergabung dalam Tim

Terpadu tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim terdiri dari unsur Pusat (Ditjen PKH), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, unsur Kepolisian (Polda/Polres/Bhabinkamtibmas), Satpol PP dan/atau instansi terkait yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Stakeholder ikut berperan dalam setiap kegiatan berupa sosialisasi, pengawasan yang dilakukan secara berkala maupun yang bersifat mendadak (sidak). Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Provinsi dan Baharkam Polri melakukan pendampingan dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif. Pendampingan yang dilakukan berupa: 1). pendampingan pada kegiatan sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lokasi target) dan; 2). pendampingan di lapangan pada kegiatan pengawasan terpadu bersama Tim Terpadu di pasar hewan, *cek point* dan Rumah Potong Hewan.

5) Pemenuhan Pakan

Kegiatan pemenuhan pakan ternak berkualitas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, untuk mendukung Program Nasional Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau. Kegiatan ini sebagai upaya agar aksesibilitas peternak kepada sumber-sumber pakan menjadi lebih mudah dengan cara memfasilitasi penyediaan hijauan pakan berkualitas melalui kegiatan Gerakan Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Berkualitas (GERBANG PATAS) dan kegiatan penguatan pakan konsentrat dengan dana APBN.

Kegiatan GERBANG PATAS diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan pakan terutama kebutuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas di berbagai daerah, sehingga konsumsi pakan untuk ternak dapat terjamin jumlah dan kualitasnya, yang selanjutnya akan dapat membantu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak tersebut.

Penetapan target dan lokasi kegiatan pemenuhan pakan berkualitas antara lain dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu ketersediaan anggaran, populasi ternak, terletak di lokasi pelaksanaan SIWAB, sistem budidaya sapi dan kerbau dan potensial lahan penanaman hijauan pakan, SDM peternak, kelembagaan dan

satker SKPD. Lokasi kegiatan pemenuhan pakan berkualitas untuk mendukung kegiatan SIWAB Tahun 2019 berada di 13 (tiga belas) provinsi.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemenuhan pakan meliputi tim tingkat Pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan pejabat yang berwenang secara berjenjang (pusat/provinsi).

6) Pengembangan Sistem Pelaporan

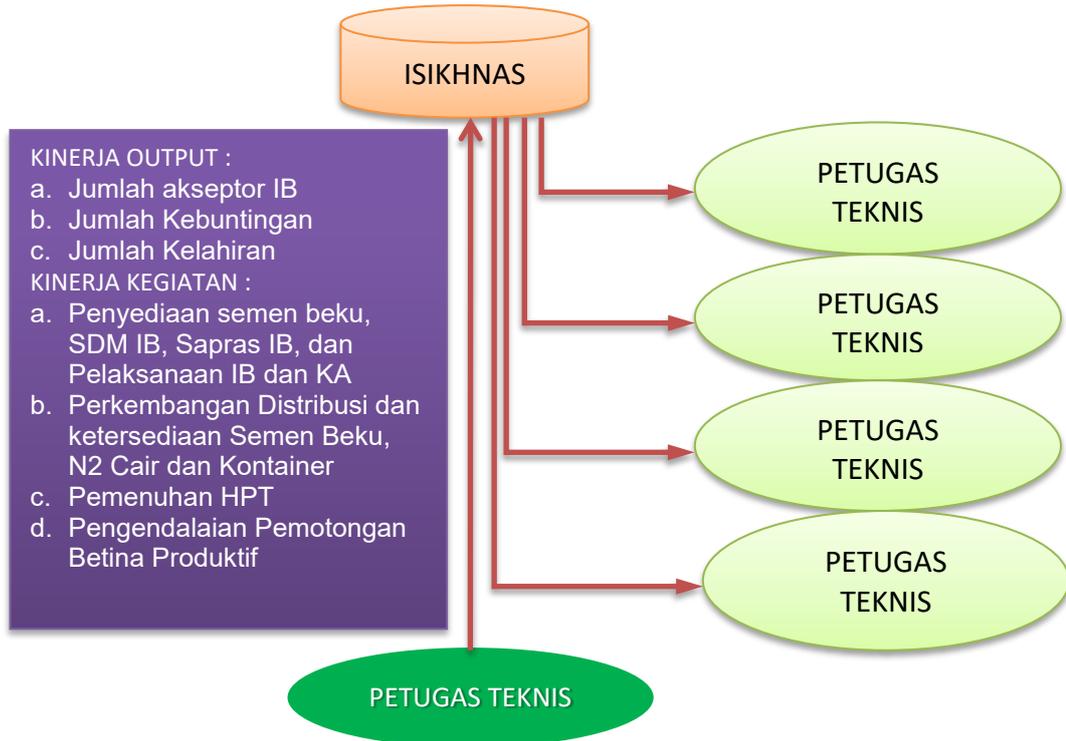
Pelaksanaan kegiatan SIWAB yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan banyak petugas teknis reproduksi yang langsung melakukan pelayanan di bidang reproduksi ternak, menuntut suatu sistem manajemen pengelolaan data yang akurat dan sistematis. Pelaporan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai umpan balik dari pelaksanaan kegiatan di lapangan yang harus dapat dipantau setiap saat secara berjenjang dan tepat waktu.

Agar dapat diperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan SIWAB dengan baik, tepat waktu dan akuntabel telah dibangun sistem pelaporan online yang dikenal dengan iSIKHNAS. Jenis pelaporan SIWAB dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Laporan harian merupakan gambaran keberhasilan program SIWAB yang meliputi (1) jumlah sapi/kerbau yang dilakukan IB; (2) jumlah sapi/kerbau yang telah bunting; dan (3) jumlah sapi/kerbau yang lahir.
- b. Laporan bulanan merupakan perkembangan capaian kinerja kegiatan operasional SIWAB yang meliputi: (1) Pemenuhan hijauan pakan ternak; (2) Penanganan gangguan reproduksi; (3) Produksi semen beku, inseminator *kit*, dan penyediaan sumber daya manusia beserta operasionalnya; (4) Distribusi dan ketersediaan semen beku, N2 cair, dan kontainer; (5) Pengendalian pemotongan betina produktif.

Pelaporan harian dan laporan bulanan dilaporkan dengan menggunakan sistem iSIKHNAS oleh para pelaksana atau petugas di lapangan, yaitu inseminator, PKB, ATR, pelapor kelahiran dan petugas data *recorder*. Selanjutnya secara vertikal penanggung jawab wilayah pada jenjang yang lebih tinggi dapat memantau perkembangan jumlah sapi/kerbau yang telah di IB, bunting, dan melahirkan secara bersamaan pada saat petugas melakukan input data kinerja.

Pelaporan harian dengan iSIKHNAS dilakukan langsung oleh Petugas Teknis Reproduksi setelah mereka melakukan pelayanan. Apabila



ada kendala dapat dibantu koordinator data (petugas *data recorder*). Alur dan jenjang penyampaian laporan dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2

Gambar 2.1 Alur Pelaporan SIWAB



Gambar 2.2 Jenjang Pelaporan Kinerja SIWAB

7) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung keberhasilan SIWAB, sumber daya manusia yang berperan langsung adalah petugas teknis reproduksi ternak. Petugas teknis reproduksi ternak sesuai dengan keterampilan teknis yang dimiliki meliputi Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, dan Dokter hewan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan reproduksi melalui program Upsus Siwab maka dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap petugas teknis reproduksi melalui pelatihan dan penyegaran pengetahuan manajemen dan teknologi reproduksi ternak. Petugas teknis reproduksi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas tenaga teknis reproduksi sebagai ujung tombak dalam pelayanan inseminasi buatan.

Bimbingan teknis petugas reproduksi (IB, PKb, dan ATR) pada tahun ini hanya dilakukan di tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu BBIB Singosari, BIB Lembang dan BET Cipelang.

2.2.2. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak melalui Kegiatan BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera)

Kementerian Pertanian dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019. Kegiatan yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan bidang pertanian, meliputi:

1. Padat karya tunai di desa (cash for work);
2. Penanganan Stunting;
3. Pengentasan daerah rentan rawan pangan

Pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya untuk mendukung program padat karya tunai di desa (cash for work), penanganan stunting, pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui tahapan: penetapan calon penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, penyerahan dan pendampingan. Untuk mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah melaksanakan Kegiatan

Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) melalui bantuan ayam/itik, pakan, obat-obatan (roboransia dan desinfektan), bantuan biaya pembuatan kandang termasuk bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan. Dalam implementasinya kegiatan dimaksud diperlukan akselerasi dan efektivitas agar sasaran dari kegiatan ini dapat terwujud dengan baik sehingga perlu menyempurnakan baik aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Tujuan Kegiatan Bekerja PKH Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak ayam/itik dan pemenuhan konsumsi protein hewani. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan Kegiatan Bekerja yang dilaksanakan di 12 Provinsi yang mencakup 57 kabupaten dengan melibatkan tim pelaksana yang terdiri dari UPT Pusat lingkup Ditjen PKH, dan membentuk tim Supervisi dan penanggungjawab provinsi.

2.3. Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sebesar Rp.2.073.121.296.000,00. Selama tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa perubahan kebijakan anggaran dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Revisi pertama adalah revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), Petani Milenial, Selamatkan Rawa Sejahterakan (SERASI) dan Obor Pangan Lestari (OPAL) dengan pagu anggaran tetap, dengan rincian:
 1. Anggaran sebesar Rp 673.600.560.000,- digunakan untuk memberikan bantuan ayam usia 4 minggu dan pakannya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 11 juta ekor di 13 provinsi dan 57 kabupaten;
 2. Anggaran sebesar Rp 25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Petani Milenial yaitu bantuan ternak ayam/unggas/itik 500 ekor/kelompok, bantuan kandang Rp 3.000.000,-/kelompok, dan bantuan pakan 500 kg/kelompok, dengan pelaksanaan kegiatan BPTU-HPT Sembawa;
 3. Anggaran sebesar Rp 25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan SERASI yaitu bantuan ternak 500.000 ekor itik untuk 500.000 Ha rawa di Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. Anggaran sebesar Rp 7.100.000.000,- digunakan untuk kegiatan OPAL.

- b. Revisi kedua adalah revisi buka blokir kegiatan OPAL sebesar Rp 7.100.000.000,- dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Loka Veteriner Papua di BBVet Maros sebesar Rp35.000.000.000,-.
- c. Revisi ketiga adalah penambahan pagu BLU di BBIB Singosari (revisi DIPA Kanwil) sebesar Rp4.000.000.000,- sehingga pagu total menjadi Rp2.077.121.296.000,-.
- d. Revisi keempat adalah revisi penambahan BLU di Pusvetma sebesar Rp5.746.547.000,- sehingga terjadi penambahan pagu total menjadi Rp2.082.867.843.000,- dan penyesuaian lokasi (Kab. Soppeng dan Selayar) dan biaya operasional Bekerja.
- e. Revisi kelima adalah revisi belanja pegawai dimana Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.081.859.000,- untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja pegawai. Penambahan alokasi belanja pegawai ini menyebabkan peambhan pagu total menjadi Rp2.083.949.702.000,-.
- f. Revisi keenam adalah revisi anggaran terkait pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target dan pagu PNPB dimana dalam revisi terjadi penambahan pagu PNPB di 8 atker UPT sebesar RP5.642.335.000,- sehingga pagu total menjadi Rp2.089.592.037.000,-.

Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018 secara lengkap disajikan pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Kronologis Perubahan Anggaran Tahun 2019

Dari total anggaran 2,089 triliun, sebesar 24,06% (Rp502 milyar) anggaran dialokasikan di kantor pusat. Sedangkan untuk kantor daerah sebesar 64,14% (Rp. 1,34 triliun), dan TP Provinsi sebesar 11,80% (Rp. 246 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 kantor pusat, 22 kantor daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi.

Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran Ditjen PKH untuk belanja pegawai sebesar Rp. 210 milyar, belanja barang Rp. 1,76 triliun, dan belanja modal Rp. 110 milyar. Sedangkan alokasi anggaran per kegiatan Ditjen PKH antara lain:

1) Peningkatan Produksi pakan ternak sebesar Rp. 105.77 milyar; 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp. 234.58 milyar; 3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp. 1.32 triliun; 4) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) sebesar Rp. 45.49 milyar; 5) Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan Rp. 23.53 milyar; 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Layanan Ditjen Peternakan Rp. 356.52 milyar. Secara rinci anggaran Ditjen PKH per kewenangan, jenis belanja dan kegiatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Anggaran Ditjen PKH Per Kewenangan Tahun 2019

No	Kewenangan	Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
1	Kantor Pusat	502.694.008.000	24,06
2	Kantor Daerah	1.340.223.590.000	64,14
3	TP Provinsi	246.674.439.000	11,80
Total		2.089.592.073.000	100

Sumber : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

Tabel 2.3. Anggaran Ditjen PKH Per Jenis Belanja Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
1	Belanja Pegawai	210.401.105.000	10,07
2	Belanja Barang	1.768.796.122.000	84,65
3	Belanja Modal	110.394.810.000	5,28
Total		2.089.592.073.000	100

Sumber : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

Tabel 2.4. Anggaran Ditjen PKH Per Kegiatan Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	105.770.795.000	5,06
2	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	234.586.295.000	11,23
3	Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.323.687.987.000	63,35
4	Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	45.494.135.000	2,18
5	Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ternak	23.528.274.000	1,13
6	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	356.524.551.000	17,06
Total		2.089.592.073.000	100

Sumber : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

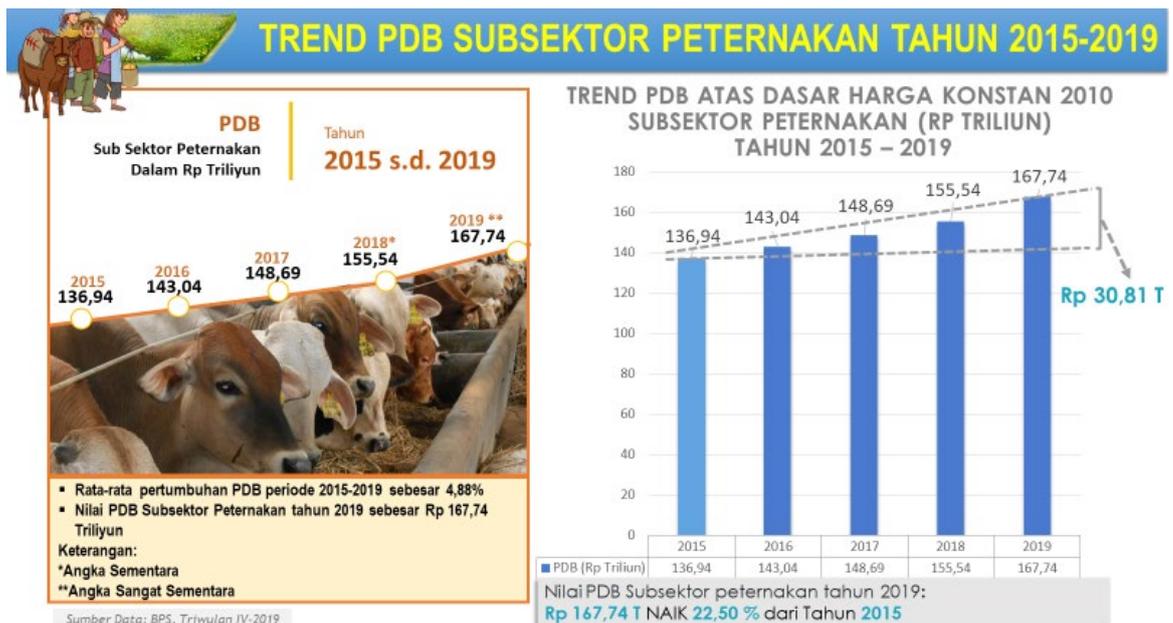
III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2019

3.1. Capaian Kinerja Makro

3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Peternakan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sektor tertentu dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan Data Badan Statistik (BPS) Tahun 2019** (Angka Sangat Sementara), nilai PDB Sub Sektor Peternakan sebesar Rp. 257,01 triliun. PDB Sub Sektor Peternakan berkontribusi sebesar 1,62% terhadap PDB Nasional) dan berkontribusi 12,76% terhadap Nilai PDB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan 17,25% terhadap Nilai PDB Sektor Pertanian, Peternakan dan Perburuan serta Jasa Pertanian.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga, maka digunakan PDB harga konstan. Berdasarkan Data Badan Statistik (BPS) Tahun 2019 (Angka Sangat Sementara), nilai PDB subsektor peternakan tahun 2019 sebesar Rp 167,74 T atau naik 22,50 % dari Tahun 2015. Dalam kurun waktu 2015-2019 PDB peternakan meningkat sebesar Rp. 30,81 Triliun atau 22,50%% dari Rp. 136,94 triliun (2015) menjadi Rp. 16,74 triliun (2019). Rata-rata pertumbuhan PDB periode 2015-2019 sebesar 4,88%



Grafik 3.1 Trend PDB Subsektor Peternakan Tahun 2015-2019

Meningkatnya PDB sektor pertanian tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam mendorong peningkatan produksi ternak. Selain itu, pemerintah juga terus memberikan bantuan berupa benih unggul dan kebijakan pengendalian impor, serta peningkatan produksi dan populasi ternak.

3.1.2 Investasi Sub Sektor Peternakan

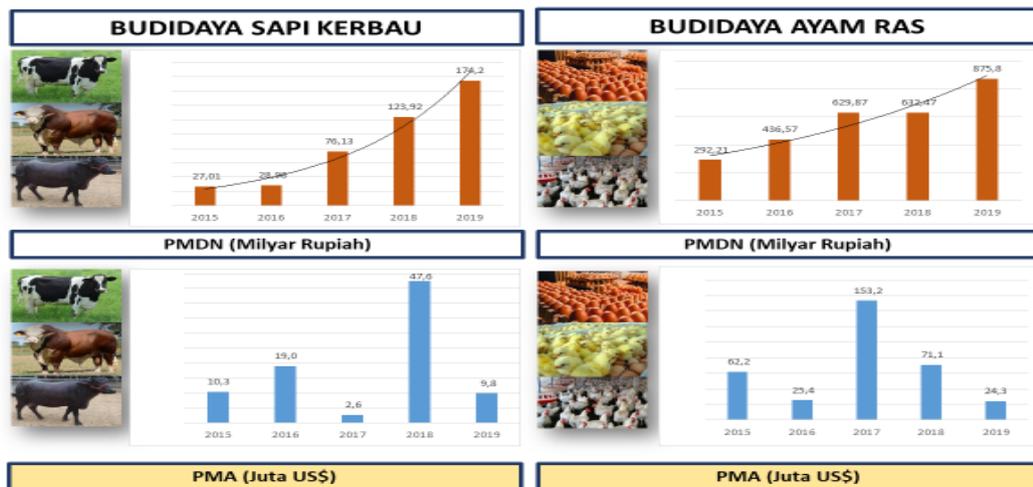
Realisasi investasi PMDN sub sektor peternakan tumbuh sebesar 21,49% dari Rp. 866,5 miliar (2018) menjadi 1.052,7 miliar (2019). Sedangkan realisasi investasi PMA mengalami penurunan 68,24% dari U\$ 119 ribu (2018) menjadi U\$ 37,8 ribu (2019). Kinerja Investasi Sub Sektor Peternakan lebih lengkap tersaji pada grafik 3.2.



Grafik 3.2 Kinerja Investasi Sub Sektor Peternakan

Investasi di sub sektor peternakan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai investasi PMDN pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 325,4 Miliar dan meningkat pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.052,7 miliar Miliar, sehingga akumulasi peningkatan investasi PMDN dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar Rp. 727,3 Miliar. Peningkatan investasi untuk PMDN pada tahun 2019 disebabkan karena adanya peningkatan investasi pada budidaya sapi/kerbau dan budidaya ayam ras. Namun demikian untuk investasi PMA mengalami penurunan pada budidaya sapi/kerbau dan ayam ras. Grafik Perkembangan Investasi untuk Budidaya Sapi/Kerbau dan Ayam Ras dapat dilihat pada Grafik 3.3 dibawah.

TIGA TAHUN TERAKHIR INVESTASI PETERNAKAN MENINGKAT



Keterangan : Sumber BKPM diolah Ditjen PKH

Grafik 3.3 Grafik Perkembangan Investasi untuk Budidaya Sapi/Kerbau dan Ayam Ras

Peningkatan investasi peternakan sapi/kerbau di dalam negeri terjadi karena adanya beberapa upaya dari Pemerintah, diantaranya: a) Pemerintah memfasilitasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga KUR sebesar 7%; b) Fasilitasi peningkatan akses pembiayaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN; c) Fasilitasi pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) bagi usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2015; d) Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTS/K), dengan fasilitasi bantuan premi untuk 120.000 ekor per tahun sejak 2016; e) Peningkatan pemanfaatan kemitraan antara pelaku usaha menengah besar dengan peternak mikro kecil.

a. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sub Sektor Peternakan

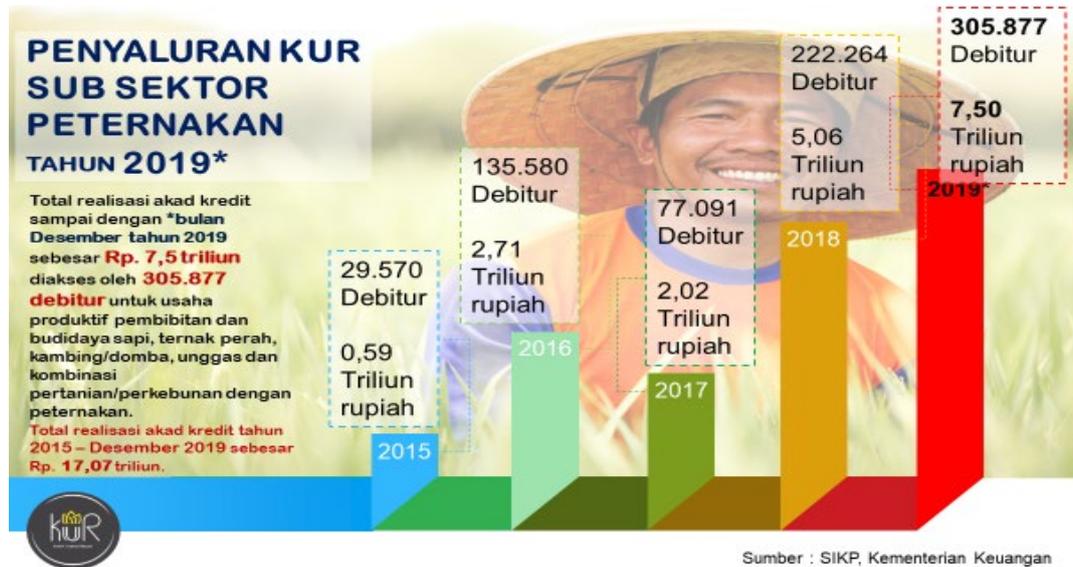
Pemerintah memfasilitasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga KUR sebesar 7%. Pada tahun 2018 suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang awalnya 9% turun menjadi 7%. KUR saat ini dapat diakses oleh kelompok usaha, dimana pada sebelumnya hanya dapat diakses oleh Debitur perseorangan. Fitur KUR yang baru juga memungkinkan untuk melakukan pembayaran cicilan setelah panen (*yarnen*). Selain itu juga terdapat KUR Khusus untuk sektor peternakan rakyat yang dapat dipergunakan untuk usaha pembiakan sapi, penggemukan sapi dan budidaya sapi perah.

Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha peternakan. Pada tahun 2017, KUR yang telah dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan adalah KUR Mikro dan Retail dengan bunga 9% tanpa grace periode dan plafon maksimal 25 Juta rupiah untuk KUR Mikro dan 500 Juta rupiah untuk KUR Retail. Pada Skema pembiayaan ini dipandang masih belum dapat mengakomodasi karakteristik usaha peternakan khususnya pembiakan sapi yang memerlukan bunga rendah, jangka waktu lama dan grace periode.

Pembahasan secara intensif telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2015 - 2017. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini telah mengakomodasi usulan untuk pembiakan sapi dalam KUR Khusus dan penambahan subsidi bunga menjadi 7% serta sistem yarnen atau bayar setelah panen. Pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka telah disusun bahan sebagai masukan pada Petunjuk Teknis KUR Sub Sektor Pertanian tahun 2018 bahan KUR Khusus Peternakan sebagai bagian Petunjuk Teknis KUR Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. KUR Khusus masih dengan skema yang sama dengan KUR kecil, perbedaannya adalah dapat diakses oleh kelompok dalam kluster kemitraan dengan perusahaan/koperasi sebagai avalis dan atau offtaker.

Selanjutnya pada tahun 2019, pada bulan September telah dinaikan subsidi bunga KUR, sehingga debitur UMKM hanya harus membayar bunga 6%. Pada tahun 2019 telah difasilitasi KUR Realisasi KUR pada tahun 2019, jumlah debitur KUR usaha peternakan meningkat sebesar 37,62% dari tahun 2018, yaitu dari 222.264 debitur menjadi 305.877 debitur. Begitu juga nilai kreditnya meningkat sebesar 48,22%, yaitu dari Rp. 5,06 Triliun menjadi Rp. 7,50 Triliun. Realisasi akad kredit KUR Sub Sektor Peternakan pada tahun 2019 sebesar Rp. 7,50 triliun untuk 305.877 debitur tersebut dengan rincian : peternakan sapi/kerbau Rp. 3,62 triliun (48,27%), unggas Rp. 1,42 triliun (18,93%), peternakan integrasi dengan pertanian lainnya Rp. 1,33 triliun (17,73%), domba/kambing Rp. 0,64 triliun (8,53%), dan babi Rp.0,47 triliun (6,26%).



Gambar 3.1 Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2019

Penyaluran KUR pada usaha peternakan sapi masih mendominasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan kreditur terhadap penerapan tata cara budidaya yang baik dan pengelolaan resiko usaha oleh peternak. Selain itu, tentu saja dengan adanya asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Pada tahun 2019 jumlah debitur KUR untuk usaha peternakan meningkat sebesar 37,62% dari tahun 2018, yaitu dari 222.264 debitur menjadi 305.877 debitur. Sedangkan nilai kreditnya meningkat sebesar 48,22%, yaitu dari Rp. 5,06 Triliun menjadi Rp. 7,50 Triliun. Gambar jumlah debitur dan realisasi akad kredit KUR tahun 2019 sub sektor peternakan per sector usaha dapat dilihat pada gambar 3.2.



Sumber : SIKP, Kementerian Keuangan

Gambar 3.2 Jumlah Debitur Dan Realisasi Akad Kredit KUR Tahun 2019 Sub Sektor Peternakan Per Sektor Usaha

b. Realisasi Fasilitasi Program Kemitraan BUMN Kemitraan untuk Sub Sektor Peternakan

Program Kemitraan merupakan program perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yang diberikan dalam bentuk dana pinjaman dengan jasa administrasi pinjaman ditetapkan sebesar 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Secara konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jauh berbeda dengan best practices CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN.

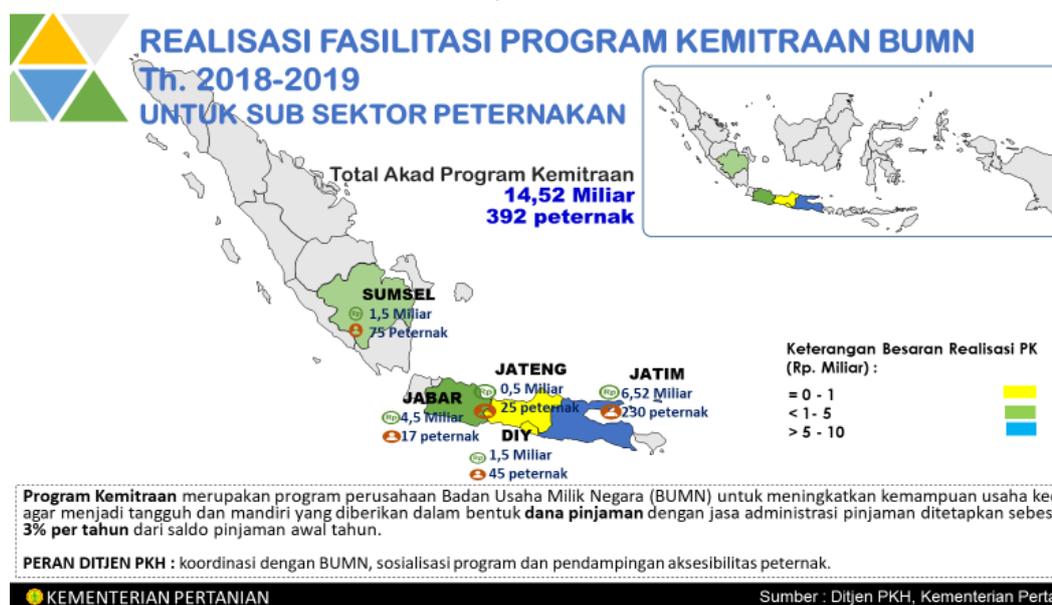
Fasilitasi Program Kemitraan BUMN Kemitraan untuk Sub Sektor Peternakan dilakukan dengan memanfaatkan Peningkatan akses pembiayaan non perbankan (PKBL). Ditjen PKH saat ini terus meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan lain non perbankan, salah satunya adalah PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang dilaksanakan oleh Perusahaan BUMN seperti PT. Sucofindo, PT Pelindo III, Bank BTN, PT. KAI, PT. Pertamina dan PT Jasindo. Melalui PKBL, perusahaan BUMN dapat memberikan kredit/pinjaman dengan bunga murah kepada mitra.

Pada tahun 2019 telah dilakukan kerjasama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan (PK BUMN) sebesar Rp. 5,96 Milyar. PK tersebut diberikan koperasi peternak sapi perah, yaitu Koperasi Setia Kawan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 1,86 Milyar; Kelompok Tambah Rejo Kulonprogo DIY sebesar Rp. 1 Milyar; Peternak binaan PT. Agro Investama di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1,5 Milyar; dan SPR Sungaililin di Kabupaten Musi Banyuasin untuk komoditas sapi potong sebesar Rp. 1,5 Milyar.



Gambar 3.3 Realisasi Fasilitas Program Kemitraan BUMN Tahun 2014-2019 untuk sub sektor Peternakan

Berikut sebaran realisasi fasilitas program Kemitraan BUMN Tahun 2018-2019 untuk sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.



Gambar 3.4 Sebaran Realisasi Fasilitas Program Kemitraan BUMN Tahun 2018-2019 untuk sub sektor Peternakan

c. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*)

Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) bagi usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2015. Fasilitas ini belum banyak dimanfaatkan oleh investor, sehingga untuk lebih operasional di lapangan, Kementerian Pertanian telah

mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai perubahan cakupan usaha yang mendapat fasilitas tax allowance. Perubahan tersebut meliputi usaha pembibitan sapi potong, pembibitan sapi perah, pembiakan sapi potong dan budidaya sapi perah.

d. Realisasi Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS)

Mitigasi resiko usaha melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan keberlangsungan usaha peternakan sapi dari resiko kematian dan kehilangan. Dengan mengasuransikan ternaknya, maka pelaku usaha akan semakin merasa aman dalam berusaha, sehingga dapat fokus untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usahanya.

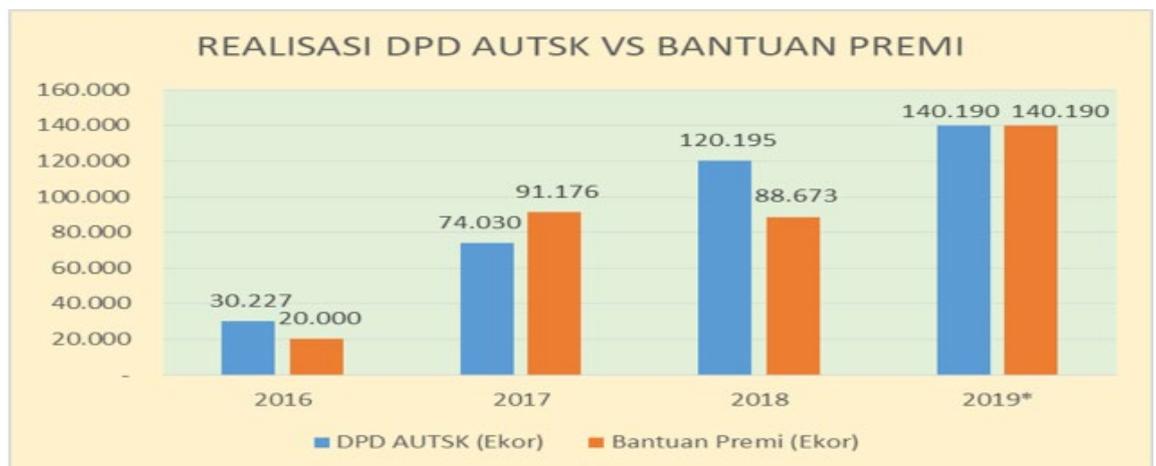
Dalam upaya mitigasi resiko usaha ternak sapi/kerbau, terutama terhadap resiko kematian karena penyakit, beranak, kecelakaan, serta kehilangan, pemerintah memfasilitasi bantuan premi bagi peternak kecil. Bantuan premi dimaksud sebesar 80% dari premi yang harus dibayar sebesar Rp. 200.000 untuk masa pertanggungan 1 tahun dengan nilai pertanggungan Rp. 10.000.000, sehingga peternak hanya membayar sebesar Rp. 40 ribu per tahun per ekor. Selain dimanfaatkannya bantuan premi oleh peternak kecil, dengan adanya produk asuransi ternak sapi dan kerbau ini, maka banyak peternak memanfaatkan produk asuransi ini secara swadaya. Jumlah peternak yang terlindungi asuransi sapi/kerbau dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar X.



Gambar 3.5 Jumlah peternak yang terlindungi asuransi sapi/kerbau dari tahun 2015-2019

Dengan menjadi peserta asuransi ini juga meningkatkan kepercayaan perbankan dalam memberikan kredit kepada peternak, karena dapat sebagai agunan. Sejak tahun 2016 telah difasilitasi bantuan premi asuransi ternak sapi, selanjutnya pada tahun 2018 ditambah cakupan komoditi kerbau. Selain itu dengan asuransi diharapkan dapat meningkatkan keberpihakan Bank penyalur kredit untuk memberikan kredit tanpa agunan tambahan yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dalam mengakses kredit.

Asuransi Usaha Ternak Sapi dan kerbau sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggungungan untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya. Untuk peternak skala mikro dan kecil, berdasarkan DPD Direktorat Jenderal PKH, pada tahun 2019 telah difasilitasi bantuan premi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian kepada 140.190 ekor sapi dan kerbau. Realisasi Bantuan Premi dan DPD AUTS dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.5.



Ket:) * Realisasi Bantuan premi VS DPD AUTSK per 31 Desember 2019
(Sumber: Data Aplikasi 'SIAP' diolah Dit. PPHNak)

Grafik 3.4 Realisasi Bantuan Premi dan DPD AUTS dari tahun 2016-2019

Jumlah peserta AUTS/K terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah peserta AUTS/K nasional berdasarkan DPD tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Jumlah Peserta AUTS/K Nasional Berdasarkan DPD Per 31 Desember 2019

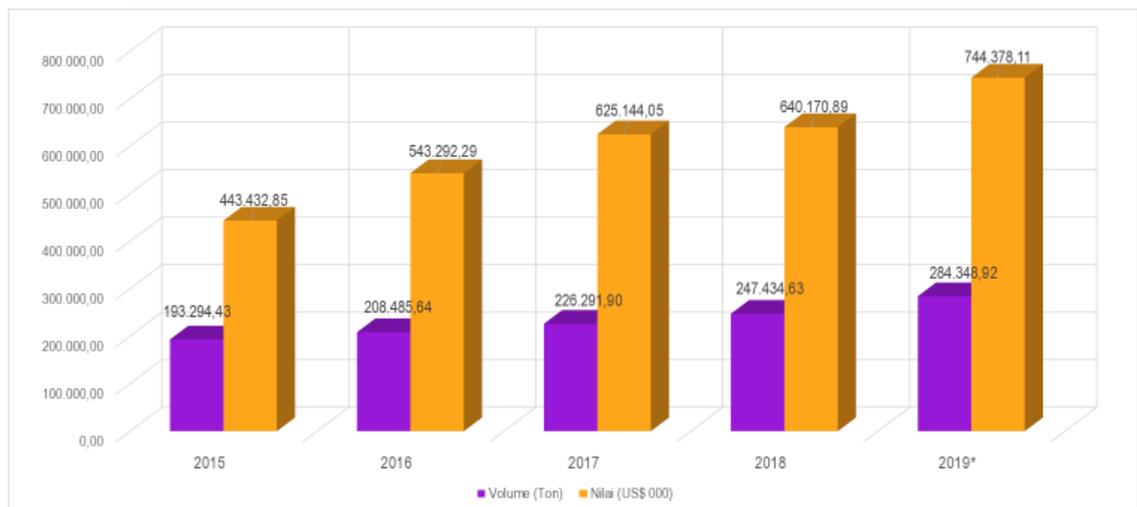


Grifik 3.5. Jumlah peserta AUTS/K nasional berdasarkan DPD tahun 2019

3.1.3 Ekspor dan Impor Sub Sektor Peternakan

Ekspor sub sektor peternakan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor. Kebijakan Kementan untuk mewujudkan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045 sedikit demi sedikit telah dapat dibuktikan. Perkembangan volume dan Nilai Ekspor Peternakan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grifik 3.7

KINERJA EKSPOR SUBSEKTOR PETERNAKAN 2015-2019*

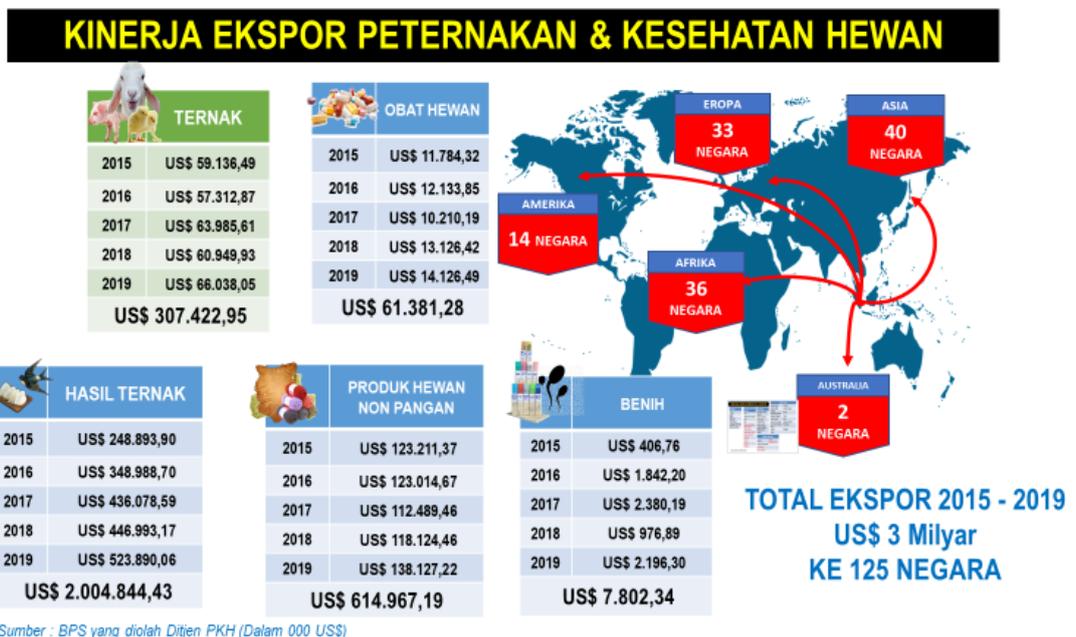


Sumber : BPS dan Pusdatin
 Pertumbuhan volume ekspor tahun 2019* terhadap tahun 2018 sebesar 14.92%,
 Pertumbuhan nilai ekspor tahun 2019* terhadap tahun 2018 sebesar 16.28%

Grifik 3.6 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Peternakan Tahun 2015-2019

Dari Grafik 3.6 tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian ekspor sub sektor peternakan di Indonesia cukup fantastis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pencapaian nilai ekspor komoditas subsektor peternakan tahun 2019 sebesar 744,378,11 ribu US Dollar atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,28% dari tahun 2018. Volume ekspor sub sektor peternakan pada tahun 2019 sebesar 284.348,92 ton atau mengalami peningkatan sebesar 14,92% dari tahun 2018.

Peningkatan volume ekspor pada tahun 2019 karena terjadi peningkatan ekspor pada ternak babi hidup, kambing hidup, DOC, daging ayam potong, telur tetas dan obat hewan. Apabila dilihat dari besarnya volume ekspor, maka ternak babi hidup masih menduduki urutan pertama terbesar, diikuti oleh obat hewan, daging ayam potong dan telur tetas. Namun demikian, berdasarkan data dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian nilai realisasi ekspor obat hewan tahun 2019 dari laporan perusahaan eksportir obat hewan sebesar 348.230.961 USD. Tingginya nilai ekspor obat hewan ini, sangat menggembirakan bagi dunia usaha di bidang obat hewan. Fakta ini sekaligus menunjukkan obat hewan mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara. Rincian Perkembangan Ekspor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Rincian Perkembangan Ekspor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019

Faktor-Faktor Implementasi Kegiatan Pendukung Ekspor:

a. Status Kesehatan Hewan

Aspek status kesehatan hewan ternyata menjadi persyaratan utama, dan menjadi salah satu daya saing dalam perdagangan

internasional. Untuk mendapatkan persetujuan dari negara calon pengimpor ternyata tidaklah mudah karena produk peternakan yang akan diekspor harus sesuai dengan yang menjadi persyaratan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Sebagaimana diketahui, sejak merebaknya penyakit AI (Avian Influenza) di Indonesia pada tahun 2004, beberapa negara telah menutup impor produk unggas dari Indonesia. Untuk itu, Ditjen PKH Kementan telah mengambil langkah kebijakan dengan melakukan pembebasan melalui kompartemen, zona, pulau atau provinsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 28 Tahun 2008 tentang Penataan Kompartementalisasi dan Zonasi.

Sistem Kompartemen bebas penyakit Avian Influenza (AI) merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor. Situasi penyakit HPAI pada unggas Indonesia saat ini sangat terkendali. Kejadian HPAI menurun secara signifikan setiap tahun dan hanya bersifat sporadis di daerah tertentu dan dapat dikendalikan dengan cepat. Pemerintah Indonesia bersama pihak-pihak terkait terus memperbaiki strategi dengan mengendalikan dan memberantas penyakit HPAI melalui zona bebas AI dan kompartemen secara bertahap dan terus menerus.

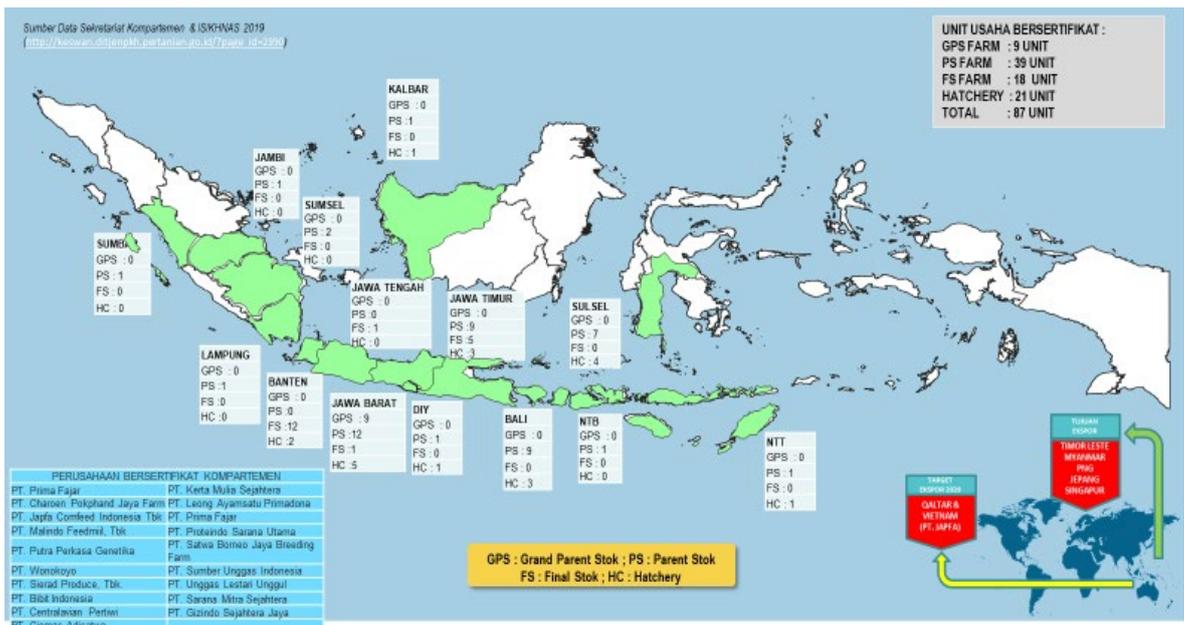
Tabel 3.1. Jumlah Kompartemen Bebas AI Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Kompartemen Bebas AI (unit)	Jumlah Provinsi
1	2017	77	9
2	2018	165	10
3	2019	87	14

Wilayah kompartemen bebas AI dalam hal ini peternakan (Breeding Farm) (Grand Parent Stock farm, Parent Stock farm), Final Stock Farm dan Hatchery, pada tahun 2017 total sebanyak 77 Unit Kompartemen Bebas AI pada 9 provinsi. Pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 165 Unit Kompartemen Bebas AI pada 10 provinsi dengan rincian: 1) Jawa Barat sebanyak 70 kompartemen; 2). Lampung sebanyak 13 kompartemen; 3). Jawa Timur sebanyak 30 kompartemen; 4) Banten sebanyak 14 kompartemen; 5). Jawa Tengah sebanyak 5 kompartemen; 6). Bali sebanyak 13 kompartemen; 7). Nusa Tenggara Timur sebanyak 6 kompartemen; 8). D.I.Yogyakarta sebanyak 4 kompartemen; 9). Kalimantan Barat

sebanyak 5 kompartemen; 10). Sulawesi Selatan sebanyak 5 kompartemen.

Pada tahun 2019 unit kompartemen bebas AI sebanyak 87 unit dengan sebaran provinsi yang sebelumnya hanya di 10 Provinsi meningkat menjadi 14 provinsi, yaitu: 1). Jawa Barat sebanyak 27 kompartemen; 2). Lampung sebanyak 1 kompartemen; 3). Jawa Timur sebanyak 17 kompartemen; 4). Banten sebanyak 14 kompartemen; 5) Jawa Tengah sebanyak 1 kompartemen; 6) Bali sebanyak 12 kompartemen; 7). Nusa Tenggara Timur : 2 kompartemen; 8). D.I.Yogyakarta sebanyak 2 kompartemen; 9). Kalimantan Barat sebanyak 2 kompartemen; 10) Sulawesi Selatan sebanyak 11 kompartemen; 11). Sumatera Barat sebanyak 1 kompartemen 12). Jambi sebanyak 1 kompartemen; 13). Sumatera Selatan sebanyak 2 kompartemen; 14). Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 kompartemen. Unit usaha perunggasan bersertifikat kompartemen bebas penyakit AI tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.7.

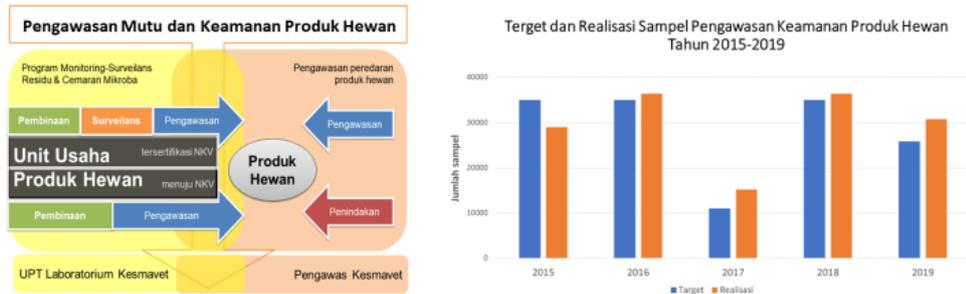


Gambar 3.7 Jumlah Unit Usaha Bersertifikat Kompartemen Bebas Penyakit Avian Influenza (AI) Tahun 2019 di Indonesia

b. Jaminan Keamanan Pangan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan standar keamanan pangan pada unit usaha/perusahaan produsen pangan dan non pangan asal hewan untuk meningkatkan ekspor. Hal ini mengingat dalam eksportasi

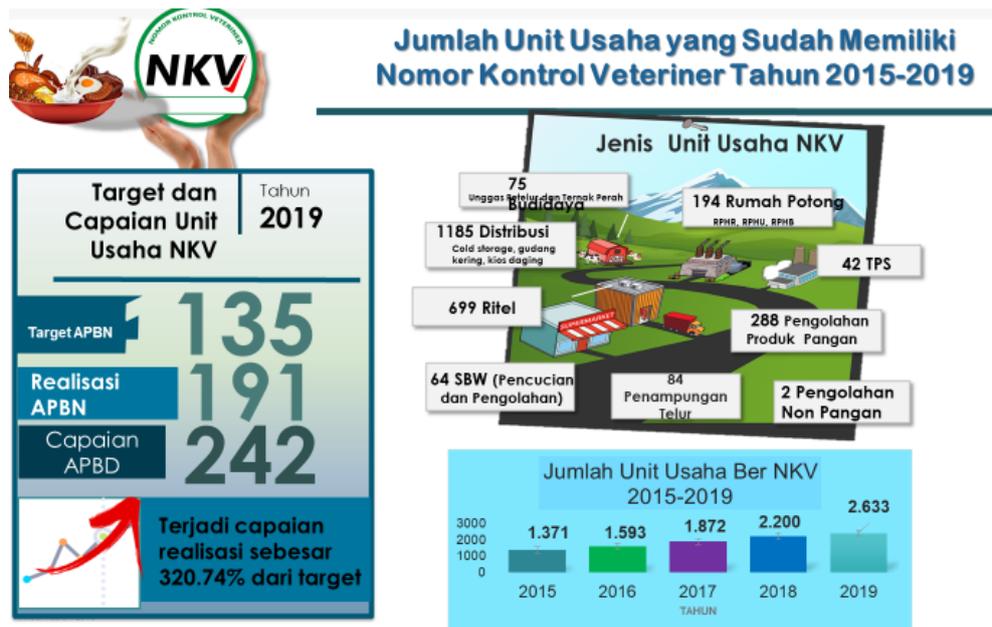
produk pangan dan non pangan asal hewan, aspek keamanan pangan menjadi persyaratan utama, serta menjadi salah satu daya saing utama dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu dilakukan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan.



Gambar 3.8 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan

Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah salah satu komponen penting dalam pemberian jaminan keamanan pangan terhadap ekspor produk pangan dan non pangan asal hewan. Sertifikasi NKV merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha produk pangan dan non pangan asal hewan. Keberadaan sertifikat NKV bagi unit usaha produk pangan dan non pangan asal hewan menjadi sangat penting dalam melakukan eksportasi.

Pada tahun 2019, Ditjen PKH telah mengeluarkan sebanyak 2.633 Sertifikat Veteriner untuk unit usaha ber-NKV. Sertifikat Veteriner diterbitkan dalam bentuk *Veterinary Certificate*, *Sanitary Certificate* dan *Health Certificate*.



Gambar 3.9 Jumlah Unit Usaha yang sudah Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tahun 2015-2019

Namun demikian, meskipun ekspor sub sektor peternakan mengalami peningkatan, Impor sub sektor peternakan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan volume dan Nilai Impor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.7

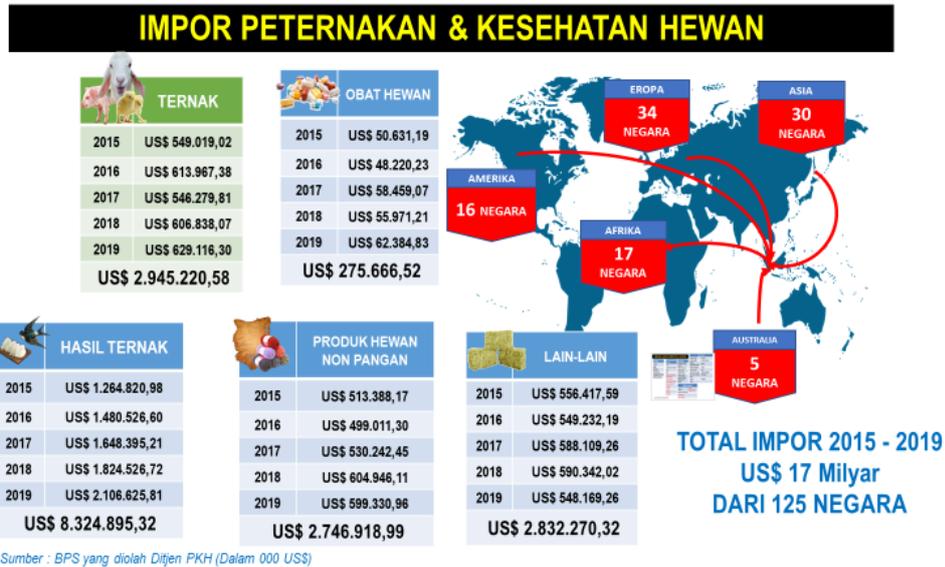


Sumber : BPS dan Pusdatin
 Pertumbuhan volume impor tahun 2019* terhadap tahun 2018 sebesar 5,16%,
 Pertumbuhan nilai impor tahun 2019* terhadap tahun 2018 sebesar 7,14%

Grafik 3.7 Perkembangan volume dan Nilai Impor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019

Total impor sub sektor peternakan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 17 Milyar US Dollar dari 125 negara, dengan nilai

impor terbesar pada komoditi hasil ternak. Rincian Impor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.10



Gambar 3.10 Rincian Impor Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2019

3.1.4 Daya Beli Peternak

Salah satu parameter peningkatan pendapatan peternak adalah Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan yang dihitung dari rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani yang mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga termasuk biaya produksi, sekolah, berobat, membeli sandang, papan dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. NTP Sub Sektor Peternakan pada tahun 2019 sebesar 108,05 naik sebesar 0,33% dari angka tahun 2015 yaitu 107,69.

Selanjutnya bila dilihat dari indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian saja. Nilai NTUP tahun 2018 sebesar 117,64 naik sebesar 3,23% dari tahun 2015 yaitu sebesar 113,96. Nilai NTP dan NTUP tersebut menunjukkan petani mengalami peningkatan surplus dalam usahanya.



Gambar 3.11 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Sub Sektor Peternakan (NTUPT) Tahun 2015-2019

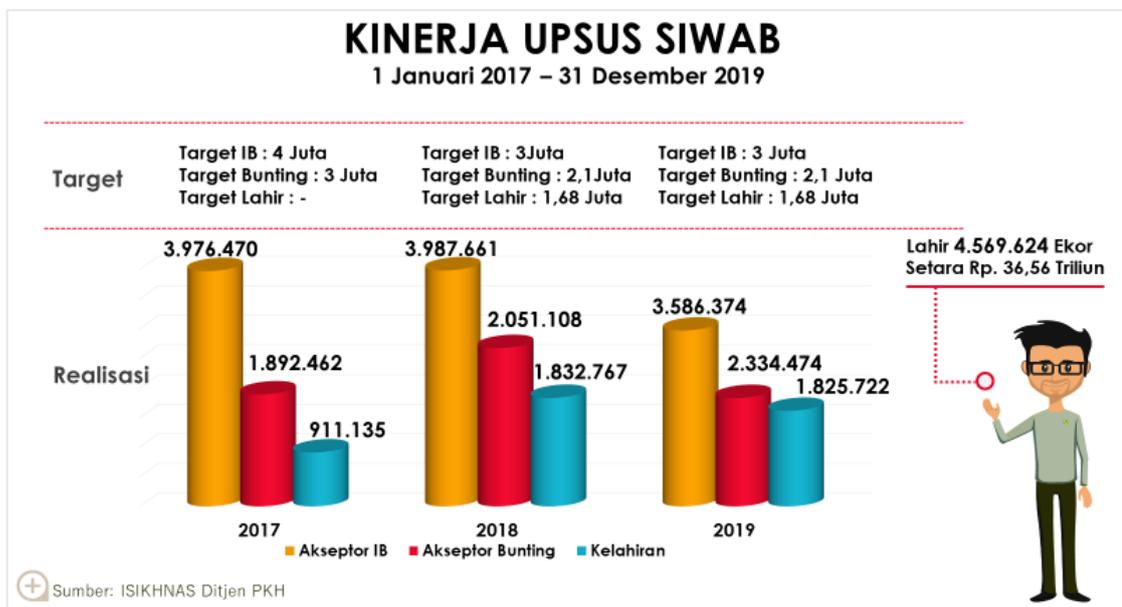
3.1.5 Tenaga Kerja Sub Sektor Peternakan

Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2019, tenaga kerja yang bekerja di subsektor peternakan sebanyak 4,48 juta orang. Pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja subsektor peternakan sebesar 5,94% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun demikian jumlah tenaga kerja Subsektor peternakan pada tahun 2019 naik 16,24% dari 2015. Rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja Sub Sektor Peternakan dari tahun 2015 – 2019 naik sebesar 2,03%. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja sub sektor peternakan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.12

3.2. Capaian Kinerja Utama

3.2.1. Optimalisasi Reproduksi Melalui Kegiatan SIWAB (Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting)

Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting Upsus Siwab ditujukan untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di tingkat peternak, yang kegiatannya diawali dari tahun 2017, dengan target kebuntingan sapi / kerbau 3 juta ekor, dari akseptor sebanyak 4 juta ekor. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dan 2019 dengan target per tahun masing-masing 3 (tiga) juta ekor akseptor dan 2,1 kebuntingan. Kelahiran merupakan output dari kegiatan Upsus Siwab yang juga dilaporkan dalam iSIKHNAS (Sistem Informasi dan Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi).



Grafik 3.8 Kinerja UPSUS SIWAB Tahun 2017-2019

a. Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan (IB) sebagai kegiatan rekayasa teknologi reproduksi untuk mengawini sapi merupakan kegiatan berkesinambungan untuk melayani sapi betina produktif yang sedang berahi. Melalui program Upsus Siwab kegiatan IB semakin dioptimalkan sebagai upaya perbaikan sistem manajemen reproduksi ternak sehingga service periodenya lebih pendek serta dapat meningkatkan mutu ternak sehingga lebih produktif.

Kinerja IB kumulatif sampai dengan bulan Desember mencapai **3.586.374** ekor akseptor atau **119,55%** dari target tahunan

3.000.000 ekor akseptor. Dan untuk kinerja pelayanan IB kumulatif sampai dengan bulan Desember sebanyak **4.392.171** dosis. Dari jumlah pelayanan IB dibandingkan jumlah akseptor yang dilayani selama tahun 2019 diperoleh rasio rata-rata nasional 1,22 IB/akseptor. Angka rasio ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan semen beku, biaya operasional dan sarana prasarana IB lainnya.

b. Realisasi Kebuntingan

Realisasi kebuntingan kumulatif sampai dengan bulan Desember mencapai **2.334.474** ekor atau **111,17%** dari target tahunan 2.100.000 ekor. Dan untuk kinerja pelayanan PKb kumulatif sampai dengan bulan Desember sebanyak **2.943.015**. Dari jumlah pelayanan PKb dibandingkan jumlah akseptor yang bunting selama tahun 2019 diperoleh rasio rata-rata nasional 1,26 layanan PKb/kebuntingan. Angka rasio ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan biaya operasional PKb dan sarana lainnya.

c. Realisasi Kelahiran

Realisasi kelahiran kumulatif sampai dengan bulan Desember mencapai **1.995.528** ekor atau **118,78%** dari target tahunan 1.680.000 ekor. Daerah perlu mengoptimalkan pelaporan kelahiran melalui iSIKHNAS, agar seluruh data kelahiran dapat terdokumentasikan dengan baik sebagai dasar perhitungan pertumbuhan populasi. Kondisi saat ini baru sebagian kelahiran yang dilaporkan melalui iSIKHNAS, hal ini disebabkan pelaporan kelahiran belum menjadi prioritas bagi petugas, petugas belum menjadwalkan secara rutin untuk melakukan pelaporan kelahiran. Jumlah kelahiran pedet selama kurun waktu pelaksanaan Upsus Siwab 2017-2019 sebanyak **4.569.624** ekor.

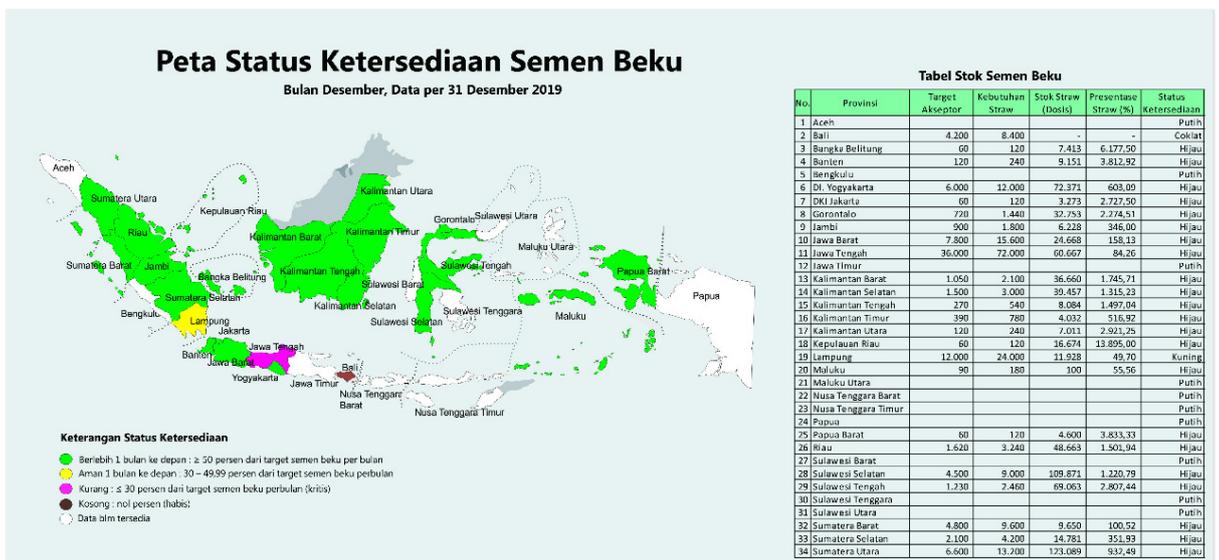
d. Penyediaan, Distribusi Semen Beku dan N2 cair

Semen beku yang digunakan dalam Upsus Siwab tahun 2019 adalah yang ber SNI atau telah melakukan uji lab berkala yang terstandar, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa semen beku yang beredar dimasyarakat harus terjamin kualitasnya sehingga tidak merugikan peternak sebagai produsen. Produsen semen beku yang sudah memenuhi persyaratan tersebut adalah adalah BBIB Singosari, BIB Lembang, BIBD Banjarbaru Kalsel, BIBD

Banyumulek NTB, BIBD Ungaran Jateng, BIBD Tuah Sakato Sumbar, BIBD Ciamis Jabar, BIBD Baturiti Bali, BIBD DIY, BIBD Riau, BIBD Bengkulu dan BIBD Sulsel.

Berdasarkan laporan dari kontrak pengadaan semen beku dari Januari-Desember 2019 secara nasional dari target triwulan I-IV total 4.831.430 dosis sudah terealisasi sebanyak 5.138.130 dosis (106,35%), dengan sebaran rumpun seperti Simental, Limousin, Angus, FH, Brahman, PO, Bali, Madura, Aceh dan Kerbau.

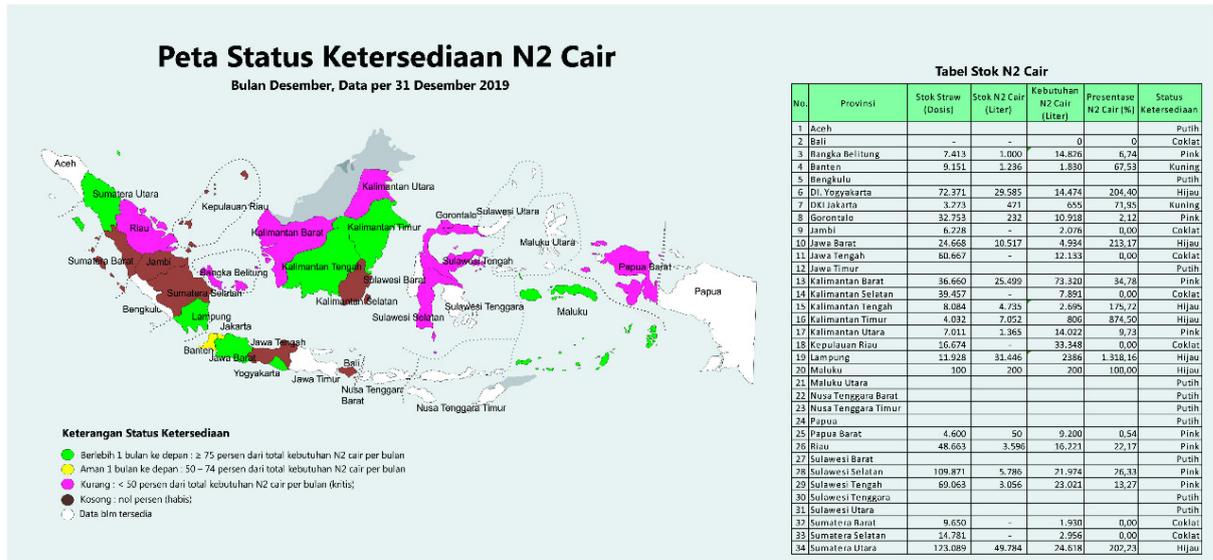
BBIB Singosari, BIB Lembang, BIBD Banjarbaru Kalsel, BIBD Banyumulek NTB, BIBD Ungaran Jateng, BIBD Tuah Sakato Sumbar, BIBD Ciamis Jabar, BIBD Baturiti Bali, BIBD DIY, BIBD Riau, BIBD Bengkulu dan BIBD Sulsel sudah mendistribusikan semen beku. Penerimaan semen beku kumulatif sampai bulan Desember di provinsi sebanyak 3.996.916 dosis, dan dari jumlah tersebut yang sudah didistribusikan sampai ke kabupaten/kota sebanyak 3.799.236 dosis. Untuk pengadaan N2 cair selama 2019 dari target 1.505.502 liter dapat terealisasi sebanyak 1.412.581 liter (93,83%) dan distribusi N2 cair sudah didistribusikan sampai ke kabupaten/kota sebanyak 1.278.970 liter (81,76%) dari target 1.564.321 liter. Dan untuk stock semen beku dan N2 cair secara nasional untuk semen beku ada sebanyak 1.084.257 dosis dan untuk N2 cair ada sebanyak 485.652 liter yang tersebar di seluruh Indonesia.



Gambar 3.14. Peta Ketersediaan/Stock Semen Beku

Ketersediaan semen beku diperoleh bahwa sebagian besar provinsi untuk ketersediaan semen beku di lapangan dalam kondisi aman, kecuali di Provinsi Jawa Tengah dan Lampung. Dan untuk ketersediaan/stock N2 cair diperoleh bahwa sebagian

besar provinsi khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan serta Sulawesi ketersediaan N2 cair kurang.



Gambar 3.15. Peta Ketersediaan N2 Cair

Untuk mengatasi ketersediaan N2 cair yang kurang diharapkan provinsi segera mempercepat proses pengadaan N2 cair dan pendistribusiannya ke lapangan serta bagi provinsi yang alokasi anggaran pengadaan N2 cairnya masih kurang dari jumlah kebutuhannya dapat mencari alternatif pendanaan dari sumber lain. Ketersediaan N2 cair harus sinkron dengan ketersediaan semen beku di lapangan, agar kualitas semen beku tetap terjaga. Untuk provinsi yang stock N2 cairnya dalam kondisi kurang disarankan agar pengiriman semen beku ke provinsi tersebut ditunda sementara sampai dengan kondisi N2 cair di provinsi tersebut terpenuhi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan semen beku.

e. Penyediaan dan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Petugas Teknis Reproduksi

Petugas teknis reproduksi merupakan ujung tombak dalam keberhasilan Upsus Siwab, petugas akan berhubungan langsung dengan peternak untuk melayani dan mengobati ternak dan sekaligus melakukan *transfer knowledge* kepada peternak terkait peningkatan wawasan dan keterampilan peternak khususnya terkait dengan reproduksi. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga teknis reproduksi sehingga pelayanan inseminasi dapat dilakukan secara optimal.

Jumlah inseminator nasional sebanyak 9.277 orang, dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur 1.665 orang (17,95%) dan jumlah paling sedikit di Provinsi DKI Jakarta 15 orang (0,16%). Rataan harian pelayan IB tahun 2019 secara nasional sebanyak 1,30 layanan IB perinseminator, dengan rataannya harian pelayan IB tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 3,44 layanan IB perinseminator dan yang terendah di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 0,05 layanan IB perinseminator.

Jumlah PKb nasional sebanyak 4.298 orang, dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur 867 orang (20,17%) dan jumlah paling sedikit di Provinsi DKI Jakarta 3 orang (0,07%). Rataan harian pelayan PKb tahun 2019 secara nasional sebanyak 1,88 layanan PKb perpetugas, dengan rataannya harian pelayan PKb tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,37 layanan PKb perpetugas dan yang terendah di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 0,13 layanan PKb perpetugas.

Jumlah pelapor kelahiran nasional sebanyak 4.885 orang, dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur 1.113 orang (22,78%) dan jumlah paling sedikit di Provinsi DKI Jakarta 3 orang (0,06%). Rataan harian pelaporan kelahiran tahun 2019 secara nasional sebanyak 1,12 pelaporan lahir perpetugas, dengan rataannya harian pelaporan kelahiran tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,53 pelaporan kelahiran perpetugas dan yang terendah di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 0,11 pelaporan kelahiran perpetugas. Dari jumlah petugas pelapor kelahiran dibandingkan dengan jumlah inseminator (9.277 orang), dapat disimpulkan bahwa belum semua petugas inseminator menjadi petugas aktif pelapor kelahiran. Untuk dapat meningkatkan data kelahiran diharapkan seluruh petugas inseminator ditugaskan untuk aktif melaporkan kelahiran.

f. Penyediaan Hijauan Pakan Ternak

Keberhasilan usaha peternakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan hijauan yang cukup dan berkualitas. Dalam upaya untuk mendukung program Upsus Siwab dalam hal penyediaan hijauan pakan ternak dilakukan kegiatan gerbang patas (gerakan penanaman dan pengembangan pakan berkualitas), pengembangan padang penggembalaan dan pemeliharaan padang penggembalaan.

Kegiatan Penanaman dan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak tahun 2019 setelah revisi DIPA menjadi target penanaman 163 Ha yang tersebar di 9 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Progres kegiatan dukungan HPT dalam Program Upsus Siwab sampai dengan Desember 2019 untuk kegiatan Gerbang Patas dari target 163 Ha terealisasi 151 Ha (92,63%).

Kegiatan pengembangan padang penggembalaan tahun 2019 setelah direvisi DIPA menjadi target seluas 100 Ha di Provinsi NTB. kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan dari target 100 Ha terealisasi 100 Ha (100,00%). Kegiatan pemeliharaan padang penggembalaan tahun 2019 setelah revisi DIPA menjadi dengan target seluas 472 Ha di 4 Provinsi, yaitu Provinsi NTB, Aceh, Jateng, Sulteng dan Papua Barat. Kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan dari target 472 Ha sudah terealisasi 472 Ha (100,00%).

Kegiatan Unit Usaha-HPT tahun 2019 dengan target 5 Unit yang tersebar di 5 provinsi, yaitu di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kegiatan Pengembangan Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak dari target 50 Ha sudah terealisasi 50 Ha (100,00%).

g. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Kegiatan Penanggulangan gangguan reproduksi merupakan salah satu pelayanan dalam kesehatan hewan untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang mengganggu reproduksi sapi betina. Diharapkan dengan penanganan tersebut, ternak yang terindikasi penyakit gangguan reproduksi dapat ditanggulangi dan disembuhkan sehingga sapi tersebut dapat kembali dijadikan sebagai akseptor. Pelaksana kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi tersebut adalah UPT Balai Veteriner Medan, BVet Bukittinggi, BVet Lampung, BVet Subang, BVet Banjar Baru, BBVet Wates, BBVet Denpasar, dan BBVet Maros yang berkoordinasi dengan dinas terkait di provinsi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ternak bulan Januari-Desember 2019 sudah ditemukan **61.859** ekor (91,263%) ternak yang dinyatakan gangguan reproduksi. Dari ternak yang mengalami gangguan reproduksi, sudah sembuh sebanyak **45.615** ekor

(73,74%), dari ternak yang sudah sembuh tersebut sudah dilakukan IB sebanyak **26.036** ekor (57,08%), dan dari ternak yang sudah di-IB tersebut sudah bunting sebanyak **8.561** ekor (32,88%). Penemuan kasus ganggreh tertinggi sampai bulan November ditemukan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Wates yaitu sebanyak 20.000 ekor. Gangguan reproduksi yang banyak dialami oleh ternak adalah *Hipofungsi Ovary* 41,18% dan *Endometritis* 11,16%. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang cepat dan tepat untuk melakukan pengobatan pada ternak yang terindikasi ganggreh.



Gambar 3.16. Realisasi Penanganan Gangguan Reproduksi

h. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Pengendalian pemotongan betina produktif bertujuan untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif yang masih banyak terjadi di RPH. Betina produktif merupakan mesin produksi sapi yang harus dilindungi, oleh sebab itu pemotongannya harus dikendalikan, sehingga sapi betina yang dapat diselamatkan tersebut akan mempertahankan keberadaan akseptor pelaksanaan Upsus Siwab. Dalam upaya pelaksanaan pengendalian pemotongan tersebut sudah dilakukan kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Baharkam Polri dan sudah banyak dilakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan tentang pelarangan pemotongan betina produktif di pasar-pasar hewan dan Rumah Pemotongan Hewan Data Pemotongan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif.

Akumulasi pemotongan ternak dari Januari hingga Desember 2019 yang terdiri dari sapi lokal, sapi eks-impor dan kerbau sebanyak 1.047.344 ekor, dengan rincian sebanyak 874239 ekor (83,47%) merupakan ternak jantan dan 173.105 ekor (16,53%) ternak betina. Dari 173.105 ekor ternak betina yang dipotong terdiri dari 163.364 ekor (94,37%) betina tidak produktif dan 9.741 ekor (5,63%) betina produktif.

Akumulasi dari Januari hingga Desember 2019 total ternak betina yang masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 178.081 ekor, dengan rincian sebanyak 163.364 ekor (91,74%) merupakan ternak betina tidak produktif dan 14.717 ekor (8,26%) ternak betina produktif. Dari 14.717 ekor ternak betina produktif ini sebanyak 9.741 ekor (66,19%) dilakukan pemotongan dan sebanyak 4.976 ekor (33,81%) berhasil ditolak untuk dipotong/berhasil dikendalikan.



Gambar 3.17. Capaian Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Provinsi yang dapat melakukan pengendalian pemotongan ternak betina produktif tertinggi dilakukan oleh Jawa Timur (99,81%), Jawa Barat (66,67%) dan Bengkulu (61,94%). Perlu upaya yang optimal untuk peningkatan pengendalian pemotongan betina produktif dan mengidentifikasi lebih lanjut penyebab tingginya pemotongan betina produktif. Perlu juga untuk mengevaluasi bagi daerah yang tidak dapat mengendalikan pemotongan terhadap

sapi/kerbau betina produktif di RPH terkait kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pencegahan di lapangan.

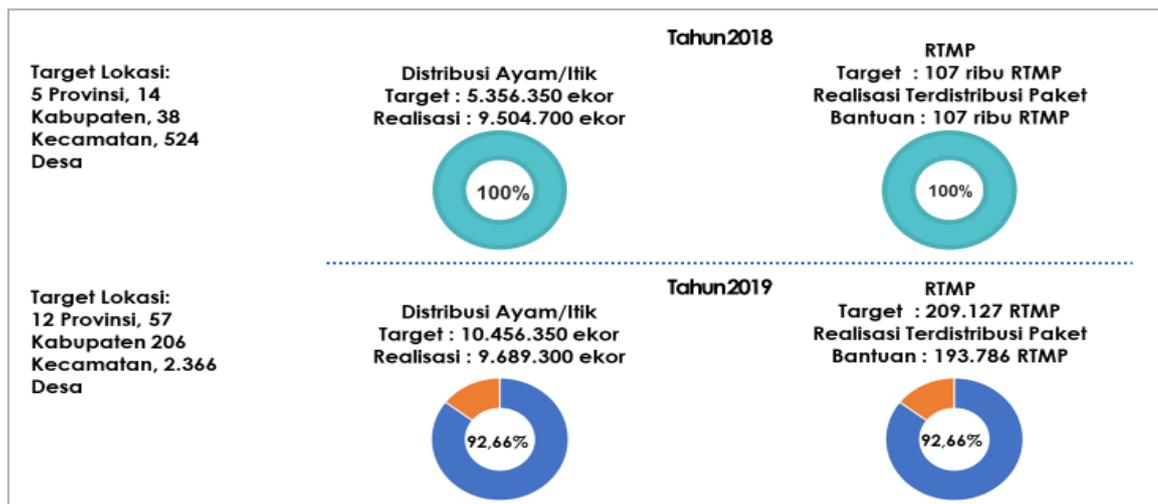
3.2.2. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Melalui Kegiatan BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera)

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang selanjutnya disebut Program BEKERJA adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Jenis bantuan yang diberikan dalam kegiatan BEKERJA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa ternak ayam/itik lokal atau persilangan (umur minimal 4 minggu) dengan target sebanyak 10.456.350 ekor yang disertai bantuan pembuatan kandang, pakan, obat dan vitamin.

Kegiatan BEKERJA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 dilaksanakan di 12 provinsi yang mencakup 57 kabupaten, 206 kecamatan dan 2.366 desa, yaitu Jawa Timur (Probolinggo, Pamekasan, Bangkalan, Nganjuk, Malang), Jawa Tengah (Pemalang, Grobogan, Blora, Kebumen, Klaten), Banten (Lebak, Serang, Tangerang), Gorontalo (Kab Gorontalo, Bualemo, Kota Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Pohuwatu), Sulawesi Selatan (Wajo, Pinrang, Maros, Takalar, Bone, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Soppeng, Pangkep), Sulawesi Barat (Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara), Sulawesi Tenggara (Kolaka, Buton, Konawe Utara, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Selatan, Bombana), Bengkulu (Keur, Lebong), Sumatera Barat (Pasaman, Pasaman Barat), Sumatera Selatan (Muara Enim, OKI), Sumatera Utara (Padang Lawas, Simalungun), dan Kalimantan Selatan (Tanah Bumbu, Tapin, Tanah Laut, Balangan, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru).

Total realisasi RTM penerima bantuan sebanyak 193.786 RTMP (92,66%) dari target 209.127 RTMP, dengan realisasi fisik paket bantuan kegiatan BEKERJA yang terdiri dari bantuan pembuatan kandang 206.957 unit (98,96%) dari target 209.127 unit, ayam/itik 9.689.300 ekor (92,66%) dari target 10.456.350 ekor, pakan 29.384.400 kg (93,67%) dari target 31.369.050 kg, dan obat dan vitamin 195.594 paket (93,53%) dari target 209.127 paket.

Total realisasi anggaran dari 14 UPT Pelaksana Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 untuk paket bantuan berupa ayam/itik, pakan, obat-obatan dan vitamin sebesar Rp 561.353.689.184,- (89,88%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp 624.576.650.890,-.



Gambar 3.18 Realisasi Kegiatan BEKERJA Tahun 2018-2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3. Capaian Kinerja Fungsi

3.3.1 Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak telah menghasilkan:

a. Benih Ternak Unggul

Benih yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat adalah semen dan embrio. Semen dihasilkan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang, Jawa Timur dan Balai Inseminasi Buatan Lembang, Jawa Barat, sedangkan embrio dihasilkan oleh Balai Embrio Transfer Cipelang, Bogor, Jawa Barat. Produksi nasional tahun 2015-2019 adalah 23,92 juta straw terdiri dari BBIB Singosari sebanyak 13,68 juta straw dan BIB Lembang 10,23 juta straw. Total Produksi Semen Beku yang dihasilkan BBIB Singosari pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,66% dari pada total produksi tahun 2018. Total Produksi Semen Beku yang dihasilkan BIB Lembang pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,20% dari pada total produksi tahun 2018. Embrio yang dihasilkan

pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,58% dari pada total produksi tahun 2018. Sedangkan produksi embrio 2015-2019 adalah 5.495 embrio.

Tabel 3.2. Produksi Semen dan Embrio UPT Nasional 2015-2019

No.	UPT	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Total Semen	3.914.564	3.767.372	4.202.989	5.722.207	6.316.818	23.923.950
1	BBIB Singosari	2.056.156	1.897.228	2.265.956	3.584.172	3.881.620	13.685.132
2	BIB Lembang	1.858.408	1.870.144	1.937.033	2.138.035	2.435.198	10.238.818
	Total Embrio	1.805	960	877	859	994	5.495
1	BET Cipelang	1.805	960	877	859	994	5.495

b. Bibit Ternak Unggul

Bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi pembudidayaan ternak yang penting dan strategis untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil dalam penyediaan pangan asal ternak khususnya komoditas sapi yang memiliki daya saing tinggi. Saat ini bibit ternak yang dihasilkan sebagian besar dari UPT/UPTD karena balai-balai tersebut mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam memproduksi bibit ternak yang diharapkan menjadi sumber bibit ternak nasional.

Kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di 8 UPT, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Siborongborong, BPTU-HPT Pelaihari dan BET Cipelang dengan target produksi sebanyak 1.452 ekor untuk sapi/kerbau, 500 ekor kambing/domba, 1.250 ekor babi dan 725.000 ekor unggas. Populasi dan produksi bibit ternak pada UPT tahun 2014-2019 mencapai 3.121.581 ekor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Produksi Bibit 2017 – 2019

No.	UPT	Produksi Bibit (Ekor)					
		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indrapuri						
	Sapi Aceh	192	267	68	73	71	82
2	Siborongborong						
	Kerbau	400	68	45	78	56	76
	Babi	2.596	1.038	1.052	424	1.250	501
3	Padang Mengatas						
	Sapi Potong	548	485	387	369	290	362

4	Sembawa						
	Sapi Brahman	1.143	1.273	100	100	450	385
	Ayam	190.100	317.048	200.000	256.619	250.000	370.768
5	Baturraden						
	Sapi Perah	416	477	250	282	250	396
	Kambing Perah	282	334	125	193	125	171
6	Pelaihari						
	Sapi Madura	30	32	20	20	15	18
	Kambing	316	326	450	584	375	391
	Itik	413.889	354.818	415.000	510.431	475.000	722.360
7	Denpasar						
	Sapi Bali	276	248	210	210	240	240
8	BET Cipelang	80	80	80	80	80	95
	Sapi	80	80	80	80	80	95
	Jumlah	610.268	676.494	617.787	769.463	728.202	1.095.845

Capaian populasi dan produksi bibit ternak tahun 2019 sebesar 1.095.845 ekor (%) dari target 728.202 ekor masuk dengan kategori sangat berhasil. Permasalahan yang terjadi dalam peningkatan produksi sapi potong yaitu adanya pelaksanaan seleksi dan penyesuaian anggaran yang ada di BPTU-HPT Sembawa yaitu sebanyak 1.050 ekor. Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam peningkatan produksi babi karena adanya induk ternak babi yang sudah tua dan diperlukan refreshment induk pada BPTU-HPT Siborongborong.

c. Sertifikasi Benih dan Bibit Ternak

LSPro Benih dan Bibit Ternak memiliki peran penting dalam mensukseskan program SIWAB. Peran tersebut adalah untuk memastikan bahwa semen beku sapi yang diproduksi telah memenuhi persyaratan mutu yang diminta oleh SNI. Bagi Produsen yang telah memenuhi persyaratan SNI maka akan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) oleh LSPro Benih dan Bibit Ternak. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI inilah yang semen bekunya sesuai aturan dapat digunakan untuk kegiatan SIWAB. Keuntungan secara umum bagi produsen yang mengajukan produk benih dan bibit ternaknya ke LSPro adalah (a) menjalankan amanat Undang-undang, (b) mendapatkan jaminan kualitas produk secara tertulis, (c) meningkatkan daya jual produk, dan (d) berhak mencantumkan logo SNI pada produk dan bahan publikasi lainnya. Keuntungan bagi konsumen adalah timbulnya rasa aman dan kepercayaan pada produsen.

Capaian kinerja layanan sertifikasi benih dan bibit ternak sejak tahun 2019 terdiri dari produk benih semen beku 201 ekor bull (setara dengan 2.965.000 straw), benih embrio 867 embrio sapi, bibit sapi potong (sapi bali, sapi PO, sapi SO dan Brahman) sejumlah 312 ekor, bibit sapi perah Holstein 75 ekor, bibit kambing PE 103 ekor, bibit domba 110 ekor, bibit babi 22 ekor, dan bibit DOC yang berasal dari 10 Produsen *breeder* DOC sejumlah jutaan ekor.

Selain hal-hal tersebut, Indonesia sebagai anggota WTO, diwajibkan memenuhi peraturan perdagangan Internasional yang telah ditetapkan, yaitu tidak memperlakukan jasa dan produk secara diskriminatif, sehingga harus ditetapkan satu standar tunggal untuk jasa dan produk yang beredar. Tujuannya yaitu untuk melindungi konsumen karena saat ini masih ada bibit yang diproduksi dan diedarkan belum sesuai dengan SNI yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil Kegiatan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang sudah selesai dalam rapat konsensus diantaranya :

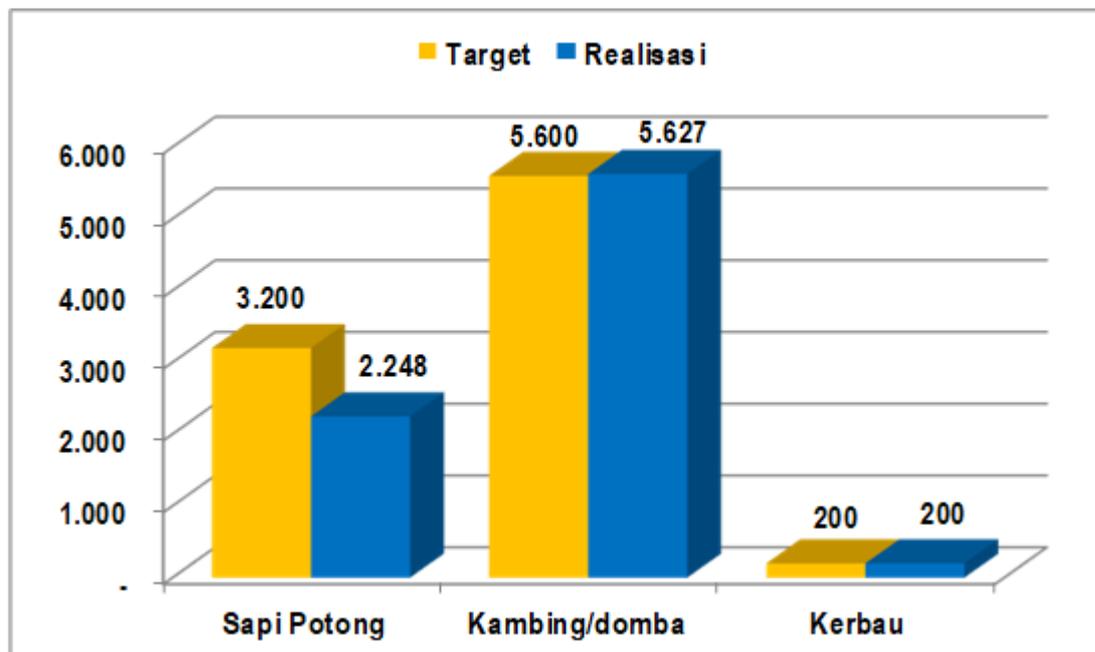
1. RSNI-3 Bibit babi - Bagian 1 : Landrace
2. RSNI-3 Bibit babi - Bagian 2 : Yorkshire
3. RSNI-3 Bibit babi - Bagian 3 : Duroc
4. RSNI-3 Bibit babi - Bagian 4 : Kampsphire
5. RSNI-3 Bibit itik Alabio meri umur sehari/muri
6. RSNI-3 Bibit itik Mojosari meri umur sehari/muri
7. RSNI-3 Itik komersial Alabio meri umur sehari/muri
8. RSNI-3 Itik komersial Mojosari meri umur sehari/muri
9. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 8 : Simmental Indonesia
10. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 9 : Limousin Indonesia
11. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 10 : Jabres
12. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 1 : Brahman Indonesia
13. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 2 : Madura
14. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 3 : Aceh
15. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 4 : Bali
16. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 5 : Peranakan Ongol
17. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 6 : Pesisir
18. RSNI-3 Bibit sapi potong-Bagian 7 : SO
19. RSNI-3 Bibit kerbau-Bagian 1 : Lumpur

Target capaian kegiatan pada tahun 2019 adalah 10 (sepuluh) RSNI, sedangkan realisasi kegiatan yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) RSNI.

d. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2019, untuk pelaksana kegiatan pengadaan ternak sapi lokal dilakukan oleh 8 Satker yaitu : (i) BBPTU-HPT Baturraden; (ii) BPTU-HPT Sembawa; (iii) BIB Lembang; (iv) BET Cipelang; (v) BPMSP Bekasi; (vi) BPMSPH Bogor; (vii) Bvet Subang; (viii) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan total target sebanyak 3.200 ekor. Selanjutnya untuk kegiatan pengadaan kerbau dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu : BBVet Maros; dengan total target pengadaan sebanyak 200 ekor. Sedangkan untuk pengadaan Kambing dan Domba dilaksanakan oleh 3 satker, yaitu: (i) BIB Lembang; (ii) BET Cipelang; (iii) BPTU-HPT Pelaihari, dengan total target pengadaan sebanyak 5.600 ekor.

Secara umum realisasi pengadaan ternak ruminansia potong tahun 2019, sebagai berikut : (i) ternak sapi potong dengan target 3.200 ekor, terealisasi sebanyak 2.248 ekor atau tercapai sebesar 70,25 %; (ii) ternak kambing/domba dengan target 5.600 ekor, terealisasi sebanyak 5.627 ekor atau tercapai sebesar 100,48%; (iii) ternak kerbau dengan target 200 ekor, terealisasi sebanyak 200 ekor atau tercapai sebesar 100%. Rincian realisasi kegiatan pengadaan ternak pada tahun 2019 seperti pada Grafik berikut :



Grafik 3.9 Realisasi Kegiatan Pengadaan Ternak Ruminansia Potong

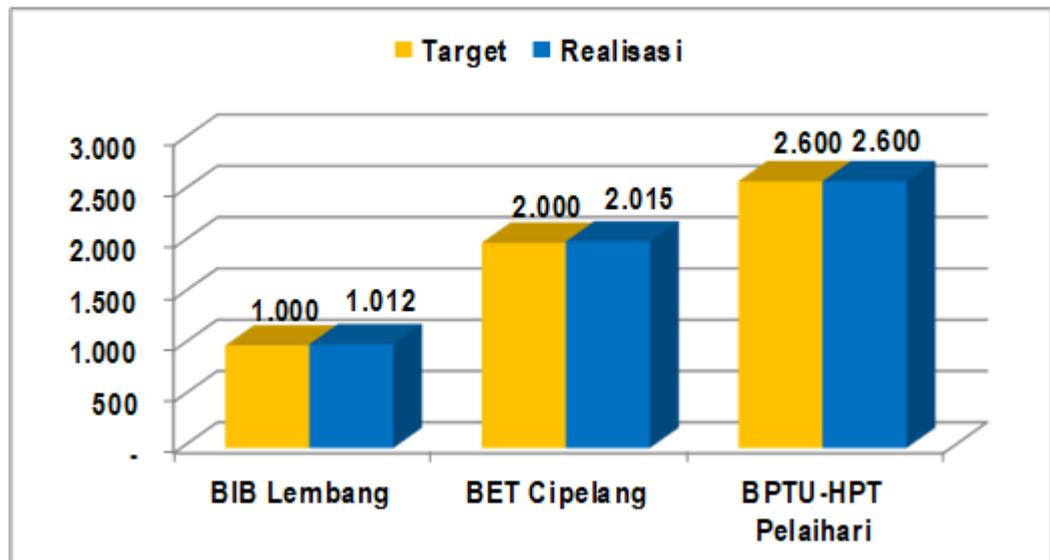
Sedangkan realisasi pelaksanaan pengadaan ternak pada setiap Satker Pelaksana untuk masing-masing komoditas, secara umum

dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target realisasi kegiatan pengadaan ternak lokal disebabkan tidak tercapainya realisasi kegiatan tersebut di Satker BBPTU-HPT Baturaden. Komoditas sapi lokal di Satker BBPTU-HPT Baturaden memiliki target sebanyak 2.200 ekor, sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.248 ekor atau 56.73%. Tidak tercapainya realisasi kegiatan tersebut karena penyedia barang/jasa tidak dapat merealisasikan sesuai kontrak pengadaan sapi (adanya putus kontrak pada pengadaan sapi indukan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Rincian realisasi pengadaan ternak lokal pada setiap Satker Pelaksana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong

NO	Pelaksana	Komoditas	Jumlah (ekor)		%
			Target	Realisasi	
1	BBPTU-HPT Baturraden	Sapi potong	2.200	1.248	56,73
2	BPTU-HPT Sembawa	Sapi potong	650	650	100,00
3	BIB Lembang	Sapi potong	62	62	100,00
		Kambing/domba	1.000	1.012	101,20
4	BET Cipelang	Sapi potong	12	12	100,00
		Kambing/domba	2.000	2.015	100,75
5	BPMSB Bekasi	Sapi potong	12	12	100,00
6	Bvet Subang	Sapi potong	12	12	100,00
7	BPMSB Bogor	Sapi potong	12	12	100,00
8	Dinas Peternakan dan Keswan Prov Bali	Sapi potong	240	240	100,00
9	BVET Maros	Kerbau	200	200	100,00
10	BPTU-HPT Pelaihari	Kambing/domba	2.600	2.600	100,00
TOTAL			9.000	8.075	89,72

Untuk realisasi pengadaan kambing/domba per satker pelaksana dapat disajikan sebagai berikut : (i) BIB Lembang sebanyak 1.012 ekor (101,20%); (ii) BET Cipelang sebanyak 2.015 ekor (100,75%); (iii) BPTU-HPT Pelaihari sebanyak 2.600 ekor (100%).



Grafik 3.9 Realisasi Kegiatan Pengadaan Kambing dan Domba

e. Capaian Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Revisi ke 3 bahwa produksi daging sapi dan kerbau pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 755 ribu ton atau meningkat sebesar 8,6% dari target produksi tahun 2018. Capaian produksi daging sapi dan kerbau pada tahun 2019 dalam bentuk karkas sebesar 514.393 ton dari target sebesar 755.000 ton, atau mencapai 68,13 %.

Faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut diantaranya: (1). Menurunnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging sapi dan kerbau akibat menurunnya daya beli yang disebabkan oleh harga komoditi daging sapi dan kerbau (*red meat*) lebih mahal dibandingkan dengan daging unggas (*white meat*); (2). Beralihnya masyarakat mengkonsumsi protein hewani asal ternak ke protein hewani asal ikan sebagai alternatif mengingat komoditi asal ikan lebih kompetitif dan mempunyai keunggulan omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh; (3). Pola konsumsi masyarakat Indonesia dengan meningkatnya kesejahteraan lebih cenderung selektif dalam memilih komoditi yang dikonsumsi.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dalam negeri, diantaranya: (1). Peningkatan angka kelahiran melalui kegiatan Siwab; (2). Penambahan indukan impor; (3). Mengurangi pemotongan betina produktif; (4). Perbaikan genetik untuk meningkatkan produktivitas ternak.

f. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah

Pengembangan ternak perah (sapi perah, kerbau perah, dan kambing perah) diharapkan dapat menumbuhkan unit-unit usaha kecil di daerah yang kekedepannya akan membentuk suatu kawasan yang terdiri dari pengembangan usaha dari hulu, on farm dan hilir. Namun demikian ada beberapa kendala dalam pengembangan populasi dan produktivitas ternak perah di Indonesia, diantaranya :

1. Permasalahan kepemilikan lahan yang sangat terbatas dan kondisi sosial ekonomi yang rendah menyebabkan pengembangan usaha sulit untuk dilaksanakan.
2. Permasalahan orientasi usaha masih bersifat sebagai sampingan dan dikerjakan secara tradisional dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.
3. Masih banyak ditemukan permasalahan lokasi peternakan sapi perah yang berada di daerah sulit air (daerah tadah hujan) sehingga pada musim kemarau mengalami kesulitan air dan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari terpaksa harus membeli.
4. Koperasi peternak sapi perah atau KUD persusuan sebagian besar gagal melakukan pembinaan terhadap peternak menuju konsep kemapanan usaha.
5. Permasalahan bimbingan yang diberikan instansi terkait kepada koperasi/KUD persusuan dan juga kepada peternak sapi perah belum terpadu dan tidak berkesinambungan/berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peternak/kelompok yang melakukan usaha dibidang ternak perah. Selain itu, dilakukan kegiatan penguatan modal usaha melalui pendekatan kelompok atau gabungan kelompok peternak. Hal ini akan mempermudah proses fasilitasi dan akselerasi adopsi kegiatan peningkatan pembibitan dan produksi ternak perah yang mengacu pada *Good Breeding Practice (GBP)* dan *Good Farming Practice (GFP)*. Kegiatan-kegiatan di daerah akan berhasil dan berkesinambungan jika pemerintah daerah juga aktif berperan serta dalam membina dan mendampingi kelompok-kelompok penerima bantuan untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang berskala besar.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah kelompok peternak penerima bantuan pengembangan (1) populasi sapi perah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jawa Tengah;

(2) populasi kambing perah di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali; dan (3) populasi kerbau perah di Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat serta masyarakat sekitar dan Pemerintah daerah setempat. Realisasi anggaran tahun 2019 adalah 5,1 miliar atau 62% dari pagu sebesar 8,3 miliar. Hal ini disebabkan, Bengkulu dan Sumatera Utara masih proses administrasi pengadaan dan distribusi.

g. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak

Kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak pada tahun 2019 dialokasikan untuk mengembangkan ternak babi dan ayam. Kegiatan Pengembangan ternak babi dilaksanakan di Provinsi Bali tepatnya di BPTU-HPT Denpasar dengan target 600 ekor dan Provinsi Papua dengan target 330 ekor. Sedangkan kegiatan Pengembangan ternak ayam dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM), hibah ayam, dan Bantuan Pemerintah (Banper) ayam. Kegiatan KSTM dan hibah ayam dilaksanakan oleh Satker BPTU-HPT Sembawa dengan target KSTM sebanyak 1.000.000 ekor dan hibah ayam dengan target 60.000 ekor. Kegiatan KSTM dilaksanakan di 4 Provinsi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten, sedangkan hibah ayam dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kegiatan Pengembangan ternak ayam lainnya melalui bantuan pemerintah ayam dilaksanakan di Sulawesi Utara dengan target 20.000 ekor.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak

No	Satker Pelaksana	Komoditi	Jumlah Ternak (Ekor)		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
1	BPTU-HPT Denpasar	Babi	600	600	100
2	Provinsi Papua	Babi	330	330	100
3	BPTU-HPT Sembawa (KSTM)	Ayam	1.000.000	408.000	40,8
4	BPTU-HPT Sembawa (Hibah)	Ayam	60.000	60.000	100
5	Provinsi Sulawesi Utara (Banper)	Ayam	20.000	20.000	100
TOTAL			1.080.930	488.930	88,16

3.3.2 Kinerja Fungsi Pakan

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan, dengan hasil kinerja sebagai berikut:

a. Penyediaan Hijauan Pakan Ternak

Kegiatan Hijauan Pakan Ternak pada tahun 2019 terdiri dari kegiatan Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) mendukung SIWAB dan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) di UPT Pusat. Realisasi kegiatan Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) mendukung SIWAB dapat dilihat di dalam pembahasan Kegiatan Utama Ditjen PKH. Sedangkan kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) di UPT Pusat memiliki tujuan kegiatan diantaranya :

1. Tersedianya benih/bibit HPT di UPT untuk pengembangan hijauan pakan di UPT dan masyarakat.
2. Meningkatnya produksi HPT di UPT untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit dan keturunannya secara berkelanjutan.
3. Terwujudnya UPT sebagai *centre of excellence* atau pusat referensi dan pelatihan dibidang pakan hijauan

Fasilitasi pengembangan HPT di UPT Pusat, dialokasikan pada anggaran Kantor Daerah di 10 (sepuluh) BBPTU/BPTU-HPT/BET/BIB untuk pengembangan kebun HPT maupun pastura (padang penggembalaan), dengan target 1.058 Ha dan dapat terealisasi 1.068,03 Ha atau 100,95%. Rincian capaian output untuk masing-masing lokasi Pengembangan HPT di UPT Pusat disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6. Rincian Target dan Realisasi Pengembangan HPT di UPT Tahun 2019

No	UPT	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%
1	BIB Lembang	17	21,03	123,7
2	BET Cipelang	20	20	100
3	BPTU HPT Baturaden	185	185	100
4	BBIB Singosari	48	48	100
5	BPTU HPT Indrapuri	139	139	100
6	BPTU HPT Siborong-Borong	116	116	100
7	BPTU HPT Padang Mangatas	128	128	100
8	BPTU HPT Sembawa	193	193	100
9	BPTU HPT Pelaihari	64	64	100
10	BPTU HPT Denpasar	148	148	100
	Total	1.052	1.068,03	100,95

b. Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan

Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan dilaksanakan di 11 provinsi dan 25 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 13 Unit Pengolah Pakan Unggas dan 20 Unit Pengolah Pakan Ruminansia seperti yang tertera pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Lokasi Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Unit Pengolah Pakan	
			Jenis Pakan	Jumlah
1	Sumatera Utara	Serdang Berdagai	Ruminansia	1
		Kota Binjai	Ruminansia	1
2	Riau	Siak	Ruminansia	1
		Rokan Hulu	Ruminansia	1
3	Lampung	Lampung Selatan	Unggas	3
		Lampung Tengah	Ruminansia	1
		Tulang Bawang	Ruminansia	1
4	Banten	Serang	Unggas	1
		Tangerang	Unggas	1
5	Jawa Barat	Sukabumi	Ruminansia	1
		Cianjur	Ruminansia	1
		Subang	Ruminansia	2
			Unggas	1
		Garut	Ruminansia	1
		Cirebon	Ruminansia	1
6	Jawa Tengah	Klaten	Ruminansia	1
		Kota Salatiga	Ruminansia	1
7	DI Yogyakarta	Bantul	Ruminansia	1
		Sleman	Ruminansia	1
8	Jawa Timur	Lumajang	Unggas	1
		Magetan	Ruminansia	1
		Bojonegoro	Ruminansia	2
9	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Ruminansia	1
10	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Unggas	2
		HSU	Unggas	2
11	Gorontalo	Bone Bolango	Unggas	1
		Gorontalo	Unggas	1
Jumlah				33

Tujuan kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan yaitu untuk:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal
2. Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan dan teknologi pengolahan pakan

3. Meningkatkan kemampuan peternak/kelompok peternak dalam memproduksi pakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan distribusi alat dan mesin (alsin) pengolah pakan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada 33 kelompok UPP. Realisasi pengadaan alsin dan bangunan tercapai 100%, sementara pengadaan bahan pakan sebesar 1.431 ton dari target 1.587 ton atau sebesar 90,17%. Seluruh satker telah memenuhi target pengadaan alsin dan bangunan atau telah mencapai 100 %, namun untuk pengadaan bahan pakan pada Satker Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa mencapai target. Dalam kegiatan tersebut sudah dilakukan upaya pengadaan ulang sebanyak 2 kali tender, akan tetapi proses tidak dapat berlanjut karena jumlah peserta lelang tidak memenuhi persyaratan sehingga oleh POKJA ULP paket dibatalkan. Solusi yang direncanakan oleh Satker Provinsi, akan dialokasikan pengadaan bahan pakan untuk tahun 2020 dengan menggunakan dana dari APBD.

c. Penguatan Pakan Konsentrat di UPT

UPT Pusat (BPTU-HPT/BBIB-BIB/BET) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/OT.140/5/ 2013 Tanggal 24 Mei 2013, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak dan Direktur Pakan. Dengan adanya Permentan tersebut dan adanya alokasi anggaran pakan pada UPT Pusat baik BPTU-HPT maupun BIB (Balai Inseminasi Buatan) dan Balai Embrio Ternak (BET) maka Direktorat Pakan selaku pembina di bidang pakan ternak mempunyai tugas dan kewajiban mendampingi UPT Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pakan sebagaimana ruang lingkup tugas fungsi pakan di BPTU-HPT.

Pemenuhan pakan konsentrat di UPT pusat, dilaksanakan di 10 (sepuluh) UPT Pusat, yang ditujukan untuk meningkatkan performans ternak-ternak di UPT dan menjadikan UPT sebagai *centre of excellence*. Capaian kegiatan pakan konsentrat di 10 UPT dari dua tahun terakhir tersaji dalam Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8. Capaian Kegiatan Pakan Konsentrat di UPT

NO	SATKER	2018		2019	
		FISIK (TON)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (TON)	KEUANGAN (Rp)
1	BIB Lembang	299,00	1.662.911.098	250,00	2.128.899.950
2	BET Cipelang	841,00	3.455.125.800	899,50	3.987.842.815
3	BPTU HPT Baturaden	2.275,00	8.471.963.500	1.798,00	8.698.408.500
4	BBIB Singosari	357,00	2.326.465.000	386,40	2.800.169.000
5	BPTU HPT Indrapuri	544,00	2.635.003.075	557,00	2.938.721.301
6	BPTU HPT Siborong-Borong	324,14	2.452.505.550	397,95	2.816.595.100
7	BPTU HPT Padang Mangatas	440,00	1.928.305.000	392,36	1.958.477.000
8	BPTU HPT Sembawa	1.507,29	6.805.217.060	1.277,00	6.255.316.210
9	BPTU HPT Pelaihari	764,00	4.803.826.500	952,00	7.652.616.090
10	BPTU HPT Denpasar	832,85	4.612.720.000	896,80	4.995.798.750
TOTAL		8.184,28	39.154.042.583	7.807,01	44.232.844.716

Sumber : Direktorat Pakan, 2019

Pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian fisik kegiatan pada tahun 2019 sebesar 7.807,01 ton atau menurun 4,61 % daripada capaian realisasi pada tahun 2018 sebesar 8.184,28 ton, dengan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 44.232.844.716,- lebih besar dari pada tahun 2018 sebesar Rp. 39.154.042.583. Pengadaan konsentrat tahun 2019 di UPT sebagian besar dapat direalisasikan, namun ada 1 UPT yang terkendala realisasi pengadaan pakan kerbau, dari 2 (dua) tahap pengiriman, ada 1 (satu) tahap pengiriman yang tidak dapat direalisasikan karena sudah di akhir tahun anggaran. Saran yang diberikan agar pengadaan pakan dilakukan seawal mungkin dan pengiriman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

d. Mutu dan Keamanan Pakan

Capaian indikator kerja mutu dan keamanan pakan tahun 2019 sebesar 144,74% atau 7.237 sampel dari target 5.000 sampel. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5.680 sampel terjadi peningkatan capaian sebesar 27,41%. Capaian indikator kerja mutu dan keamanan pakan didukung oleh kegiatan : (1) pengujian mutu dan sertifikasi pakan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Bekasi (BPMSP); (2) pengawasan mutu dan keamanan pakan di 24 provinsi dan layanan laboratorium pakan daerah.

1) Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

Capaian kerja output kegiatan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan sebesar 162,86% atau tercapai 4.886 sampel dari target 3.000 sampel. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan dilaksanakan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Bekasi (BPMSP).

Keberhasilan capaian lebih dari **100%** didukung oleh :

- a) Sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya pemakaian pakan/bahan pakan yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas ternak.
- b) Meningkatnya kesadaran *stakeholders* terhadap pentingnya kualitas pakan, utamanya pada produsen pakan skala menengah.
- c) Meningkatnya kesadaran produsen pakan (*feedmills*) terhadap perlunya Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sehingga mendorong pabrik pakan untuk mendaftarkan setiap jenis pakan/merek dagang pakan yang diedarkan.
- d) Diterapkannya kewajiban pengujian mutu dan keamanan pakan dalam proses pelelangan pakan.

2) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan dan Layanan Laboratorium pakan Daerah

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan tahun 2019 dilaksanakan di 24 (dua puluh empat) Provinsi dan 8 (delapan) laboratorium pakan daerah dengan capaian realisasi sebesar 2.351 sampel atau 117,55% dari target 2.000 sampel.

3.3.3 Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi, dengan hasil kinerja sebagai berikut:

a. Pengamatan Dan Identifikasi Penyakit Hewan (Status Kesehatan Hewan)

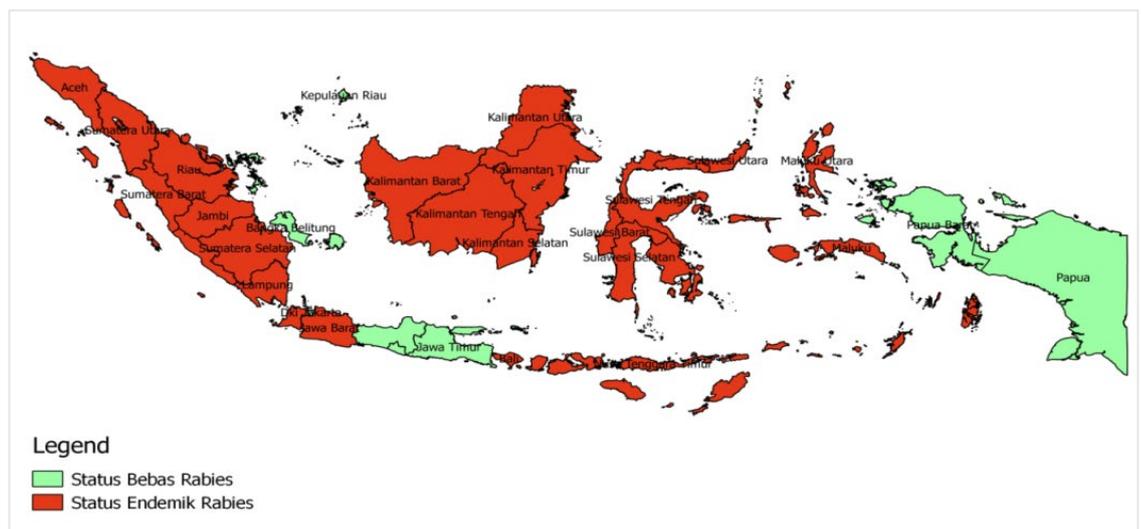
Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, *Avian Influenza* dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH. Tahun 2019 target yang ditetapkan adalah 80% dengan capaian 78,1% yang dihitung secara nasional. Penghitungan dilakukan di 34 provinsi dan 404 Kabupaten/Kota.

Peningkatan status kesehatan hewan dipengaruhi oleh pembebasan wilayah pada tahun 2019 yaitu Pembebasan Rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahapa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kepulauan Sitaro melalui SK Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019 dan Provinsi Papua melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019, dan Pembebasan Brucellosis di Kabupaten Simeulue melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 juli 2019 dan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 juli 2019.

b. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan

1) Rabies

Rabies adalah zoonosis yang menjadi salah satu penyakit yang mendapatkan prioritas di dalam pengendaliannya di Indonesia. Target pembebasan rabies di seluruh Indonesia telah di sinkronkan dengan target yang ditetapkan oleh WHO, FAO dan OIE di tahun 2015 yaitu bebas rabies tahun 2030. Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas rabies yaitu P. Lombok (bebas historis), P. Pisang, P. Meranti, P. Weh, P. Mentawai dan P. Enggano (2015), P. Tarakan, P. Nunukan, P. Sebatik dan Pulau Tabuan (2018).



Gambar 3.19 Peta Status Rabies

Pada tahun 2019, wilayah bebas rabies terdiri dari 8 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat (bebas historis), maupun yang dibebaskan dengan program pemberantasan (DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur). Jumlah provinsi bebas berkurang pada tahun 2019 ini karena telah terjadi wabah rabies di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB (sesuai Keputusan Menteri

Pertanian nomor 223/KPTS/PK320/M/3/2019). Wilayah ini sebelumnya merupakan wilayah bebas rabies. Namun ada wilayah yang baru mendapatkan Kepmentan bebas rabies pada 2019 yaitu Provinsi Papua (bebas historis) serta Pulau makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.

Rabies di Kabupaten Dompu

Penularan rabies di Pulau Sumbawa pertama kali terjadi di Kabupaten Dompu yaitu pada bulan Januari tahun 2019. Berdasarkan data sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan 47,56% sampel anjing positif rabies. Rincian hasil pemeriksaan sampel per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Rincian Hasil Pemeriksaan Sampel di Kab. Dompu

Kecamatan	Jumlah Sampel	Sampel Positif	Sampel Negatif
Kempo	24	6	18
Manggelewa	29	11	18
Woja	12	6	6
Dompu	28	17	11
Hu'u	32	17	15
Pajo	27	17	10
Pekat	7	0	7
Kilo	5	4	1
Total	164	78	86

Sampai saat ini, kasus kematian pada manusia karena rabies (*lyssa*) di Pulau Sumbawa, masih terlokalisasi di wilayah Kabupaten Dompu, yaitu sebanyak 11 kasus. Kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah, yaitu kecamatan Kempo, Manggalewa, Hu'u, Woja, dan Pekat. Pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan di wilayah Kabupaten Dompu dengan cakupan sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar 46,5% dari populasi anjing sekitar 27.727 ekor.

Rabies di Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sumbawa dimulai pada bulan Februari tahun 2019 yang dilakukan setelah terjadi kasus gigitan anjing pada bulan tersebut. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, cakupan vaksinasi masih rendah yaitu sebesar 21,8% dari populasi anjing sekitar 26 ribu ekor. Tercatat sebanyak 38 desa atau sekitar 26,5% desa tertular rabies, dari 143 desa yang ada di wilayah

Kabupaten Sumbawa. Desa-desa tertular rabies tersebut berada di wilayah Kecamatan Empang dan Tarano. Sedangkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 118 sampel yang diperiksa, menunjukkan hasil 32 % positif rabies.

Rabies di Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil surveilans menunjukkan bahwa awal kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) terjadi pada bulan Maret tahun 2019, dan hingga saat ini belum ditemukan sampel positif rabies dari kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) tersebut. Sementara itu selama pelaksanaan vaksinasi yang juga dimulai pada bulan Maret tahun 2019, tercatat cakupan vaksinasi masih rendah yaitu sebesar 27,8% dari total estimasi populasi anjing di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 7.743 ekor.

Rabies di Kabupaten Bima

Kasus awal rabies terjadi pada bulan Juni tahun 2019. Selama kurun waktu 3 bulan (bulan Juni – Agustus), tercatat 279 kasus gigitan HPR yang terjadi di Kabupaten Bima, dimana tercatat 20 sampel menunjukkan hasil positif rabies. Kasus positif tersebut terjadi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Madapangga, Sanggar, dan Bolo. Sedangkan hasil pelaksanaan vaksinasi menunjukkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Bima sebesar 32% dari 18.506 ekor.

Situasi rabies selama tahun 2019 yaitu ditemukannya kasus positif rabies di beberapa wilayah endemis seperti Kalimantan Selatan, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, dan Kalimantan Barat. Sebagai langkah penanggulangan dari wabah rabies tersebut, Ditjen PKH melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan investigasi kasus rabies
- b) Pemberian bantuan vaksin rabies, operasional serta peralatan pendukung lain
- c) Pelaksanaan pelatihan penanggulangan rabies bagi petugas vaksinator
- d) Pelaksanaan pelatihan penghitungan populasi anjing.

Tabel 3.10. Alokasi Vaksin Rabies di Indonesia Tahun 2019

No	Provinsi	Volume (Dosis)
1	Aceh	10.000
2	Sumatera Utara	30.000
3	Sumatera Barat	35.000
4	Riau	20.000

5	Jambi	10.000
6	Sumatera Selatan	10.000
7	Lampung	20.000
8	Bengkulu	15.000
9	Bangka Belitung	2.500
10	Banten	1.000
11	DKI Jakarta	5.000
12	Jawa Barat	30.000
13	Jawa Tengah	4.800
14	D.I Yogyakarta	1.500
15	Kalimantan Barat	50.000
16	Kalimantan Tengah	10.000
17	Kalimantan Selatan	20.000
18	Kalimantan Timur	15.000
19	Kalimantan Utara	2.000
20	Sulawesi Utara	20.000
21	Sulawesi Tengah	15.000
22	Sulawesi Selatan	20.000
23	Sulawesi Tenggara	15.000
24	Sulawesi Barat	10.000
25	Gorontalo	10.000
26	Bali	550.000
27	Nusa Tenggara Barat	1.000
28	Nusa Tenggara Timur	80.000
29	Maluku	25.000
30	Maluku Utara	10.000
	Total	1.047.800

Untuk memperluas wilayah bebas dalam mencapai target tersebut, salah satu yang dilakukan adalah dengan penyediaan vaksin melalui dana TP yang dialokasikan ke beberapa wilayah di Indonesia seperti yang tercantum dalam Tabel 3.11. Ditjen PKH juga memiliki stok pusat sebanyak 42.040 dosis yang akan digunakan jika terjadi wabah rabies.

Alokasi vaksin, tidak hanya diberikan pada wilayah endemis, namun juga diberikan ke wilayah yang bebas rabies sebagai upaya pencegahan masuknya rabies di wilayah tersebut. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga melalui surveilans yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner di masing-masing wilayah kerja.

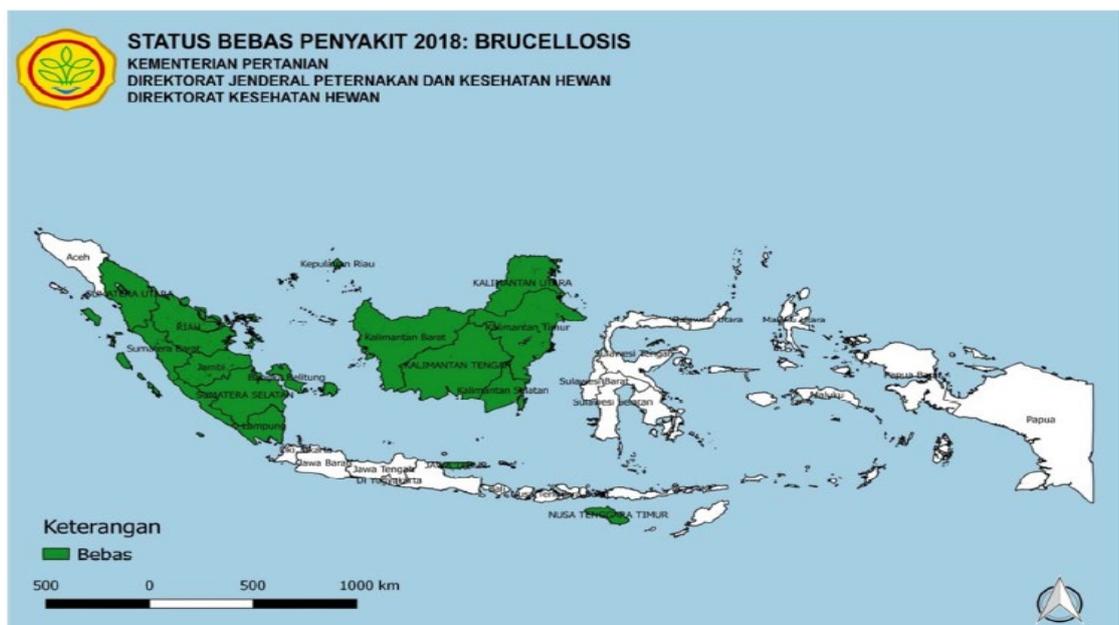
2) Avian Influenza

Perkembangan kasus pada unggas selama tahun 2019 terkait dengan pengendalian penyakit Avian Influenza diantaranya sebagai berikut:

- a) Provinsi yang bebas HPAI berdasarkan SK Menteri sebanyak 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara
- b) Total wilayah yang bebas HPAI sebanyak 50 kabupaten/kota. Untuk wilayah lain yang ditargetkan, saat ini masih dalam proses surveilans pembebasan yang dilaksanakan oleh BBVet dan BVet
- c) Kompartemen bebas AI selama tahun 2019 tercatat sebanyak 87 unit
- d) Alokasi vaksin AI sebanyak 1.750.000 dosis di 6 wilayah risiko tinggi selain 1.565.000 dosis yang disediakan sebagai stok pusat apabila terjadi wabah atau kekurangan vaksin
- e) Surveilans yang dilakukan oleh Balai Veteriner selama tahun 2019 dilakukan sebanyak 62.308 sampel.

3) Brucellosis

Brucellosis atau penyakit keluron merupakan salah satu tantangan yang ada dalam upaya peningkatan populasi ternak di Indonesia. Target bebas brucellosis yang ditetapkan di Indonesia adalah tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis yang telah disusun oleh Direktorat Kesehatan Hewan.



Gambar 3.20 Peta Status Brocellosis Tahun 2019

Pada saat ini, wilayah yang telah berhasil dibebaskan antara lain Provinsi Bali dan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002), Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (2006), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (2009), Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu (2011), Pulau Sumba Provinsi NTT dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur (2015), Provinsi Sumatera Utara (2016).

Wilayah bebas brucellosis yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/PK.320/M/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan Pulau Simeulue, Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/PK.320/M/07/2019 tanggal 17 Juli 2019. Maka dari itu, total Provinsi yang bebas Brucellosis hingga tahun 2019 adalah 17 Provinsi (222 kabupaten/kota) dan 3 pulau dan 1 unit kompartemen.

Kegiatan pengendalian Brucellosis yang dilakukan antara lain alokasi vaksin Brucellosis sebanyak 45.650 dosis pada 6 Provinsi. Sedangkan untuk stok di pusat, dilakukan pengadaan vaksin brucella sebanyak 18.000 dosis. Untuk surveilans yang dilakukan, telah dialokasikan sebanyak 30.789 sampel.

Rencana selanjutnya dalam mencapai target bebas Brucellosis tahun 2025 antara lain:

- a) Surveilans di wilayah bebas untuk memastikan tidak ditemukannya agen penyakit, serta di wilayah endemis untuk mengukur prevalensi
- b) Melanjutkan program bebas brucellosis Pulau Jawa
- c) Menindaklanjuti surveilans di UPT perbibitan untuk dapat menetapkan status brucellosis.

4) Anthrax

Anthrax adalah penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Upaya yang dapat dilakukan adalah tindakan pengendalian serta mencegah meluasnya kejadian atau kasus penyakit ke wilayah lain. Langkah pengendalian

yang dilaksanakan antara lain dengan vaksinasi, surveilans dan pengawasan lalu lintas antar daerah.

Pada Tahun 2019, kasus positif anthrax ditemukan di wilayah yang memang berstatus endemis yaitu Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Hewan antara lain investigasi kasus, advokasi serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok ternak di wilayah tersebut.

5) Hog Cholera

Pengendalian dan penanggulangan hog cholera yang dilaksanakan adalah vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Diharapkan untuk Provinsi yang memiliki populasi ternak babi tinggi agar lebih memperhatikan dan memprioritaskan dalam penganggaran untuk pengendalian dan pemberantasannya, karena sebenarnya ternak ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan peluang untuk di ekspor. Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hog cholera telah dilakukan rapat tentang rencana pembebasan hog cholera provinsi Sulawesi Utara. Hingga saat ini, wilayah yang bebas Hog Cholera sebanyak 19 kabupaten/kota (Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014).

Pada tahun 2017 dan 2018 Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan vaksinasi secara massal. Pada tahun 2017 lalu melalui Balai Besar Veteriner Maros telah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 150.000 dosis. Sedangkan pada tahun 2018 telah dilakukan vaksinasi sebanyak 45.000 dosis dari anggaran TP dan 30.000 dosis alokasi dari pusat. Pada tahun 2019 dilakukan alokasi vaksin hog cholera ke wilayah Sulawesi Utara sebesar 45.000 dosis dan Papua sebesar 5.000 dosis. Sedangkan stok pusat yang disediakan sebanyak 43.000 dosis.

6) African Swine Fever

Penyakit yang menyerang babi adan babi hutan ini tidak bersifat zoonosis dan sedang mewabah di berbagai Negara seperti Cina, Vietnam, Korea Utar, Korea Selatan, Philipina, Timor Leste dan telah diindikasikan menjadi ancaman bagi Indonesia. Kerugian ekonomi yang sangat tinggi merupakan dampak nyata dari penyakit ini. Pada bulan September 2019, dilaporkan kematian babi di Kabupaten Dairi dan Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Direktur Kesehatan Hewan segera menurunkan tim untuk investigasi kasus dari Direktorat Kesehatan Hewan dan Balai Veteriner Medan.

Diambil sampel untuk diuji oleh Balai Veteriner Medan. Berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Veteriner Medan Medan, Nomor: 4023/PK.310/F.4.1/10/2019 tgl 7 Oktober 2019, dengan hasil: Diagnosa gejala klinis mengarah penyakit Hog Cholera (Clasical Swine Fever) dan ASF (African Swine Fever).

Mengingat kematian semakin meningkat dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan semakin tinggi, dilakukan pelaporan kejadian penyakit oleh Bupati Dairi dan Humbang Hasundutan yang ditindak lanjuti dengan Surat Permintaan dari Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 November 2019 agar Provinsi Sumatera Utara dapat dinyatakan sebagai daerah wabah Hog Cholera dan indikasi ASF. Dalam periode September – Desember 2019 terjadi kematian yang sangat tinggi sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 3.11. Jumlah Kematian Ternak Babi di Sumatera Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Populasi (ekor)	Kec. Tertular	Desa Tertular	Jumlah Kematian
1	Dairi	10.965	14	62	4.095
2	Humbang Hasundutan	47.663	10	51	1.168
3	Deli Serdang	57.361	7	13	6.997
4	Medan	7.221	1	1	50
5	Karo	26.449	10	29	1.779
6	Toba Samosir	51.125	8	63	2.401
7	Serdang Bedagai	31.756	6	14	1.364
8	Tapanuli Utara	70.500	14	82	2.936
9	Tapanuli Tengah	75.505	4	5	20
10	Tapanuli Selatan	800	4	14	1.382
11	Samosir	25.007	3	10	101
12	Simalungun	109.176	4	6	236
13	Pak Pak Barat	6.803	5	11	385
14	Tebing Tinggi	1.520	3	6	42
15	Siantar	1.800	2	2	12
16	Langkat	29.958	1	2	43
	Jumlah	653.609	96	371	23.011

Adapun kronologis kejadian sebagaimana berikut:



Gambar 3.21 Kronologi Kematian Ternak Babi di Sumatera Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, telah dinyatakan wabah ASF di 16 Kabupaten/Kota diantaranya: Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Barat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Medan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengendalian penyakit ASF di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

- a. Peningkatan kewaspadaan terhadap masuknya penyakit ASF (Surat Edaran Dirjen PKH ke Dinas dan Kepala Daerah se-Indonesia, pemasangan *banner* dan spanduk peringatan tentang bahaya penyakit ASF yang dapat terbawa dari negara / wilayah tertular.
- b. Sosialisasi ke dinas, peternak, serta asosiasi peternak tentang bahaya dan pencegahan masuknya penyakit ASF.
- c. Peningkatan kemampuan pengujian dan investigasi terhadap ASF oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) dan Balai Veteriner (BVet) se-Indonesia.
- d. Pelaksanaan Surveilans dan Investigasi oleh Tim gabungan Ditjen PKH, Bvet Medan dan Dinas PKH Propinsi dan Dinas PKH Kabupaten (respon terhadap laporan adanya kematian ternak babi di Sumatera Utara)

- e. Pemberian bantuan berupa alat pelindung diri (APD), desinfektan, obat-obatan serta keperluan penunjang lain oleh Direktorat Jenderal PKH.
- f. Rapat koordinasi dan advokasi terkait penanganan kasus kematian babi di Provinsi Sumatera Utara
- g. Evakuasi dan Disposal Bangkai babi yang dibuang ke sungai bersama Tim Gabungan Lintas OPD di Provinsi Sumut melakukan
- h. Pembentukan posko pengendalian ASF

Mengingat adanya wabah ASF di berbagai negara termasuk di Sumatera Utara, dilakukan peningkatan surveilans terkait ternak babi di Indonesia. Selain di Provinsi Sumatera Utara, dari hasil surveilans ditemukan peningkatan kematian babi di beberapa wilayah Indonesia antara lain Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

c. Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan

Dalam rangka dukungan terhadap nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional dilakukan melalui kegiatan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target tahun 2019 sebanyak 1.908 sampel. Target tersebut merupakan target gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi obat hewan dan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan.

Rincian realisasi tersebut terdiri atas kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan sebanyak 877 sampel, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan sebanyak 985 sampel, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan sebanyak 46 sampel. Total jumlah sampel yang tercapai pada tahun 2019 sebanyak 1.908 sampel.

Rincian realisasi indikator kinerja Tahun 2019 tersebut dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu
 - a) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) dengan disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses

untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal).

- b) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengujian obat hewan sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (*on the spot*) ke perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel, kemudian pengujian obat tersebut dilakukan di BBPMSOH untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, Bab. III, Bagian kedua, Pasal 22 sampai dengan 25 mengenai pengujian sewaktu-waktu yang dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran. Sampel obat hewan yang diambil adalah sampel yang sudah mempunyai nomor registrasi, atau berdasarkan data sampel yang masuk 3 tahun terakhir.
- c) Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui rnutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman dinas dan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dari masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah sampel tersebut memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak.

2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan

Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pelaksanaan kegiatan pemantauan vaksin di lapangan ini dimaksudkan untuk:

- a. Melindungi konsumen dari pemakaian vaksin yang tidak bermutu;
- b. Mempertahankan mutu vaksin di lapangan;
- c. Mengetahui faktor penurunan mutu vaksin, yang disebabkan berbagai faktor seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ Importir/ distributor/ pengecer/ depo obat peternak dokter hewan praktek).

Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.908 sampel (118,5%) dari target 1.610 sampel.

d. Obat Hewan dan Bahan Biologik

Pada tahun 2019, produksi vaksin sesuai dengan vaksin/antigen yang telah ditargetkan, diantaranya produksi vaksin Rabivet, Anthravit, Afluvet, Antigen AI, Antigen Brucella RBT, Kit Elisa Rabies, Septivet, JD Vet, Komavet, Lentovet, Antigen ND, Antigen Pullorum, Antigen Mycoplasma, dan Kit Elisa Jembrana.

Tabel 3.12. Realisasi Kegiatan Produksi Tahun 2015-2019

No	Jenis Produk	Realisasi (Dosis)				
	Vaksin	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anthravit	714.000	600.000	833.600	532.600	539.200
2	Afluvet	1.000.000	-	-	-	1.668.500
3	Brucivet	1.000	700	68.990	45.000	53.000
4	Hogsivet	-	-	-	-	-
5	Komavet	-	1.000.000	1.000.000	2.000.000	590.000
6	Lentovet	-	800.000	800.000	-	402.000
7	Neo Rabivet	-	-	-	-	106.800
8	Rabivet	708.900	360.000	-	60.000	124.250
9	Septivet	1.233.700	2.314.200	-	456.600	1.170.200
10	JD-Vet	150.650	128.300	141.600	184.500	242.400
11	Antigen AI	640.000	875.000	500.000	500.000	1.114.500
12	Antigen Brucella RBT	783.000	750.000	480.000	660.000	603.000

13	Antigen Mycoplasma	60.000	80.000	10.000	20.000	52.000
14	Antigen ND	2.500.000	750.000	250.000	1.000.000	375.000
15	Antigen Pullorum	600.000	600.000	100.000	500.000	503.000
16	Kit ELISA Jembrana	-	25	-	-	-
17	Kit ELISA Rabies	200	375	200	250	250
Total		8.391.450	8.258.600	4.076.590	6.393.600	7.544.100

Secara umum realisasi produksi 2019 melebihi target, dengan rincian realisasi produksi vaksin dan antigen 139,26 %, realisasi produksi Kit Elisa Rabies 100%. Proses produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas bahan baku, prosesing, kemasan dan penunjang produksi secara lengkap jenis dan volumenya di awal produksi.

e. Kelembagaan Veteriner

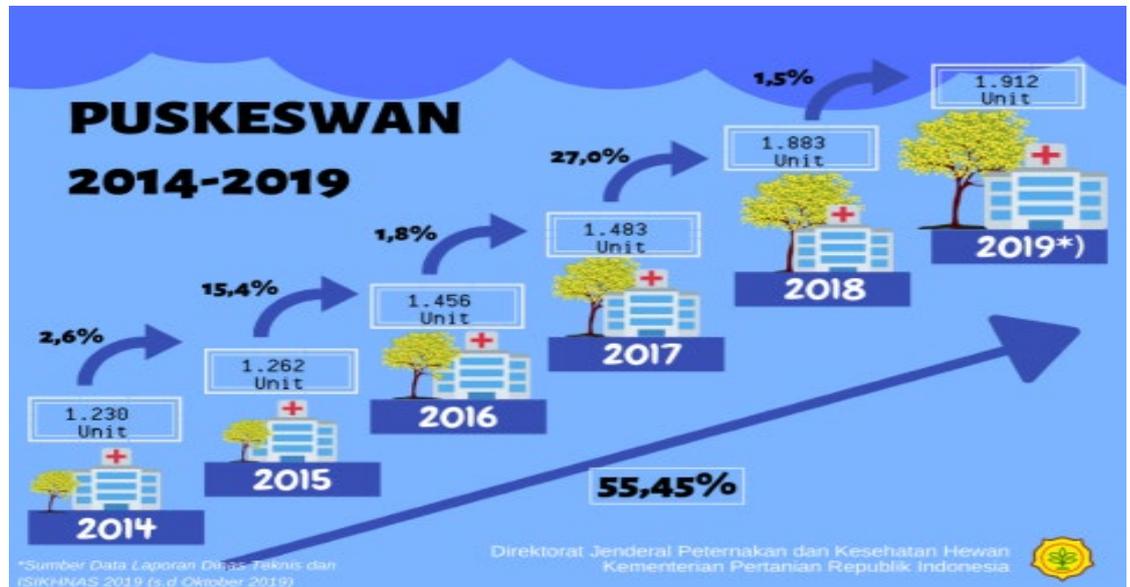
Dalam penguatan sistem kesehatan hewan nasional, kelembagaan dan infrastruktur menjadi salah satu instrumen mayor yang harus dimiliki oleh setiap instansi. Kegiatan dalam kelembagaan veteriner yang dilaksanakan oleh UPT Pusat (BBVet dan BVet) pada tahun 2019 antara lain :

1. Pembinaan dan koordinasi kesehatan hewan;
2. Sistem kesehatan hewan nasional;
3. Pengadaan dan pemeliharaan sarpras gedung, Lab Pengujian dan produksi;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia veteriner;
5. Tenaga harian lepas kesehatan hewan;
6. Pendampingan dan pengawalan UPSUS SIWAB;
7. Surveilans ISO 17025;

Dengan anggaran kegiatan yang ada regular setiap tahunnya maka kinerja UPT Pusat dapat terukur dalam melakukan pelayanan medik veteriner yang prima kepada masyarakat serta akan menghasilkan output yang optimal bagi kelembagaan veteriner itu sendiri.

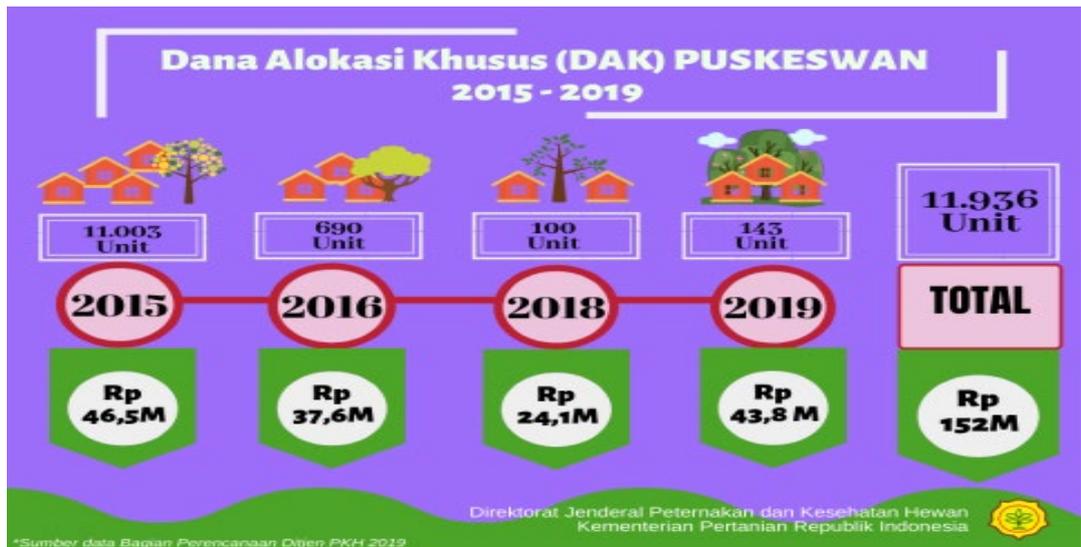
Penguatan kelembagaan veteriner di daerah terpusat di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Puskeswan merupakan pelaksana pelayanan kesehatan hewan di tingkat lapangan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa tindakan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik. Fasilitas dan

pengembangan Puskesmas sebagai unit terkecil pelayanan kesehatan hewan terus dilakukan, jumlah pembangunan Puskesmas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dari segi jumlah maupun sebaran wilayah pelayanan baik melalui dana APBN maupun APBD, jumlah Puskesmas saat ini 1.912 unit Puskesmas (Grafik 3.11)



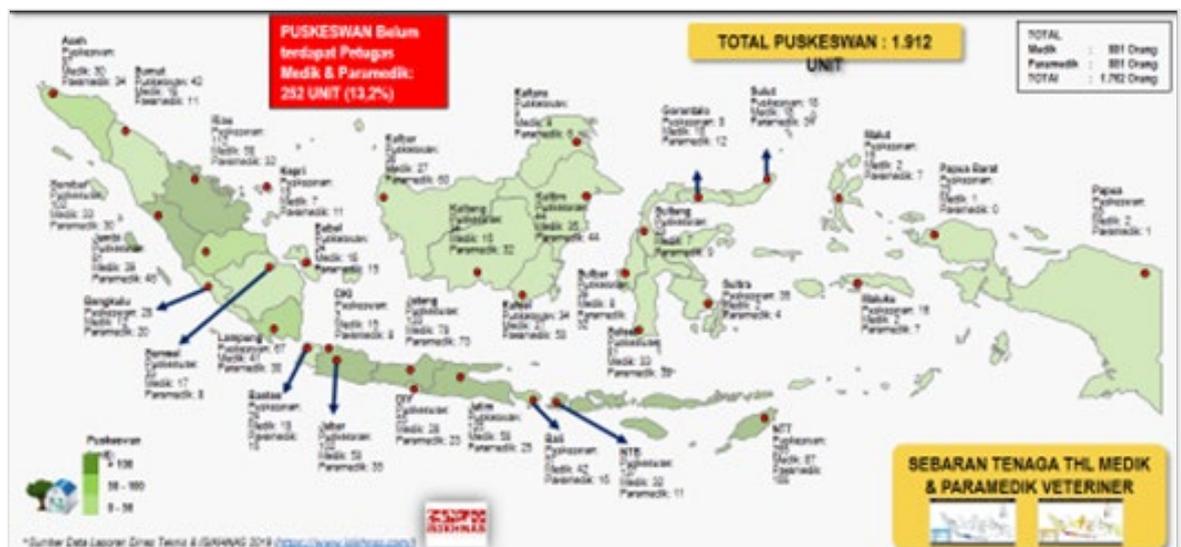
Grafik 3.11 Peningkatan Jumlah Puskesmas Tahun 2014-2019

Pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan hewan lingkup kabupaten/kota bertumpu pada Puskesmas dengan tenaga kesehatan hewan dan sarana prasarana penunjangnya. Keterbatasan tenaga kesehatan hewan dan masih kurangnya fasilitas dari daerah terkait sarana prasarana kesehatan hewan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Untuk itu Pusat menyediakan Dana Alokasi Khusus untuk memfasilitasi Puskesmas melalui dana DAK dari tahun 2015 – 2018 dengan total anggaran 152 milyar rupiah untuk 11.936 unit. Pada tahun 2019 dialokasikan sebanyak 143 unit/paket dengan total anggaran 43,8 milyar berupa pembangunan, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana Puskesmas.



Grafik 3.12 DAK Puskesmas Tahun 2015-2019

Kelembagaan veteriner pun didukung oleh Unit Pelayanan Kesehatan Hewan (UPKH) lainnya seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan dan Laboratorium Veteriner. Sinergitas pelayanan Veteriner akan optimal jika parameter penguatan kelembagaan dan sumber daya veteriner terpenuhi, seperti pemenuhan persyaratan gedung dan fasilitas serta sumber daya lainnya baik manusia ataupun anggaran teralokasikan sesuai dengan fungsi kelembagaan veteriner tersebut. Sebarab Puskesmas di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.20.



Gambar 3.22 Peta Sebaran Puskesmas Tahun 2019

Selain itu, perkembangan situasi dan kondisi kesehatan hewan di lapangan menuntut tersedianya sumber daya kesehatan hewan dengan kuantitas dan kualitas yang optimal. Kondisi saat ini terkait petugas pelaksana pelayanan keswan di seluruh wilayah Indonesia belum mencukupi, rekrutmen THL sebagai salah satu terobosan

untuk mengatasi permasalahan tersebut terus dilaksanakan dari tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tahun 2019 jumlah rekrutmen Tenaga Harian Lepas sebanyak 1.026 orang, terdiri dari 612 dokter hewan dan 486 paramedik veteriner. Dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah dokter hewan dari tahun sebelumnya yaitu 605 dokter hewan menjadi 612 Dokter, dan Paramedik hewan dengan sebaran pada tahun sebelumnya hanya di 33 Provinsi tahun 2018 telah mencakup 34 Provinsi. Tenaga Harian Lepas dalam tugas dan fungsinya sebagai tenaga pelayanan kesehatan hewan sampai dengan saat ini telah memfasilitasi 858 Puskesmas (57,8%) dari total 1.483 Puskesmas di seluruh Indonesia. Penempatan THL Dokter Hewan pada tahun 2018 sebanyak 90,9% di Puskesmas, sedangkan THL Paramedik Veteriner sebanyak 92,7% di Puskesmas.

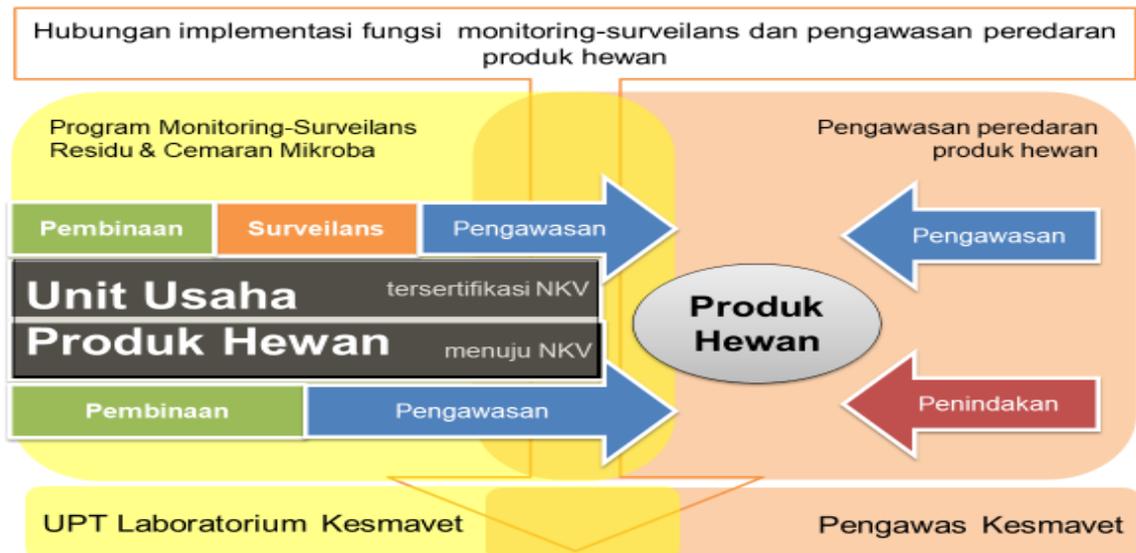
3.3.4 Kinerja Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Yang ASUH

Jumlah realisasi pembinaan NKV unit usaha produk hewan pada 23 provinsi sebanyak 191 unit usaha (sertifikasi NKV), terjadi peningkatan sebanyak 141,49% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan capaian sertifikasi NKV diluar target yang bersumber dana APBD sebanyak 242 unit usaha sehingga total sertifikasi NKV Nasional pada tahun 2019 sebanyak 2453 unit usaha dari data tahun 2018 yaitu 2020 unit usaha, ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 121,43% dari tahun 2018.

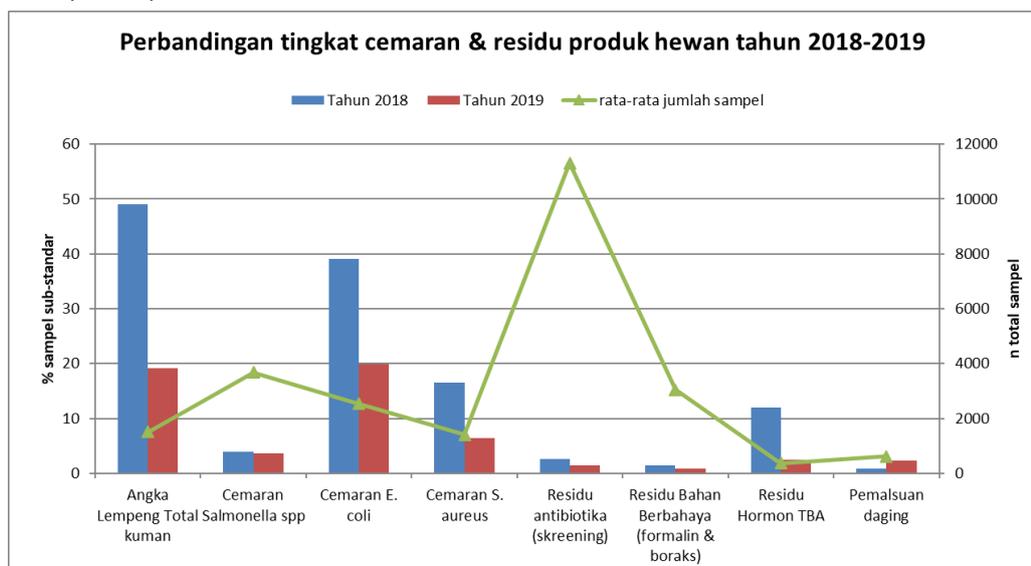
b. Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk

Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan jumlah produk hewan (jumlah sampel produk hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan, dengan target sampel tahun 2019 sebanyak 25.821 sampel. Pengkoleksian dan pengujian sampel dilakukan oleh 9 UPTP meliputi BPMSPH, BBVET Wates, BBVET Denpasar, BBVET Maros, BVET Medan, BVET Bukititnggi, BVET Lampung, BVET Subang dan BVET Banjarbaru serta 23 Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Adapun Realisasi sampel tahun 2019 adalah 30.745 sampel (119,07%) dari target 25.821 sampel yang telah dikoleksi dan diuji oleh UPT dan 23 Provinsi.



Gambar 3.21 Hubungan Implementasi Fungsi Monitoring-Surveilans dan Pengawasan Peredaran Produk Hewan pada Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Hewan

Selain itu fungsi Kesmavet juga melakukan pengujian sampel untuk mengetahui tingkat cemaran residu dan produk hewan. Dari total sampel produk hewan yang dikoleksi, sampel produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan sebanyak 80,8%. Tren persentase sampel yang tidak memenuhi syarat pada umumnya mengalami penurunan untuk semua parameter, kecuali pemalsuan daging yang meningkat menjadi 2,4% dibanding tahun sebelumnya (0,9%).



Grafik 3.12 Perbandingan Tingkat Cemaran dan Residu Tahun 2018-2019

c. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara Nasional pada periode Januari sampai Desember 2019 sebanyak 9.741 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 57,79% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2017. Laporan pemotongan betina produktif tersebut berdasarkan data iSIKHNAS, dengan rata-rata partisipasi kabupaten/kota yang melaporkan sebanyak 368 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia (71,68%) pada Tahun 2019.

Keberhasilan menurunkan pemotongan betina produktif menunjukkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Dinas, kepolisian dan pihak lain yang terlibat dalam pengawasan pelarangan pemotongan betina produktif. Dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan penolakan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan. Berdasarkan data iSIKHNAS, penolakan pemotongan betina produktif di RPH sejak bulan Januari sampai dengan Desember di 34 Provinsi target sebanyak 4.976 ekor dengan alasan penolakan bunting dan masih produktif.

Keberhasilan penurunan pemotongan sapi betina produktif ini karena adanya pengawasan yang dilakukan dengan membentuk tim terpadu pengendalian pemotongan betina produktif tingkat provinsi yang melibatkan unsur Polda, Polres, Bhabinkamtibmas, Dinas Prov dan Dinas Kab/Kota pada lokasi target dan non target. Tim Terpadu Kabupaten/kota beranggotakan unsur dinas (Petugas Dinas), Polresta, RPH, Check Point, Puskesmas dan Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dalam bentuk Sidak (inspeksi mendadak) yang frekuensinya disesuaikan dengan alokasi anggaran. Seluruh provinsi target telah membentuk Tim Pengawasan Terpadu bersama Kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas ataupun Kepala daerah. Seluruh Provinsi melakukan pengawasan dengan frekuensi sesuai ketersediaan anggaran. Untuk lokasi target, pengawasan oleh tim terpadu dilakukan minimal satu kali selama setahun sedangkan pengawasan rutin dilakukan oleh Bhabinkamtibmas setempat.

Provinsi Bengkulu, Bali, Sulawesi tenggara dan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat melakukan pengawasan tidak hanya

dilokasi kabupaten/kota target tapi juga di lokasi non target dengan pertimbangan resiko pindahnya pemotongan dari lokasi target ke non target apabila pengawasan hanya terfokus ke lokasi target.

3.3.5 Kinerja Fungsi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan

1. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

a. Pengembangan Usaha dan Investasi

Koordinasi dan pembinaan asuransi ternak dilakukan untuk menjamin keberlanjutan usaha terutama dalam mitigasi resiko kematian karena penyakit, beranak dan kecelakaan serta kehilangan ternak, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran bantuan premi untuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) di Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) mulai tahun 2016 dengan beban premi sebesar 2% dari harga pertanggungansan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10 juta/ekor, dan pembebanan pembayaran premi sebesar 80% oleh pemerintah (sisanya sebesar 20% ditanggung peternak).

Pada tahun 2019, kegiatan koordinasi dan pembinaan AUTSK tahun 2019 dialokasikan pada OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di 13 provinsi, yaitu Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kaltim dan Sulsel. Hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan AUTS mulai dari sosialisasi, koordinasi dengan pihak perusahaan asuransi dan pendampingan jika terjadi klaim oleh pemegang polis. Realisasi fasilitasi AUTSK tahun 2019 di 13 provinsi sentra ternak sapi yang dialokasikan dana dekon adalah sebesar 111.064 ekor sementara realisasi dari Provinsi lain (yang tidak dialokasikan anggaran) sebanyak 15 Provinsi adalah sebesar 19.531 ekor. Total realisasi AUTS tahun 2019 berdasarkan DPD yang di upload di aplikasi SIAP sebanyak 140.190 ekor.

b. Pengembangan Investasi

Investasi bidang peternakan sangat diperlukan dalam pembangunan peternakan. Dalam hal ini diperlukan dalam hal pembiayaan pembangunan peternakan dengan menggunakan anggaran APBN yang minimalis. Jadi diperlukan upaya dari pemerintah untuk memberikan reward dan fasilitasi terhadap para investor agar menanamkan investasinya pada bidang peternakan. Beberapa fasilitas yang sudah disediakan adalah fasilitasi *tax allowance* atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan, melalui

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2019, dengan cakupan produk usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah serta pembiakan sapi potong dan budidaya sapi perah. Direktorat Jenderal PKH telah menyusun draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (*tax allowance*). Dalam pelaksanaan PP *tax allowance* diperlukan pedoman pelaksanaan dalam hal ini Permentan tentang *tax allowance*. Selain PP *tax allowance* dukungan lain bagi investor adalah kemudahan perizinan melalui OSS.

Secara kumulatif nilai investasi periode 2016-2019 mengalami peningkatan, walaupun apabila dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada periode tahun tersebut, nilai investasi sub sektor peternakan dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan 54,04%, sedangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 42,30%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada PMA usaha peternakan sapi dan kerbau, unggas, dan kambing domba; serta pada PMDN usaha peternakan sapi dan kerbau, serta unggas. Secara rinci nilai investasi Sub Sektor Peternakan dari PMA dan PMDN dapat dilihat pada tabel - tabel berikut :

Tabel 3.13. Nilai Investasi PMA Sub Sektor Peternakan Tahun 2016-2019

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi (Rp. Juta)				Pertumbuhan (%) 2016 s.d 2018
		2016	2017	2018	2019*)	
1	Peternakan Sapi dan Kerbau	260,609.3	34,449.8	637,191.7	153,470.1	831%
2	Peternakan Babi	6,547.5	2,822.0	-	-	-78%
3	Peternakan Unggas	407,412.6	2,045,273.6	955,163.7	301,786.2	174%
4	Peternakan domba dan kambing	6,547.5	142.0	50.0	-	-81%
5	Jasa penunjang	4,008.9	49,043.1	2,720.5	-	514%
Total		685,125.9	2,131,730.6	1,595,125.8	455,256.3	93%

*) Triwulan ke 3 Tahun 2019

Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH tahun 2019

Tabel 3.14. Nilai Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2016-2019

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi (Rp. Juta)				Pertumbuhan (%) 2016 s.d 2018
		2016	2017	2018	2019*)	
1	Peternakan Sapi dan Kerbau	28,978.8	76,131.4	123,929.4	144,183.3	113%
2	Peternakan Babi	-	97,317.5	26,000.0	-	13%
3	Peternakan Unggas	438,570.5	669,262.3	651,010.6	473,891.2	25%
4	Peternakan domba dan kambing	-	-	-	1,980.7	-
5	Jasa penunjang	475.0	225.0	65,523.7	-	14,485%
Total		466,024.3	842,936.2	866,463.6	620,055.2	42%

*) Triwulan ke 3 Tahun 2019

Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH tahun 2019

Beberapa kegiatan investasi yang dihasilkan adalah :

- 1) Tersusunnya bahan kebijakan terkait pendaftaran dan perizinan usaha peternakan. Bahan ini telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai bagian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.
- 2) Terfinalisasinya bahan revisi Keputusan Menteri Pertanian No. 404 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Revisi ini dilakukan karena Kepmentan ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Tujuan dan kegunaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan adalah: a) Tersedianya peraturan yang mengatur seluruh kegiatan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan; b) Memberikan kepastian usaha bagi perorangan warga negara Indonesia, peternak, perusahaan, atau badan hukum dalam melakukan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 3) Dengan terbitnya Permentan tentang perizinan berusaha pertanian membuat usulan revisi permentan 404 tahun 2002 sudah tidak relevan lagi, akan tetapi yang sangat dibutuhkan

adalah permentan tentang skala usaha bagi pelaku usaha peternakan.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dimana bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, yaitu Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor, dan usaha pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya. Terkait peraturan presiden ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyampaikan usulan:
 - a. Untuk bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Kemitraan adalah:
 - ✓ Budidaya babi dengan skala ≤ 10.000 ekor
 - ✓ Budidaya ayam potong dan petelur lokal
 - b. Untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah
 - ✓ Budidaya pembibitan ayam lokal
 - ✓ Budidaya Pembibitan GPS dan PS broiler dan layer
 - ✓ Budidaya ayam ras petelur FS
 - ✓ Budidaya ayam ras pedaging FS
 - ✓ Budidaya babi dengan skala ≥ 10.000
 - c. Asuransi Usaha Ternak Sapi dan kerbau sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggungungan untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya.
 - d. Pada aspek pembiayaan, koordinasi intensif terutama dengan Kedeputusan Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka peningkatan realisasi KUR dan perolehan data realisasi KUR dari SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan masih terus dilakukan. Pada tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp 140 triliun. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kredit/pembiayaan kepada UMKM khususnya di sektor produksi, Komite Kebijakan telah menetapkan porsi minimum penyaluran KUR di sektor produksi yaitu sebesar 60%. Usaha bidang peternakan merupakan salah satu sektor produksi yang cukup diberikan perhatian

khususnya sektor peternakan sapi dengan adanya KUR Khusus. Setidaknya sudah tiga kali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan launching KUR Khusus Peternakan Rakyat yaitu pada tahun 2018 di Wonogiri, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur serta pada tahun 2019 di Banjar, Kalimantan Selatan. Berdasarkan SIKP Kementerian Keuangan, pada periode tahun 2015 - 2019, realisasi akad kredit KUR sektor peternakan sebesar Rp. 17,07 triliun untuk usaha produktif pembibitan dan budidaya sapi, ternak perah, kambing/domba, unggas, dan kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan.

- e. Direktorat Jenderal PKH pada tahun 2019 masih terus bersinergi dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program kemitraan bina lingkungan (PKBL) BUMN. Kredit PKBL merupakan program perusahaan BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro/kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yang diberikan dalam bentuk dana pinjaman dengan jasa administrasi pinjaman ditetapkan sebesar 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. PKBL dipandang lebih cocok untuk usaha bidang peternakan akan tetapi pemanfaatan di bidang usaha peternakan masih belum optimal. Langkah lebih lanjut yang diperlukan adalah koordinasi lebih intensif dengan BUMN terutama yang memiliki plafon PKBL. Pada tahun 2019 telah dilakukan kerjasama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan (PK BUMN) sebesar Rp. 5,96 Milyar. PK tersebut diberikan kepada pelaku usaha peternakan sapi perah sebesar Rp. 1,86 Milyar kepada Koperasi Setia Kawan Kabupaten Pasuruan, Kelompok peternak Tambah Rejo dengan komoditas usaha peternakan kambing di Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 2,5 milyar dan SPR Sungaililin untuk komoditas sapi potong sebesar Rp. 1,5 Milyar. Dana pinjaman PK BUMN ini oleh peternak digunakan untuk pembelian ternak dan sarana seperti kandang. Total fasilitasi selama 2 tahun (2018-2019) sebesar Rp. 14,52 Milyar untuk 392 peternak. Pada tahun 2019 pembelian ternak perah yaitu dara siap bunting atau induk produktif dari rearing dan harapan importasi ternak dengan harga yang terjangkau oleh peternak masih belum optimal dalam rangka mewujudkan peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu nasional. Secara rinci peta sebaran pemanfaatan PKBL BUMN 2018-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

c. Penguatan Kelembagaan Peternakan

Koordinasi/pendampingan penguatan kelembagaan dilakukan dalam upaya pengembangan kemitraan usaha peternakan dan pengembangan kawasan korporasi peternakan sapi potong dan itik di Kabupaten Subang dan Kabupaten Mojokerto.

- 1) Pengembangan Kemitraan sesuai dengan amanah UU nomor 41 tahun 2014 *juncto* UU nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan kemitraan untuk mewujudkan penyelenggaraan kemitraan yang sehat dan mencegah terjadinya eksploitasi peternak. Untuk pelaksanaan amanah ini UU ini Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Peraturan Menteri ini mengamanahkan bahwa kemitraan usaha peternakan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan serta dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diketahui oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka optimalisasi peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan kemitraan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak pada tanggal 12 Juni 2019. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan tingkat pusat yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dilanjutkan dengan penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan Kuisisioner pengawasan kemitraan usaha peternakan.

- 2) Pengembangan Kawasan Sapi Potong Subang Berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dan Kepmentan Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang RT/RW Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, serta menindaklanjuti arahan Presiden RI pada acara Jambore Peternakan Nasional tahun 2017, maka pada tahun 2017, Kementerian Pertanian menetapkan Kabupaten Subang sebagai salah satu lokasi *pilot project* kawasan sapi potong.

Kawasan sapi potong ini berlokasi di Kecamatan Kasaliang, Cinagara Bogor, dan jalan sagala panjang Kabupaten Subang. UMKK Brahman Sejahtera merupakan gabungan 3 sentra peternakan rakyat (SPR) yaitu: SPR Cinagarabogo, SPR Kasaliang, dan SPR Jalansagalapanjang, yaitu terdiri atas : 16 Kecamatan, 66 Desa, 66 kelompok, 1.834 orang, 3.875 ekor sapi dan 11 unit kandang komunal dengan daya tampung 156 ekor. Infrastruktur pelayanan kawasan: puskesmas 3 unit, pasar hewan 5 unit, RPH 3 unit dan TPH 15 unit. Potensi biomasa pakan 666.865.650 ton/BK/Ha/tahun.

Beberapa kemajuan yang dicapai Brahman Sejahtera pada tahun 2019, antara lain : kemitraan penggemukan dengan Perkumpulan Pengusaha Minyak tahap awal sebanyak 20 ekor; pembangunan kandang koloni CSR Bank Indonesia kapasitas 20 ekor; pelatihan Aplikasi Keuangan oleh Bank Indonesia; pelatihan administrasi keuangan Mitra Binaan CSR PT DAHANA; sertifikasi pupuk organik dan penyerapan pupuk organik oleh BUMDES desa Balingbing kecamatan Pagaden Barat sebanyak 60 ton serta melalui KTNA.; peternak menjual sapi melalui satu pintu ke bagian pemasaran koperasi dengan harga sesuai berat badan, sapi yang sakit di potong di RPH; dan penjualan pakan konsentrat ke Jabodetabek; serta penjualan sapronak secara *online*.

3) Pengembangan Kawasan Itik Mojokerto

Pengembangan kawasan itik berbasis korporasi di Kabupaten Mojokerto dimulai tahun 2019. Populasi itik tersebar di 5 kecamatan dengan jumlah populasi adalah sebagai berikut : a) kecamatan Bangsal 4.749 ekor; b) kecamatan Mojoanyar 57.524 ekor; c) kecamatan Mojosari 66.600 ekor; d) kecamatan Pungging 34.910 ekor; dan e) kecamatan Ngoro 27.000 ekor. Jenis itik yang banyak dipelihara masyarakat di 5 kecamatan ini ada 2 jenis itik yaitu : a) itik pedaging yang merupakan itik hibrida persilangan dari itik kaki chambell dengan itik peking dan; b) itik petelur Mojosari. Jenis usaha yang telah dilakukan selama ini adalah usaha pembibitan/penetasan, penggemukan, usaha pengolahan telur asin dan usaha pengolahan bebek asap berdasarkan permintaan. Pemasarannya mencakup pasar lokal, pasar antar kabupaten, pasar antar provinsi/ pulau

meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, NTB, Sulawesi dan Papua.

Pada tahun 2019, telah dibentuk Unit Manajemen Kawasan Korporasi Peternak Itik Moro Hasil berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/601/KEP/416-118/2019 tanggal 23 September 2019. Sekretariat Korporasi Peternak Itik Moro Hasil di Dusun Jumptut Desa Mejoyo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Korporasi beranggota 185 orang dari 11 gabungan kelompok di 5 kecamatan, yaitu : kecamatan Mojosari, Mojoanyar, Bangsal, Pungging dan Ngoro. Untuk meningkatkan kapasitas SDM pada kawasan ini pada tahun 2019 telah dilaksanakan Bimtek kegiatan pengembangan wilayah korporasi pada tanggal 17 Oktober 2019, dan pelatihan budidaya dan pelatihan manajemen pada tanggal 24-26 Oktober 2019. Pengembangan kawasan itik ini diharapkan dapat mengurangi impor daging itik.

4) Penyusunan Petunjuk Kerja Optimalisasi Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan (Ayam Ras)

Penyusunan Petunjuk Kerja Optimalisasi Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan (Ayam Ras) sebagai salah satu tindak lanjut dari Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Petunjuk Kerja ini disusun dalam upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan yang telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 12 Juni 2019. Sebagai tindak lanjut dari PKS tersebut telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan yang beranggotakan dari unsur Direktorat Jenderal PKH dan KPPU.

Petunjuk kerja ini sebagai acuan pada pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan yang dilakukan oleh Satgas pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan. Diharapkan dengan peran aktif Satgas dapat terwujud terkumpulnya data pelaku kemitraan serta terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan secara optimal. Optimalnya pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan diharapkan berdampak positif terhadap iklim usaha peternakan dan mengembalikan kemitraan pada tujuan yang seharusnya.

d. Pemasaran Hasil Peternakan

Pengembangan Ekspor

- a) Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha ekspor komoditas peternakan dalam rangka pelaksanaan pendampingan/pelepasan ekspor komoditas peternakan di tahun 2019 antara lain yaitu: ekspor domba ke Malaysia, ekspor daging olahan ayam ke Jepang, ekspor babi hidup ke Singapura, ekspor pakan dan daging olahan ayam ke Timor Leste, dan ekspor DOC unggas lokal ke Myanmar.
- b) Melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait sehubungan dengan pengembangan pemasaran ekspor komoditas peternakan antara lain dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, dan Kemenko Perekonomian.
- c) Melakukan koordinasi di lingkup Kementerian Pertanian seperti Biro Kerjasama Luar Negeri dan Badan Karantina dan juga dengan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian terkait penyelesaian perundingan kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- d) Melakukan FGD terkait dengan pengembangan pemasaran seperti koordinasi data ekspor dengan pihak BPS dan Bea cukai, FGD pembahasan peta bisnis proses perunggasan, pembahasan langkah kerja Tim Percepatan Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH.
- e) Melakukan pendampingan pelaku usaha ekspor untuk promosi produk dalam pameran yang bersifat internasional seperti Indolivestock serta penyebarluasan informasi pameran perdagangan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha ekspor.

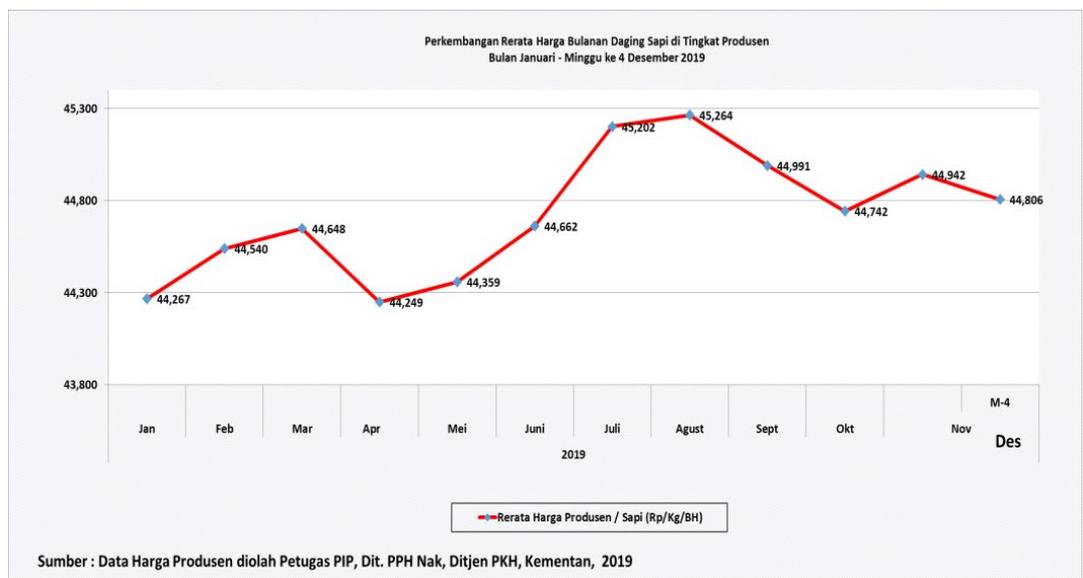
Pengembangan Informasi Pasar

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memonitoring dan memberikan masukan terhadap perkembangan dinamika pasar serta menjaga stabilitas harga daging sapi, ayam dan telur diperlukan kebijakan pemerintah. Koordinasi dan pembinaan dalam rangka stabilisasi harga, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga dan peningkatan harga menjelang dan pasca hari-hari besar nasional dan keagamaan. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain: koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemendag, Bank

Indonesia, Bulog, Satgas Pangan, dan para asosiasi petani/peternak dan penentuan harga acuan komoditas bahan pokok dan penting yang setiap 4 bulan sekali bersama Kemendag, Bulog, dan para peternak. Operasi Pasar melalui program Gelar Pangan Murah bersama Badan Ketahanan Pangan, PD Pasar Jaya, *Food Station* Pemprov DKI, Kementerian Perdagangan, Badan Usaha Logistik, dan penentuan harga acuan komoditas bahan pokok dan penting yang setiap 4 bulan sekali bersama Kemendag, Bulog, dan para peternak.

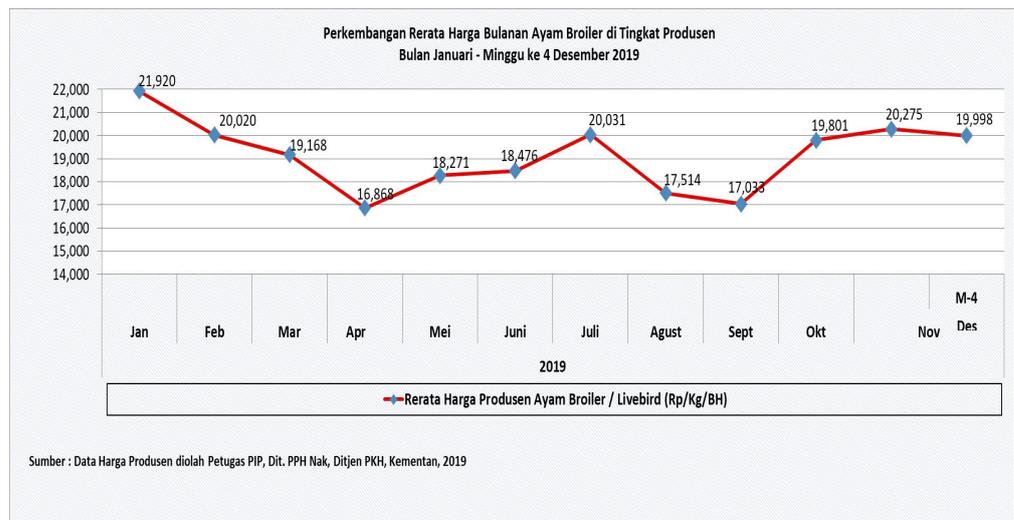
Pada tahun 2019 dilakukan pengembangan informasi pasar di 187 lokasi (34 provinsi dan 153 kabupaten). Tujuan pengembangan informasi pasar adalah menyediakan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu di tingkat produsen sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian usaha ternak, sehingga peternak maupun pedagang mendapatkan keuntungan optimal dengan biaya minimal serta diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar.

Perkembangan harga komoditas pertanian strategis yang terdiri atas sapi, ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat produsen pada tahun 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.13 Perkembangan Harga Komoditas Sapi Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2019

Perkembangan rerata harga sapi hidup di tingkat produsen di tahun 2019 mengalami trend meningkat 0.06%, sedangkan harga bulan desember dibandingkan bulan November 2019 berkisar dari Rp. 44.792,-/Kg/BH sampai Rp. 44.942,-/Kg/BH. daerah sentra seperti Jatim dan Jabar mengalami kenaikan 0,07 sampai 1,42% sedangkan DIY dan Jateng mengalami penurunan sebesar 1,24% sampai 2,93%. Peningkatan harga sapi sangat dipengaruhi juga kondisi permintaan pada saat HBKN khususnya pada hari Idul Adha dan banyaknya daging beku berbagai bagian di pasaran.

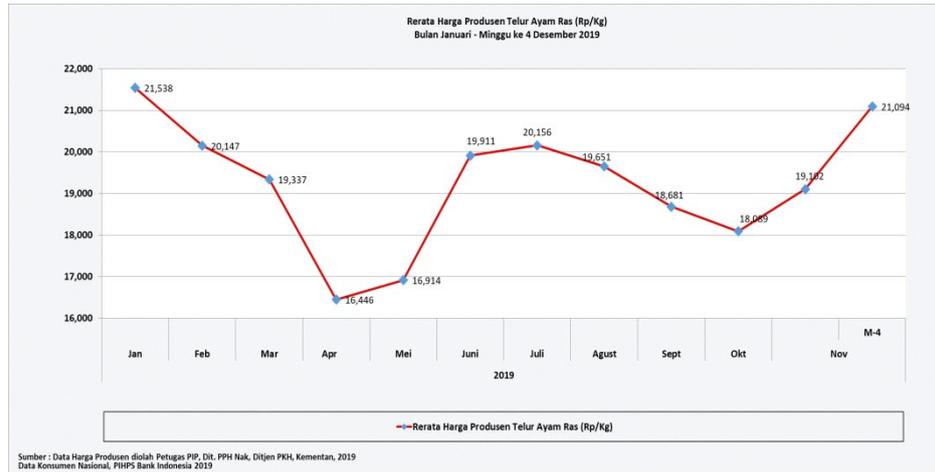


Grafik 3.15 Perkembangan Harga Komoditas Ayam Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2019

Perkembangan rerata ayam broiler hidup di tingkat produsen di tahun 2019 mengalami trend meningkat 0.071%, sedangkan harga bulan desember dibandingkan bulan November 2019 berkisar dari Rp. 20.275,-/Kg/BH sampai Rp. 19.740,-/Kg/BH. Sebagian besar daerah sentra seperti Jabar, Jateng, dan Jatim cenderung mengalami penurunan harga 0,85 sampai 1,90%. Penurunan harga di tahun 2019 disebabkan oleh *oversupply* produksi.

Perkembangan rerata telur ayam ras di tingkat produsen di tahun 2019 mengalami trend meningkat 0.6%, sedangkan harga bulan Desember dibandingkan bulan November 2019 berkisar dari Rp. 19.102,-/Kg sampai Rp. 20.163,-/Kg. Sebagian besar daerah sentra seperti Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim cenderung mengalami peningkatan harga 9,73 sampai 11,48%. Harga telur ayam ras di tahun 2019 cukup berfluktuatif tetapi cenderung ada peningkatan yang disebabkan oleh harga jagung yang terus meningkat sehingga ikut mempengaruhi harga pakan layer serta

sebagian besar peternak yang melakukan peremajaan ayam ras petelur sehingga mempengaruhi telur yang beredar di pasar dan menurunnya suplai dari wilayah sentra telur. Tahun 2019 kinerja Petugas PIP dalam mengirimkan data harga melalui Aplikasi pippeternakan (<http://pippeternakan.pertanian.go.id>) meningkat 5% dari rata kinerja 75.67% di tahun 2018 menjadi 79.45%.



Grafik 3.16 Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras di Tingkat Produsen Tahun 2019

Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Hasil Peternakan

Mengikuti dinamika perubahan harga komoditas peternakan yang terjadi, dimana terkadang harga di tingkat produsen berada di bawah harga acuan sehingga peternak mengalami kerugian atau sebaliknya harga ditingkat produsen terlalu tinggi diatas harga acuan Permendag No.96/2018 sehingga menyebabkan kenaikan harga ditingkat konsumen dan kemudian menyumbang angka inflansi, maka diperlukan respon yang cepat dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Pengambilan keputusan didasarkan atas data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, salah satu sumber tersebut adalah tersedianya informasi harga komoditas peternakan yang diperoleh dari petugas pelayanan informasi pasar (PIP) yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk mendukung ketersediaan informasi harga yang cepat dan akurat maka dibutuhkan infrastruktur sistem/aplikasi yang handal dan mudah digunakan.

Menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan pengembangan sistem aplikasi pelaporan harga yang dinamakan SIMPONI – Ternak (sistem informasi pasar online

nasional peternakan) sehingga petugas PIP Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dengan mudah melakukan input data dan cepat dalam menyajikan laporan/analisis informasi harga. Selain itu para pengambil kebijakan juga dapat memantau langsung perkembangan informasi harga melalui aplikasi SIMPONI – Ternak menggunakan android atau via website dengan cepat dan sehingga membantu dalam membuat keputusan yang tepat.

Kegiatan pengembangan sistem informasi pemasaran hasil peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan data yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi pasar (PIP) yang tersebar di 34 Provinsi dan 174 Kabupaten/Kota sehingga mampu mengoptimalkan penyajian informasi. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi pasar yang cepat, akurat, kontinyu dan objektif sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan meningkatkan daya tawar, peluang pasar bagi petani/peternak. Aplikasi Simponi – Ternak ini sudah mulai diimplementasikan pada bulan Desember 2019 di 34 Provinsi.

Koordinasi Tataniaga Ternak Dan Hasil Ternak

Koordinasi tataniaga ternak dan hasil ternak dilaksanakan di 2 (dua) provinsi, yaitu NTT dan NTB. Direktorat Jenderal PKH telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam upaya penataan tata niaga ternak dengan menggunakan kapal ternak. Pada tahun 2019 ada 6 kapal yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6. Pelabuhan angkut ternak yang sebelumnya hanya melalui Tenau dan Waingapu di Kupang NTT saat ini bertambah 2, yaitu Pelabuhan Badas di Bima NTB dan Pelabuhan Kwandang di Gorontalo. Kapal Ternak selain berlabuh di Tanjung Priok juga berlabuh di Balikpapan dan Banjarmasin. Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2019 telah berjalan 74 kali *round voyage* (pelayaran) sejak Januari-Desember 2019 dengan mengangkut ternak sebanyak 37.649 ekor. *Loading factor* mencapai 98%.

e. Pengolahan Hasil Peternakan

Pembinaan/Pendampingan Penerapan CPPOB dan Fasilitas Izin Edar

Produk olahan hasil peternakan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan agar dapat dikonsumsi dan dipasarkan. Untuk dipasarkan harus mendapatkan izin edar. Dalam upaya

mewujudkan mutu dan keamanan pangan produk peternakan, maka produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, dimulai dari penyediaan bahan baku sampai pada tahap distribusi dan penyimpanan produk akhir.

Khusus untuk produk pangan olahan hasil peternakan agar dapat dipasarkan harus mempunyai izin edar dari BPOM, terutama untuk produk susu dan olahan produk peternakan basah lainnya (nugget, sosis, dan lain-lain). Sementara itu untuk mendapatkan izin edar tersebut UPH peternakan banyak mengalami kendala, baik dari segi terbatasnya biaya untuk pengurusan, maupun keterbatasan pada sarana dan prasarana yang dimiliki.

Tahun 2019, Ditjen PKH memfasilitasi 9 (sembilan) UPH hasil verifikasi bersama antara Ditjen PKH, Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota, dan BPOM di 7 (tujuh) provinsi, yaitu :

- 1) Kelompok Talang Perindu (Lazi Farm) Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
Produk berupa keju mozzarella hasil olahan susu sapi. Kapasitas produksi mencapai 15 kg/hari. Kondisi awal ruang pengolahan berbarengan dengan dapur rumah, dan alat pengolahan masih sederhana. Fasilitasi berupa bangunan pengolahan (revitalisasi) serta peralatan pengolahan yang foodgrade/stainless stell. Setelah difasilitasi, produk lebih higienis, kapasitas produksi meningkat. Saat ini sudah proses e-registrasi BPOM.
- 2) Sentra Susu Pondok Rangan, Kota Jakarta Timur, Prov DKI
Fasilitasi berupa bangunan pengolahan / rumah produksi. Produk yang dihasilkan kelompok yaitu susu pasteurisasi, dengan varian utama rasa Jelly. Sarana produksi sudah dilakukan penilaian/audit oleh BPOM dengan hasil nilai B. Untuk saat ini sedang proses e-registrasi BPOM.
- 3) Kelompok Bina Kreatif, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Produk yoghurt. Semula pengolahan di dapur. Fasilitasi bangunan pengolahan (revitalisasi) serta peralatan pengolahan. Hasil produksi lebih baik, kapasitas produksi meningkat. Proses terakhir mendaftarkan e-registrasi BPOM.
- 4) Kelompok Cipta Priangan, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
Produk berupa susu pasteurisasi. Semula pengolahan sudah di ruang produksi tersendiri, namun beberapa tempat masih kurang bagus, diantaranya lantai retak, lingkungan sekitar ruang produksi masih kotor, banyak rumput liar, belum ada tempat sampah, saluran pembuangan limbah masih terbuka, belum ada loker di ruang ganti karyawan,

belum ada fasilitas cuci tangan / wastafel di luar toilet, belum ada laboratorium uji, dan belum ada SOP kode produksi. Setelah fasilitasi kondisi rumah produksi menjadi lebih baik. Banyak pembenahan dan perbaikan ruang produksi, dan fasilitas di dalam dan dan luar rumah produksi. Produk kelompok telah diambil sampel dan diuji di lab terakreditasi. Saat ini telah proses e-registrasi di BPOM.

5) UPH Maju Mapan, Kab. Gunung Kidul, DIY

UPH Maju Mapan beralamat di kawasan wisata embung Nglanggeran / Gunung Api Purba, Patuk, Gunung Kidul, yang terintegrasi dengan kawasan sentra produksi kakao segar dan olahan, kawasan ternak kambing etawa, sehingga menjadi salah satu ikon tujuan wisata di Gunung Kidul. Sebelum difasilitasi kondisi rumah produksi sudah baik, tinggal perbaikan di alur produksi, penambahan sekat, serta fasilitas cuci alat. Saat diaudit PSB, sarana memperoleh nilai A. Sampel produk sudah diuji di laboratorium terkreditasi. Saat ini sudah terbit izin edar MD.

6) Kelompok Nedyo Rahayu, Kab. Madiun. Prov. Jawa Timur

Semula pengolahan bersama dapur rumah tangga dan alat-alat pengolahan masih sederhana. Fasilitasi berupa bangunan pengolahan, dan alat-alat pengolahan. Setelah dibantu proses produksi lebih cepat, lebih terjamin higienitasnya, serta kapasitas produksi meningkat. Produk sudah diambil sampel dan diuji di laboratorium terakreditasi. Saat ini sedang proses pendaftaran e-registrasi BPOM.

7) Kelompok Minanga Jaya, Kab. Enrekang, Prov. Sulawesi Selatan

Produk berupa susu pasteurisasi rasa jahe (sarabah). Semula pengolahan dilakukan di kolong rumah panggung. Alat-alat masak masih sederhana, belum stainless stell, sehingga hasil uji cemaran logam berat Pb melebihi ambang batas. Fasilitasi berupa bangunan pengolahan (revitalisasi) dan peralatan pengolahan (alat pembuat es krim, coolbox, kulkas, freezer). Setelah mendapatkan fasilitasi, produk lebih terjamin higienitasnya, tidak tercemar logam berat Pb, serta ruang produksi lebih nyaman, bersih, sehingga kapasitas produksi meningkat. Terakhir sudah proses e-registrasi BPOM.

8) Kelompok Sugih Mukti Mandiri, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat

Semula pengolahan di dapur. Produk susu pasteurisasi. Bantuan berupa rehab bangunan (revitalisasi) dan alat.

Setelah dibantu proses pengolahan menjadi lebih higienis, sesuai dengan alur produksi, dan tidak bolak-balik. Saat ini sedang proses eregistrasi BPOM.

- 9) Kelompok Karya Bersama, Kota Binjai, Prov. Sumut
Produk olahan kelompok berupa susu pasteurisasi. Sebelum difasilitasi pengolahan dikerjakan di dapur rumah tangga. Fasilitas berupa bangunan dan alat pengolahan. Alat berupa alat pasteurisasi, alat pengemasan (*cup sealer*), lemari pendingin (*frezeer*), serta lemari penyimpanan produk (*show case*).

Sejak tahun 2017, Direktorat Jenderal Peternakan juga telah bekerjasama dengan BPOM dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan produk olahan peternakan. Kerjasama ini dilakukan dengan fasilitasi sarana pengolahan pada UPH, bimbingan teknis terutama penerapan *Good Manufacturing Practices* dan sertifikasi izin edar.

3.3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

3.3.6.1. Dukungan Manajemen

1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Ditjen PKH disusun dengan berpedoman pada Renstra Revisi Ditjen PKH Tahun 2015-2019 dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Beberapa pokok bahasan Finalisasi Renja Tahun 2020 yaitu:

- 1) Review pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 yaitu : (i) hambatan administrasi kegiatan yang disebabkan masalah sumber daya manusia, *costing* dan penempatan akun serta alokasi kegiatan; (ii) rancangan target kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan belum memperhatikan kondisi spesifik dalam mendukung pembangunan peternakan dan keswan daerah; (iii) masih lemahnya kualitas koordinasi Pusat-UPT-Provinsi-Kab/Kota; (iv) potensi kegiatan yang

- tidak terlaksana; (v) penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan ROK; dan (vi) pelelangan belum dilaksanakan T-1.
- 2) Beberapa hal yang perlu dilakukan guna akselerasi capaian kinerja TA. 2019: (i) review pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2018, jika diperlukan dilakukan revisi dengan tetap mengacu peraturan perundangan; (ii) revisi atau relokasi kegiatan yang berpotensi tidak bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja utama (SIWAB); (iii) Tingkatkan koordinasi: Pusat-Provinsi, Provinsi-Kab/Kota terkait permasalahan dan upaya-upaya pemecahannya.
 - 3) Dalam penyusunan Renja Tahun 2020 harus memperhatikan beberapa hal yaitu: (i) RPJMN Tahun 2020-2024 (ii) Kebijakan Kementerian Pertanian; (iii) Monev Tahun 2017 dan 2018; dan (iv) e-proposal Tahun 2019.
 - 4) Kebijakan dan program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 yaitu : (i) peningkatan populasi dan produksi sapi dan kerbau andalan negeri; (ii) peningkatan produksi dan ekspor ternak kambing dan domba; (iii) efisiensi produksi dan ekspor ternak unggas; dan (iv) peningkatan populasi ternak babi.
 - 5) Adapun kegiatan prioritas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 yaitu: (i) Optimalisasi Reproduksi; (ii) Penambahan indukan impor; (iii) Penyelamatan Betina Produktif; (iv) Bantuan Ternak; (v) Pengendalian dan Penanganan Penyakit Hewan; (vi) Produksi Benih
 - 6) Dari sisi alokasi anggaran akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung: (i) pencapaian sasaran program dan (ii) penguatan pelayanan minimal peternakan dan kesehatan hewan.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)

Penyusunan RKA-K/L merupakan sarana dalam mensinergikan kegiatan berbagai unsur tersebut dan menuangkannya dalam RKA-K/L yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Penyusunan RKA-K/L merupakan rangkaian akhir kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari pengajuan e-proposal, Musrenbangda, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan sampai finalisasi renja. Hasil dari

penyusunan RKA-K/L yaitu dokumen RKA-K/L Sekretariat dan direktorat serta UPT dan OPD.

c. Penyelesaian dan Revisi Dokumen Anggaran

Tujuan Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran adalah melakukan revisi dokumen anggaran (DIPA dan POK). Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sebesar Rp. 2,073 triliun. Selama berjalannya tahun anggaran terdapat beberapa perubahan anggaran melalui revisi DIPA yang menyebabkan terjadinya penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 2.089.592.073.000. Revisi anggaran selama Tahun 2019 antara lain revisi refocusing, revisi buka blokir anggaran Bekerja, OPAL dan Loka Papua, revisi penambahan pagu BLU BBIB Singosari (Kanwil), Revisi penambahan pagu BLU Pusvetma dan revisi anggaran Bekerja kedua, revisi belanja pegawai, revisi pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target serta pagu PNBP.

Revisi pertama adalah revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kegiatan Bekerja, Petani Milenial, Serasi dan Opal dengan pagu anggaran tetap, dengan rincian:

- a. Anggaran sebesar Rp. 673.600.560.000,- digunakan untuk memberikan bantuan ayam usia 4 minggu dan pakannya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 11 juta ekor di 13 provinsi dan 57 kabupaten;
- b. Anggaran sebesar Rp. 25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Petani Milenial yaitu bantuan ternak ayam/unggas/itik 500 ekor/kelompok, bantuan kandang Rp. 3.000.000,-/kelompok, dan bantuan pakan 500 kg/kelompok, dengan pelaksanaan kegiatan BPTU HPT Sembawa;
- c. Anggaran sebesar Rp. 25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Serasi yaitu bantuan ternak 500.000 ekor itik untuk 500.000 Ha rawa di Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Anggaran sebesar Rp. 7.100.000.000,- digunakan untuk kegiatan OPAL.

Revisi yang kedua adalah revisi buka blokir kegiatan OPAL sebesar Rp. 7.100.000.000,- dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Loka Veteriner di Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros sebesar Rp. 35.000.000.000,-.

Revisi ketiga adalah penambahan pagu BLU di BBIB Singosari (revisi DIPA Kanwil) sebesar Rp4.000.000.000,- sehingga pagu total menjadi Rp. 2.077.121.296.000,-.

Revisi keempat adalah revisi penambahan BLU di Pusvetma sebesar Rp. 5.746.547.000,- sehingga terjadi penambahan pagu total menjadi Rp. 12.082.867.843.000,- dan penyesuaian lokasi (Kab. Soppeng dan Selayar) dan biaya operasional Bekerja.

Revisi kelima adalah revisi belanja pegawai dimana Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.081.859.000,- untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja pegawai. Penambahan alokasi belanja pegawai ini menyebabkan penambahan pagu total menjadi Rp. 2.083.949.702.000,-.

Revisi keenam adalah revisi anggaran terkait pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target dan pagu PNPB di mana dalam revisi terjadi penambahan pagu PNPB di 8 satker UPT sebesar Rp. 5.642.335.000,- sehingga pagu total menjadi Rp. 2.089.592.037.000,-. Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2019 secara lengkap disajikan pada gambar berikut:

KRONOLOGI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019



Gambar 3.22 Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2019

d. Kerjasama Luar Negeri Dan Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Ditjen PKH

- (1) Kerjasama Luar Negeri (Pengelolaan Hibah Luar Negeri, Kerjasama Bilateral/Multilateral dan Regional)

Kinerja Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan peran aktif Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam forum internasional dan perkembangan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan pihak luar negeri baik secara bilateral, multilateral maupun dengan lembaga-lembaga internasional. Kegiatan kerjasama luar negeri bidang peternakan dan kesehatan hewan pada tahun 2019 banyak didominasi oleh kerjasama bilateral dengan negara Belanda, Denmark, Thailand, Republik Demokratik Timor Leste, Australia, New Zealand, dan Malaysia. Telah ditandatangani MoM WGAFFC ke-21 RI-Australia, MoM JAWG ke-3 RI-Denmark, *MoM The 2nd Working Group on Agricultural Cooperation (WGAC) Indonesia –Argentina*, *Summary Report The 1st Meeting of Technical Working Group (TWG) on the Implementation of the MoU on Collaborative Animal Health, Plant Health and Biosecurity Quarantine Activities between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*.

Pengelolaan Kerjasama luar negeri terdiri dari Penyusunan dan penelaahan usulan dokumen makalah kerjasama/ berbantuan luar negeri dan Pengembangan hubungan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral bidang PKH.

Pembahasan penyusunan dokumen kerjasama terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu telah dilakukan pembahasan *final draft* Naskah Perjanjian Kerjasama *Reverse Linkage* Indonesia –Suriname-IsDB Bidang Inseminasi Buatan untuk Ternak, penyusunan Memorandum Saling Pengertian (MSP) kerjasama RI - Mercy USA untuk peningkatan pendapatan petani/peternak di pedesaan melalui pelaksanaan pertanian berkelanjutan.

Pengelolaan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan, perpanjangan, registrasi dan BAST dokumen kerjasama luar negeri.

Perpanjangan dokumen dan penyesuaian data hibah *Australia-Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program* yaitu perubahan nilai hibah yang semula AUD 28.900.000,00 menjadi AUD 29.150.000,00 dan batas penarikan yang semula 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019.

Perpanjangan dokumen proyek *Amendment No.1 Project Memorandum Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Threats including Influenza A in Indonesia* (OSRO/INS/501/USA) yang semula berakhir 30 April 2019 menjadi 31 Desember 2019) dan penyesuaian data jumlah hibah *Amendment No.2 Project Memorandum Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Threats including Influenza A in Indonesia* (OSRO/INS/501/USA) yang semula USD 16.000.000 menjadi USD 15.260.000.

Telah dilakukannya penyusunan dokumen BAST proyek hibah luar negeri untuk proyek *Biosecurity Upgrades at DIC Maros and DIC Wates between the the Indonesian Ministry of Agriculture and United States Department of State*.

Penyusunan Draft dokumen BAST untuk proyek hibah:

1. *Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity*;
2. *Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Treats Including Influenza A in Indonesia* (OSRO/INS/501/USA),
3. *Enhancing the Capacity of the Government of Indonesia and Partner to Control Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* (OSRO/INS/103/USA),
4. *Emergency Assistance to Rapidly Reduce the Increased Incidence of rabies in Dogs and Reduce the Risk of Rabies in Humans in Bali Indonesia* (TCP/INS/3504),
5. *Reinforcement and Expansion of the AI Participatory Disease Surveillance and Response Program in Indonesia* (OSRO/INS/604/USA),
6. *Assistant through FAO for the control of Rabies in Indonesia* (OSRO/INS/104/USA),

7. *Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA),*
8. *Rabies Prevention and Eradication Program Nias,*
9. *The Indonesian-Dutch Partnership Programme Pertaining to HPAI Prevention and Control, Food Security Programme in Livestock Components, serta*
10. *Cost-effective Biosecurity for Non-industrial Commercial Operation in Indonesia (ACIAR AH/2006/169).*

Kerjasama dengan luar negeri dilakukan dalam beberapa kegiatan yakni *Study visit* Kementerian Peternakan dan Perikanan Bangladesh ke BET Cipelang, BBIB Singosari, BIB Lembang, KPSBU Bandung sebanyak 4 gelombang; Kunjungan Tim *Import Risk Analysis (IRA)* Timor Leste pada tanggal 26-28 Agustus 2019 di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur terkait ekspor komoditas *day old duck (DOD)* dan pakan dari Indonesia ke Timor Leste, kunjungan Delegasi Brazil yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Federasi Brazil beserta anggota delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pengusaha Brazil ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Fact finding mission* oleh tim *Danish Veterinary and Food Administration Denmark (DVFA)* Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Kuningan pada tanggal 4-7 November 2019, serta Kunjungan *Korea Agency of Education Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (EPIS) of The Republic of Korea* pada tanggal 25 Juni 2019. Selain itu dilaksanakan *Regional Training Seminar for OIE National Vocal Point on Animal Welfare* pada tanggal 11-14 November 2019 di Bali.

Fasilitasi pengurusan administrasi pejabat/pegawai lingkup Ditjen PKH ke luar negeri pada Tahun 2019 sebanyak 127 surat penugasan. Tujuan penugasan untuk pertemuan bilateral, regional dan multilateral, pelatihan/training. Dari jumlah tersebut terdapat penugasan pejabat ke LN yang dibiayai DIPA Ditjen PKH TA.2019 maupun Panitia. Negara tujuan

penugasan yang paling sering dikunjungi adalah Thailand, Malaysia, Swiss, Jepang, Korea, Brunei Darussalam.

(2) Pelaksanaan Kehumasan (konferensi pers, Pameran bidang peternakan dan kesehatan hewan, Publikasi, Peliputan, dan Analisa Berita di Media Cetak, *Daring* dan Eletronik)

Pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan juga perlu ditopang dari sisi kehumasan dengan tujuan mempublikasikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaksanaan kehumasan di tahun 2019 dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam beberapa kegiatan, Humas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian atau Peternakan atau bagian yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah serta pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga termasuk dalam tupoksi humas sebagai perantara antar instansi dan juga masyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Humas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

a) Pelaksanaan Konferensi Pers

Pelaksanaan Konferensi Pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan kepada masyarakat. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk mewujudkan keinginan instansi untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh organisasi atau individu dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran.

Kegiatan Konferensi Pers yang telah dilakukan antara lain: a) Konferensi Pers Dalam Rangka HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), yaitu bulan Puasa, Idul

Fitri, Natal dan Tahun Baru 2019 mengenai kesiapan Ketersediaan Daging sapi, Daging Ayam, dan Telur; b) Konferensi pers Penyerahan Bantuan Jagung di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; c) Konferensi pers terkait Ekspor Komoditas Peternakan ke Timor Leste; d) Konferensi Pers Menghadapi Situasi Harga Daging Ayam di tingkat peternak yang mengalami penurunan; e) Konferensi Pers Kementerian Pertanian Launching Komoditas dan Aplikasi Ditjen PKH sepertinya Peluncuran Vaksin Rabies dari Pusvetma, Peluncuran Pejantan Unggul Hasil Uji Zuriat Sapi Perah Nasional, sedangkan pada aplikasi yakni: Aplikasi DILAN Kesmavet, SIMPONI, SiUpin, SIHAPSOH, SIMOHI; f) Konferensi Pers Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kegiatan Bincang Asia Pertanian Indonesia (BAKPIA); g) Konferensi Pers terkait Kontes Ternak dan Panen Pedet diberbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Papua dan lain-lain; h) Konferensi Pers terkait dalam merespon kewaspadaan pada komoditas peternakan dan penyakit hewan seperti respon Kementan Jamin telur bebas Dioksin dan Aman dikonsumsi; Kontribusi Kementan dalam menanggapi Rabies yang menjadi KLB di NTB; Kewaspadaan terhadap penyakit antraks khususnya menjelang hari raya Idul Adha 2019; Langkah dan ajakan Kementan dalam mewaspadaai penularan ASF yang merebak di Tahun 2019; Pengawasan terkait merebaknya berita PMK di India; i) Konferensi Pers Terkait Kegiatan Program Penyaluran Bantuan Ditjen PKH pada BEKERJA Tahun 2019; j) Konferensi Pers terkait Kunjungan Kerja Presiden Jokowi terkait Penyerahan KUR pada Peternak dan Tinjauan Kapal ternak di NTT; k) Konferensi Pers terkait Kunjungan Kerja Menteri Pertanian terkait Kontes Ternak, Panen Pedet, Panen Raya Jagung, Pembahasan Unggas, dan Pelepasan Ekspor Produk Peternakan; l) Konferensi Pers terkait Kunjungan Delegasi Luar Negeri seperti Vietnam, Bangladesh, Myanmar; m) Konferensi Pers mengenai Penghargaan Ditjen PKH yakni 3 Aplikasi Ditjen PKH (SIBETI, SISCOBETI, dan SIMAK) dan Penghargaan SNI Tahun 2019, serta untuk zona integritas (WBKWBM) dari Kemendagri.

b) Pameran

Pameran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai peternakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pameran, masyarakat juga dapat mendapatkan informasi baik mengenai peraturan-peraturan pemerintah bidang peternakan maupun informasi perkembangan dunia peternakan terbaru. Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pameran yang diadakan baik oleh Ditjen PKH sendiri maupun pihak lain. Kegiatan pameran yang diikuti antara lain: a) Pameran Agro Food Expo 2019, b) Pameran *The 14th Indolivestock Expo & Forum 2019*, c) Pameran ILDEX, d) Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- 38 tahun 2019.

c) Publikasi

Publikasi yang dilakukan oleh Ditjen PKH ditampilkan dalam *website* dan media cetak, daring (*on-line*) juga ditayangkan di media elektronik seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Koran Sindo, Investor Daily, Kontan, Indopos, Suara Pembaruan, Pos Kota, Seputar Indonesia, Liputan6.com, CNBC.com, CNN, Detik.com, Kumparan.com, JPPN.com, Gatra.com, Jpp.go.id, NET TV, Metro TV, TV One, iNews TV, media-media yang tergabung dalam media Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).

Saat ini, setiap acara yang dilakukan oleh Ditjen PKH telah ditampilkan dalam *website*, *facebook*, *facebook fanpage*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube Channel* Ditjen PKH. Pada tahun ini telah dipublikasikan sebanyak 41 Video di *Youtube* dan sebanyak 68 Infografis yang dipublikasikan melalui *facebook*.

(1) Facebook Fanpage:Ditjen PKH Kementan RI

<https://www.facebook.com/humaspkh/>

(2) Facebook Personal:Ditjen Peternakan dan Keswan

<https://www.facebook.com/admin.pkh>

(3) Twitter: Ditjen Peternakan dan Keswan

https://twitter.com/ditjen_pkh

(4) Instagram: Ditjen PKH Kementan RI

https://www.instagram.com/ditjen_pkh/

(5) Youtube: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

<https://www.youtube.com/channel/UCXkn2g9kKUDKzoGkGwpPX1w>

(6) Website:<http://ditjenpkh.pertanian.go.id/index.html>
Akun media sosial Ditjen PKH memiliki 20.476 orang pada *Fanpage Facebook*, 2.380 orang pengikut pada *Twitter*, 4.588 pengikut pada *instagram* dan 382 *Subscriber* pada *Youtube channel*.

d) Peliputan kunjungan kerja

Peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden, Menteri Pertanian, Direktur Jenderal PKH atau pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pimpinan dan bawahan, serta pemerintah dan masyarakat peternak dan petani. Peliputan kunjungan kerja ini melibatkan wartawan baik cetak, daring (*online*) maupun elektronik. Kegiatan peliputan kunjungan kerja dibuat dalam bentuk pers rilis disampaikan ke Website Ditjen PKH. Tahun 2019 telah terdapat 246 siaran pers.

e) Analisa Pemberitaan Resmi Ditjen PKH

Analisa pemberitaan resmi Ditjen PKH yang telah dimuat di media cetak dan online selama tahun 2019. Selama tahun 2019 terdapat 2.434 pemberitaan terkait sub sektor peternakan dan kesehatan hewan yang dimuat di media cetak dan media elektronik. Pemberitaan tersebut terdiri dari 2.240 berita (92,03%) pemberitaan dengan tone positif, 88 berita (3,62%) pemberitaan dengan tone negatif, dan 106 berita (4,35%) pemberitaan dengan tone netral.

f) Pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Pada tahun 2019, terdapat 60 permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari total 34 orang pemohon informasi dengan waktu rata-rata pelayanan selama 1-2

hari. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan selalu berusaha untuk meng-*update* informasi yang ada dalam website dan media sosial sehingga permintaan informasi publik dari masyarakat dapat dilayani dengan baik.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan PKH

Telah dibentuk Tim Monev melalui Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 1894/Kpts/OT.050/F/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Pada tahun 2019 Ditjen PKH menyepakati delapan sasaran program dengan sepuluh indikator kinerja sebagai berikut: (1) pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak; (3) produksi daging sapi dan kerbau; (4) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak); (5) rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (6) nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; (7) Nilai Kinerja (NK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 214 tahun 2017); (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (9) jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (10) jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia.

Monev PKH Tahun 2019 diarahkan untuk dapat mengetahui dan mengukur perkembangan kinerja:

- 1) *Outcome* dan *Output* Upsus Siwab, yang diukur menggunakan instrumen iSIKHNAS dan matriks Pelaporan kegiatan Siwab.

- 2) Program dan Kegiatan Utama PKH, yang diukur menggunakan matriks indikator capaian kinerja triwulanan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (PK).
- 3) Implementasi RKAKL Tahun 2019, yang diukur menggunakan instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214 Tahun 2017.

b. Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Telah dibentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Ditjen PKH Tahun 2019 melalui Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor: 8010/OT.050/F/02/2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Ditjen PKH Tahun 2019.

Adapun tugas Tim Satlak PI adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan pengembangan implementasi SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Mengkoordinasikan dan membangun manajemen Pengembangan Implementasi SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
- 5) Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- 6) Menyusun laporan Pengembangan Implementasi SPIP secara periodik (triwulanan dan tahunan).

c. Forum SPIP Nasional Lingkup Ditjen PKH

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, SPI diselenggarakan secara menyeluruh dalam Sistem Pengendalian Intern.

Pada Tahun 2019 telah diselenggarakan Forum SPIP Nasional pada tanggal 23 s.d 25 Oktober 2019 bertempat di El Hotel Royale Bandung Jawa Barat. Tujuan dilaksanakannya Forum SPI Nasional adalah memberikan pemahaman kepada peserta (Satker Lingkup Ditjen PKH) melalui *Workshop/ToT* tentang Penyusunan Rancang Kendali Kegiatan Strategis dan Kendali SOP serta Metode Pemantauan Aktifitas Pengendalian Risiko Kegiatan Strategis. Sasaran penyelenggaraan Forum SPI Nasional Tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas pemahaman dan implementasi pengendalian intern peningkatan Maturitas SPIP untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Tim Satlak PI Dinas/Kelembagaan PKH di Provinsi dan UPT lingkup Ditjen PKH se-Indonesia.

d. Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional

Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam upaya memperoleh data pokok berupa angka populasi, pemotongan, produksi, pemasukan dan pengeluaran pada 14 jenis ternak merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan serta data fungsi peternakan dan kesehatan hewan berupa: perbibitan dan produksi, pakan, keswan, kesmavet, PPHNak dan dukungan manajemen yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 925/Kpts/TU.210/F/09/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada tahun 2019 kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional I dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Mei 2019, bertempat di Aston Kuta Hotel & Residence, Bali dengan output Angka Tetap Tahun 2018 (angka Ditjen PKH dan BPS) dan Data Fungsi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2018. Sementara untuk verifikasi dan

validasi data peternakan tingkat nasional ke II dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Agustus 2019, bertempat di Aston Bogor Hotel & Resort, Bogor dengan output Angka Sementara Tahun 2019.

e. Pengembangan Sistem Layanan Rekomendasi

Pengembangan sistem layanan rekomendasi yang telah dikembangkan pada tahun 2019 yaitu: 1) Pengembangan Sistem Layanan Rekomendasi berupa Integrasi Sistem antara SIMREK PKH dengan SIMPONI KEMENKEU untuk pemberian dan konfirmasi billing secara *realtime* melalui *webservice* untuk mempercepat proses penyampaian PNPB ke Kas Negara, 2) Pengembangan Sistem Layanan Rekomendasi Terkait Penetapan Janji Layanan (*Service Level Agreement/SLA*) Komoditas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Pembuatan Fungsi Perhitungan Lama Pemrosesan, 3) Pembuatan User Manual Aplikasi SIMREK PKH, 4) Pengembangan Sistem Layanan Rekomendasi Terkait Peningkatan Keamanan Sistem dan Kemudahan Manajemen Server pada Sistem *Online* Perizinan berupa SSL/HTTPS dan Webmin, 5) Pengembangan Sistem Pemasukan Produk Hewan Non Pangan-Telur SPF, 6) Pengembangan Sistem Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan, 7) Migrasi Sistem Layanan Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya dari Aplikasi SIMREK2 ke Aplikasi SIMREKPKH, 8) Migrasi Sistem Layanan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari Aplikasi SIMREK2 ke Aplikasi SIMREKPKH, 9) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya, 10) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan Benih/Bibit Ternak-Semen Beku/Embrio, Ternak Potong, Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak, 11) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pengeluaran Benih/Bibit Ternak-Domba, Babi, Unggas dan Aneka Ternak serta Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi, 12) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan, 13) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan Susu, Kulit dan Bulu, 14) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan, Produk Hewan Non Pangan, dan Makanan Hewan Kesayangan/*Pet Food*.

f. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Rekomendasi

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pelayanan rekomendasi untuk 31 (tiga puluh satu) jenis layanan rekomendasi yaitu : 1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar, 2) Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya, 3) Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan, 4), Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak, 5) Pendaftaran dan Peredaran Pakan, 6) Izin Usaha Obat Hewan, 7) Pemasukan Obat Hewan, 8) Pengeluaran Obat Hewan, 9) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan, 10) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan, 11) Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (Susu dan Produk Susu), 12) Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (Telur dan Madu), 13) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Gelatin), 14) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Kulit), 15) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Bulu), 16) Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Hewan Non Pangan, 17) Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa, 18) Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa, 19) Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan, 20) Pemasukan Benih dan/atau Bibit Semen Beku/Embrio, 21) Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak Potong, 22) Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak Perah, 23) Pemasukan Benih dan/atau Bibit Unggas dan Aneka Ternak, 24) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Semen Beku/Embrio, 25) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Potong, 26) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Perah, 27) Pemasukan Benih dan/atau Bibit Unggas dan Aneka Ternak, 28) Pengeluaran Ruminansia Kecil, 29) Pengeluaran Babi, 30) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Telur SPF), serta 31) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan.

Total surat pengajuan permohonan rekomendasi pada tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 32.701. Sedangkan total permohonan rekomendasi pada tahun 2019 yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 30.982 buah atau 94,74% dari 32.701 permohonan.

g. Sosialisasi Sistem Layanan Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sosialisasi Sistem Layanan Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu:

1. Pada bulan Juli 2019 membahas tentang Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya. Penerapan Pelaporan Realisasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya. Secara Online dilaporkan pada aplikasi simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id mulai tanggal 15 Juli 2019.
2. Pada bulan Agustus 2019 membahas tentang Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak serta Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi. Penerapan Pelaporan Realisasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak serta Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi secara Online dilaporkan pada aplikasi simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id mulai tanggal 28 Agustus 2019.

3. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

a. Pelaporan keuangan dan workshop TLHP

Selama tahun anggaran 2019 Workshop Laporan Keuangan telah dilakukan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan bulan Januari dan Oktober 2019, sedangkan workshop TLHP tidak terlaksana.

b. Pelaporan aset

Pelaporan Aset/BMN (Barang Milik Negara) terdiri dari: Penatausahaan BMN dan Pengelolaan BMN. Penatausahaan BMN terdiri dari penyusunan laporan BMN, laporan hasil revaluasi aset, PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, laporan pengawasan dan pengendalian, laporan Rumah Dinas dan laporan tanah. Penyusunan Laporan Aset disusun oleh Tim BMN baik dari Pusat, UPT maupun dari SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Provinsi serta akan digabung di tingkat Pusat. Laporan tersebut disusun dan dilaporkan setiap semester ataupun triwulanan yang

terdiri dari Laporan BMN Unaudited dan Laporan BMN Audited. Laporan BMN Unaudited adalah laporan yang dibuat di Semester I dan II serta triwulanan sedangkan Laporan Audited dibuat 1 tahun sekali setelah diperiksa oleh BPK RI. Selama tahun 2019 tim BMN telah membuat dan melaporkan laporan tersebut.

Pada tahun 2019 Satker lingkup Ditjen PKH yang mempunyai tanah, bangunan, jalan dan irigasi telah melakukan evaluasi aset tetap yang dilakukan dengan bekerja sama dengan KPKNL setempat. Sedangkan selama tahun 2019 Ditjen PKH telah melakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN dan melakukan rekap rumah dinas yang berada di UPT lingkup Ditjen PKH.

Data tanah lingkup Ditjen PKH pada tahun 2019 sebagai berikut:

- Terdapat 75 Hampan dengan total luas tanah 72,439,170 m² dan Total Nilai Rp. 13,971,693,154,000,-;
- Belum bersertifikat di BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Siborongborong, Pusvetma, BET Cipelang, dan BBVet Maros. Dengan total luas 44,602,809 m² dan total nilai Rp. 7,429,411,167,000,-;
- Sudah bersertifikat tetapi bermasalah di di BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Siborongborong, BPTUHPT Padang Mangatas, BPTUHPT Pelaihari, dan BPTUHPT Denpasar. Dengan total luas 16,399,400 m² dan total nilai Rp. 841,410,082,000,-;
- Sudah dilakukan upaya komunikasi dan pembahasan tanah di UPT yang tanahnya bermasalah dan akan segera dibentuk tim untuk penyelesaiannya.

Pada tahun 2019 Ditjen PKH melakukan hibah regular menggunakan mekanisme PMK 111 tahun 2016. Selain itu, Ditjen PKH juga mengajukan penghapusan aset BMN Satker Pusat dan penghapusan aset BMN lingkup Ditjen PKH.

c. Kerugian Negara dan PNPB Tahun 2019

Kerugian Negara Tahun 2018 sebesar Rp. 2.900.799.406,- selama tahun 2019 bertambah Rp. 555.794.153,64 dan telah diangsur sebesar Rp. 446.577.225,84 sehingga sisa kerugian negara di tahun 2019 sebesar Rp. 3.010.016.334,28. Sedangkan total untuk PNPB Ditjen PKH tahun 2019 sebesar Rp. 134.297.081.405,-.

4. Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha

a. Penyusunan Rancangan Permentan, Kepmentan, Advokasi dan Perjanjian tahun 2019

Pada tahun 2019 telah diterbitkan 15 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri Pertanian sebanyak 4 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 11 buah Keputusan Menteri Pertanian.

Dalam penyelesaian penyusunan peraturan memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sama, karena dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan memerlukan kecermatan dalam perumusan dan penyusunan substansi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dinamis.

Advokasi hukum tahun 2019 terkait:

1. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap PPK BPTU-HPT Siborongborong dalam perkara pengadaan pakan ternak kerbau Tahun 2014 di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Sumatera Utara; (Januari 2019)
2. Melakukan advokasi dan pendampingan saksi Drh. Vierman Kepala Balai BPTU-HPT Indrapuri Aceh (sebagai KPA BPTU-HPT Siborongborong Tahun 2014) dalam perkara pengadaan pakan ternak kerbau Tahun 2014 atas nama terdakwa Drh. Nometta dan Ckosmas Tambunan di Pengadilan Tipikor Medan Sumatera Utara; (Februari 2019)
3. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap tim pelaksana GBIB Tahun 2015 dalam permintaan keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik Polres Maros Sulawesi Selatan; (Februari 2019)
4. Melakukan pendampingan dan advokasi hukum terhadap PPK dan Pelaksana Pengadaan Sapi Indukan Impor dan Kerbau Lumpur di BBVet Maros Tahun 2018 dalam rangka permintaan keterangan oleh Tim Penyelidik Tipidikor Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Maros; (Februari 2019)

5. Melakukan pendampingan dan advokasi hukum terhadap PPK dan Pelaksana BBVet Maros Pengadaan Program BEKERJA Tahun 2018, dalam rangka permintaan Keterangan oleh Tim Penyelidik Intel Kejaksaan Negeri Maros; (Maret, April, Mei 2019)
6. Melakukan pendampingan dan advokasi hukum terhadap PPK BBVet Maros dalam membuat laporan di Direktorat Krimsus Polda Sulawesi Selatan atas Perkara Penolakan Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Kerbau Lumpu dan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar; (April, Mei, Juni 2019)
7. Melakukan pengawalan dan advokasi hukum terhadap PPK BBVetMaros dalam perencanaan kegiatan gugatan perdata atas di tolaknya pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pengadaan kerbau lumpur dan sapi indukan impor Tahun 2018 oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar; (Juni, Juli, Agustus 2019)
8. Melakukan Pengawalan, pendampingan dan Advokasi Hukum terhadap PPK, Pokja, PPHP dan Pelaksana BET Cipelang dalam penyelidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Embrio Belgian Blue Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang ditangani oleh Tipidisu Kejaksaan Agung dan Ditreskrimsus Polda Jawa Barat; (Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember 2019)
9. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum kepada Saksi dan Ahli dalam memberikan Keterangan Kesaksian dan Keterangan Keahlian di Bareskrim Polri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani Oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Center (BBC) Bogor Tahun 2011 Dan 2012 (Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2019).
10. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum kepada saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Sulawesi Selatan terkait Perkara Program GBIB Tahun 2015; (September 2019)
11. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum Kepada BPMSP Bekasi terkait surat dari Toni Law Firm & Associates selaku kuasa hukum dari ahli waris almh. Sri

- Ariyantias dugaan penguasaan lahan/tanah yang digunakan BPMSB Bekasi (Juli, Agustus 2019)
12. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum kepada PPK dan Pokja BBPTU-HPT Baturraden dalam pemberian Keterangan terkait Dengan Pemberian Bantuan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 Oleh BBPTU HPT Baturraden, penyelidikan dilakukan oleh Tim TIPIDISUS Kejaksaan Agung RI (September, Oktober, Nopember dan Desember 2019)
 13. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum kepada PPK dan Pokja BPTU-HPT Siborongborong terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Di UPT BPTU-HPT Siborongborong Tahun Anggaran 2016 yang ditangani oleh Unit III Tipidikor Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara (September, Oktober, Nopember, Desember 2019)
 14. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum Kepada Bapak Drh. Fajar Sumping Tjaturrasa (Direktur Keswan) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan peredaran obat hewan atas nama terdakwa Benbarek Nordin Als Ben Mexime MC. Cool di Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (September, Nopember 2019)
 15. Melakukan Pendampingan dan Advokasi Hukum kepada saksi dan ahli dalam pemberian Keterangan Terkait penyelidikan oleh Unit II Tipidikor Sat Reskrim Polres Majalengka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah LM3 Untuk Belanja Sapi Di Pesantren Al-Qur'an Al-Hidayah Majalengka Tahun 2009 (Oktober, Nopember, Desember 2019)
 16. Melakukan pendampingan dan Advokasi Hukum kepada saksi Ir. Ahdan Hamid dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Trenggalek dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 pada kelompok petani ternak Singgih Agung Ds. Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur (Nopember 2019).

Perjanjian yang dapat diselesaikan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor: 24015/KU.070/F/04/2019
2. Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan dengan Nomor 12001/HK.230/F/06/2019
3. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Produksi dan Akselerasi Ekspor Komoditas Peternakan dengan Nomor 17029/HK.210/F/12/2019
4. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau dengan Nomor 23003/HK.210/F/12/2019
5. Memorandum of Understanding antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Mengenai Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Fasilitas Komoditas Ekspor tanggal 14 Desember 2019.

3.3.6.2. Dukungan Teknis Lainnya

a. KONSTRATANI dan AWR (*Agriculture War Room*) Ditjen PKH

Program Jangka Pendek Kementerian Pertanian salah satunya adalah single data dalam hal pengembangan (*Agriculture War Room*) AWR KEMENTAN dimana peran AWR dan KOSTRATANI sebagai Pusat Data, Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, Pusat Pembelajaran, pusat konsultasi Agribisnis dan Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan.

Dalam mendukung Program Jangka Pendek KEMENTAN dalam hal pengembangan AWR, Ditjen PKH telah melakukan pengembangan AWR dan KOSTRATANI Ditjen PKH. Peran KOSTRATANI Ditjen PKH sebagai 1) Pusat Data Tk Kecamatan (Kelahiran; Kematian; Pemotongan; Harga; Optimalisasi reproduksi; Pelayanan kesehatan hewan; Perkembangan banper; Populasi; Potensi kelembagaan;

usaha ternak yang berkembang,biomasa pakan), 2) Pusat Gerakan (Gerakan Sapi kerbau bunting; Gerakan penanaman HPT; Gerakan Pelayanan Kesehatan Hewan), 3) Pusat Pembelajaran (Budidaya ternak dan perbibitan yang baik (GFP); Teknologi dan formulasi pakan; Pengolahan hasil peternakan), 4) Pusat Konsultasi Agribisnis Dan Pelayanan (Skim pembiayaan; Informasi peluang usaha dan Pasar; Pemanfaatan dana CSR; Informasi harga pasar; Pelayanan Keswan, IB, PKb), 5) Pusat Jejaring Kemitraan (Menjembatani peluang kemitraan; Informasi peluang Usaha) dengan Identifikasi Potensi Sekretariat dan SDM KOSTRATANI Ditjen PKH : 22 UPT Lingkup Ditjen PKH, 1.614 Pos IB, 5.912 Inseminator, 1.814 ATR, 4.064 Pkb, 1.412 Puskesmas (1.114 Medik, 2.740 Paramedik).

Dalam hal pengembangan KOSTRATANI DAN AWR Ditjen PKH Tahun 2019 telah dilakukan Integrasi Data dan Sistem Informasi PKH dengan membuat Portal Sistem Informasi PKH, Heatmap Produksi Daging Sapi per Propinsi Tahun 2019, Peta Data Populasi Ternak di Indonesia Tahun 2018 dan 2019, Investasi dan Ekspor-Impor serta Pembangunan ruang AWR Ditjen PKH.

b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 di IPB International Convention Center Bogor dan dihadiri oleh para Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi seluruh Indonesia beserta jajarannya, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta jajarannya. Rapat bertujuan membahas Strategi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Beberapa poin penting kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Target Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang akan dilaksanakan di TA.2019 adalah sebanyak 2.638 Ha, dengan rincian : HPT di UPT 1.052 Ha, Gerbang Patas 464 Ha, Pengembangan Padang Penggembalaan 200 Ha, Pemeliharaan Padang Penggembalaan 878 Ha.

- b. Target Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan sebesar 8.000 Ton, yang dilaksanakan oleh UPT BBPTU-HPT / BPTU-HPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - c. Target Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan sebesar 5.000 sampel, dengan rincian : BPMSP 3.000 sampel, Lab Pakan Daerah 500 sampel, Pengawasan pakan/bahan pakan oleh daerah 1.500 sampel.
 - d. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan dengan target 135.387 sampel;
 - e. Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Hewan dengan target 3.226.450 dosis;
 - f. Penanggulangan Gangguan Reproduksi dengan target 105.780 ekor;
 - g. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.610 sampel;
 - h. Obat Hewan dan Bahan Biologik dengan target 5.417.100 dosis;
 - i. Penguatan Kelembagaan Veteriner dengan target 381 unit;
 - j. Optimalisasi Reproduksi dengan target 3.000.000 akseptor;
 - k. Pengembangan Ruminansia Potong dengan target 2.000 ekor;
 - l. Pengembangan Unggas 12.000.000 ekor;
 - m. Produksi Benih 4.764.089 dosis;
 - n. Produksi Bibit 580.181 ekor;
 - o. Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan dengan target 33 unit;
 - p. Sarana Pemasaran Peternakan dengan target 8 unit;
 - q. Kelembagaan dan Usaha Peternakan dengan target 73 dokumen;
 - r. Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan target 135 unit;
 - s. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk dengan target 28.521 sampel;
 - t. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dengan target 80 lokasi.
- c. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2020**
 Pertemuan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019 di Ruang

Rapat Sekretariat I Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa poin penting hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

1. KRISNA TA. 2020 akan menambahkan Output baru untuk memfasilitasi kegiatan manajerial di masing-masing kegiatan
2. Fokus kegiatan Ditjen PKH TA. 2020 yaitu :
 - a. Instalasi Pengembangan Bibit Ternak Sapi Potong Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak
 - i. Penyiapan Bibit/Indukan Ternak melalui pengadaan dan penjaringan dengan memperhatikan jenis ternak yang akan dikembangkan
 - ii. Penyiapan pakan melalui padang penggembalaan dan kebun HPT
 - iii. Pelayanan teknis kesehatan hewan
 - iv. Penerapan Kesrawan
 - v. Penatausahaan Aset Instalasi Pengembangan Ternak
 - b. SIWAB (target 4 juta akseptor)
 - i. Operasionalisasi SIWAB
 - ii. Pelaksanaan Kegiatan IB
 - iii. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N2 Cair dan kontainer
 - iv. Penyediaan Pakan
 - v. Penanggulangan Gangguan Reproduksi
 - vi. Pengendalian Pematangan Betina Produktif
 - c. Pengembangan Sapi Perah
 - i. Penambahan Indukan
 - ii. Uji Zuriat untuk peningkatan mutu genetik
 - iii. Rearing unit (Pembesaran Pedet) di UPTD / Koperasi
 - iv. Penyediaan Pakan (Hijauan dan konsentrat)
 - v. Penerapan Kesrawan
 - vi. Penanggulangan PHMS
 - vii. Peningkatan kualitas susu (mutu dan keamanan)
 - viii. Kemitraan dan pengembangan usaha
 - d. Pengembangan Sapi Potong rumpun baru dan lokal
 - i. Penyediaan Semen Beku
 - ii. Pengembangan Belgian Blue, Wagyu, Galacian Blonde dan Angus (UPT/UPTD)
 - iii. Perbaikan mutu genetik Sapi Sumba Ongole di Pulau Sumba
 - iv. Penyediaan Pakan (Hijauan dan konsentrat)
 - v. Penerapan Kesrawan

- vi. Penanggulangan PHMS
- vii. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk
- e. Korporasi
 - i. Penguatan kelembagaan
 - ii. Penjaminan mutu dan keamanan produk
 - iii. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk
 - iv. Peningkatan status kesehatan hewan
 - v. Penguatan pemasaran
- f. Pengendalian, Penanggulangan dan Pembebasan Rabies
 - i. Kajian Roadmap Pembebasan Rabies
 - ii. Surveilans
 - iii. Penyediaan Vaksin
 - iv. Komunikasi, informasi dan edukasi rabies

d. Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan TA. 2020

Rakortek Perencanaan TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Februari 2019 sebagai rangkaian acara Rakortek Lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan pada 19 Februari 2019. Rakortek Perencanaan bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara nasional dengan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.

Rakortek dihadiri oleh 33 perwakilan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi seluruh Indonesia. Sedangkan 1 provinsi yang tidak hadir yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat. Rapat dilakukan dengan metode *desk* dimana masing-masing *desk* terdiri dari perwakilan Direktorat dan Bagian Perencanaan. Beberapa hal yang dibahas pada dalam *desk* antara lain:

1. Kegiatan Baru Tahun 2019 : (i) Instalasi Pengembangan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak; dan (ii) Pengembangan Sapi Potong Rumpun Baru.
2. Kegiatan Lanjutan : (i) SIWAB; (ii) Pengembangan Sapi Perah; (iii) Pengembangan Ternak Ruminansia Potong; (iv) #Bekerja; (v) Kawasan Korporasi; (vi) Pengendalian, Penanggulangan dan Pembebasan Rabies; dan (vii) Pengendalian, Penanggulangan dan Pembebasan Brucellosis.
3. Output, yaitu : (i) Hijauan Pakan Ternak; (ii) Mutu dan Keamanan Pakan; (iii) Pencegahan dan Pengamanan

Penyakit; (iv) Optimalisasi Reproduksi; (v) Pengembangan Ternak Ruminansia Potong; (vi) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah; (vii) Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak; (viii) Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH; (ix) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk; (x) Pengendalian Pemotongan Betina Produktif; (xi) Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan; (xii) Sarana Pemasaran Peternakan; dan (xiii) Kelembagaan dan Usaha Peternakan.

e. Penilaian e-Proposal TA. 2020

Rapat Penilaian e-Proposal TA.2020 dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Mei 2019 di Hotel Savero Depok. Penilaian e-Proposal TA.2020 bertujuan untuk: (i) reviu pelaksanaan pengisian e-Proposal Kementan 2020 Termin I; (ii) sebagai bahan penyusunan Renja/KRISNA Pagu Indikatif; (iii) persiapan pelaksanaan Musrenbang BAPPENAS; dan (iv) persiapan Pelaksanaan Musrenbangtan. Hal – hal yang dibahas pada rapat, antara lain:

- a. Kriteria/Indikator Penilaian e-Proposal TA. 2020 Ditjen Peternakan dan Keswan mencakup: (i) pengembangan kawasan; (ii) kelembagaan; (iii) kinerja pengelolaan program/kegiatan; (iii) kriteria muatan usulan kegiatan/e-Proposal; dan (iv) pendanaan proposal.
- b. Fokus kegiatan utama 2020 adalah : (i) Peningkatan produksi unggas dengan pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui kegiatan #BEKERJA; (ii) peningkatan populasi ternak ruminansia besar (sapi/kerbau) melalui kegiatan optimalisasi reproduksi (UPSUS SIWAB); dan (iii) pengembangan komoditas ternak ruminansia (sapi indukan, kambing, dan domba);
- c. Jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan Kewenangan Provinsi (DK) sebanyak 1.560 proposal dengan rincian sebagai berikut : (i) Dit Bitpro : 648 proposal; (ii) Dit. Pakan : 84 proposal; (iii) Dit Keswan : 218 Proposal; (iv) Dit Kesmavet : 260 ; (v) Dit PPHNAK 350 proposal; dan (vi) Sekretariat : 148 proposal;
- d. Jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan Kewenangan Tugas Pembantuan (TP Kab/Kota) sebanyak 6.593 proposal dengan rincian sebagai berikut : (i) Dit. Bitpro : 2.933 proposal; (ii) Dit. Pakan : 1.063 proposal; (iii) Dit Keswan : 1.227 Proposal; (iv) Dit Kesmavet : 826 ; dan (v) Dit PPHNAK : 544 proposal;

- e. Setelah disampaikan SEB Pagu Indikatif, eselon I segera menyusun perubahan rancangan pusat dan segera menyampaikan ke Biro Perencanaan (sesuai format yang akan dibahas bersamaan dengan Tim Aplikasi), dan bahan ini digunakan sebagai dasar pembahasan di **Desk Musrenbangtan**;
- f. Sebagai bahan Kementerian Pertanian dalam **Musrenbangnas dibutuhkan data e-Proposal dan Rancangan Pusat untuk kegiatan PN**, dan Eselon I menyusun sesuai format Rakortek Kementerian Pertanian.

f. Bilateral Meeting

Bilateral Meeting dengan Bappenas dalam rangka Pembahasan Rancangan Rencana Kerja TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Mei 2019 di IICC, Bogor, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kerangka pembangunan rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
- b. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas, dengan Prioritas Nasional : (i) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; (ii) konektivitas dan pemerataan; (iii) nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; (iv) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; (v) stabilitas pertahanan dan keamanan
- c. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan masuk ke Prioritas Nasional 4 (PN4), dengan sasaran :(i) meningkatnya produksi pangan dengan indikator pertumbuhan produksi daging (%), target tahun 2020 untuk produksi daging yaitu sebesar 3.983 juta ton; dan (ii) meningkatnya kualitas konsumsi pangan dengan indikator pertumbuhan konsumsi daging (%), target tahun 2020 untuk konsumsi daging yaitu sebesar 7,1 kg/kapita/tahun
- d. Kebijakan dan Program Prioritas pada PN4 di bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas dengan Program Prioritas

yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP1).

- e. Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP1) di bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dengan Proyek Prioritas Peningkatan Produksi Daging.
- f. Terlampir draf Rancangan Renja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020.

g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Nasional Tahun 2019

Rapat diselenggarakan dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Juni 2019 di IICC Botani Square Bogor dihadiri oleh Menteri Pertanian, para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Staf Ahli/Staf Khusus/Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Sekretaris Daerah Provinsi, Tim Pakar dan Konsultan UPSUS Pajale, Pejabat Eselon II dan staf perencana lingkup Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Arahan Menteri Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) akan memfokuskan pada upaya meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas dan membangun infrastruktur pertanian dalam penyusunan program kerja tahun anggaran 2020. Langkah tersebut diambil dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang mengangkat tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Kementan mendapatkan amanah untuk menyukseskan prioritas nasional pada program nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, serta ketahanan pangan, air dan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, kami akan menekankan program kerja tahun 2020 pada upaya membangun SDM pertanian yang berkualitas dan membangun infrastruktur.

Untuk mengembangkan kompetensi SDM pertanian, Kementan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Pada tahun ini, Kementan sudah

menggelar pendidikan dan pelatihan untuk mencetak petani milenial. Program tersebut akan semakin digiatkan pada tahun 2020.

Sementara pembangunan infrastruktur masih dinilai sebagai kunci dalam peningkatan produktivitas pangan, sekaligus menekan biaya operasional produksi. Untuk itu, Kementan akan terus memfasilitasi dan bekerjasama dengan kementerian maupun lembaga lain untuk membangun infrastruktur pertanian, mulai dari waduk, embung, hingga irigasi sekunder dan tersier.

Selain pembangunan SDM dan infrastruktur pertanian, Kementan akan tetap menjalankan sejumlah kegiatan existing, yang dinilai telah berhasil. Beberapa program yang akan dilanjutkan adalah program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), Toko Tani Indonesia, pengembangan Techno Park dan Science Park, pengembangan kawasan berbasis korporasi, serta sejumlah program lainnya.

Salah satu program lama yang akan dipertahankan adalah program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani atau Serasi. Program optimalisasi lahan rawa sebagai lahan pertanian ini akan terus dijalankan sehingga Lahan rawa yang sebelumnya belum terkelola dengan baik, bias menjadi sumber lahan yang potensial dalam meningkatkan produksi pangan.

Dalam menyusun kegiatan tahun 2020, Kementan masih menggunakan Pendekatan "*money follow* program. Penganggaran *money follow* program juga mendukung pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, yaitu perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini digunakan untuk lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam implementasinya, Kementan telah menerapkan transparansi dalam proses penyusunan kegiatan dan alokasi anggaran melalui mekanisme system informasi eproposal yang dirancang oleh biro perencanaan Kementerian Pertanian. Aplikasi ini menampung usulan dari

masyarakat (*boffom up*) yang tergabung dalam kelompok tani secara berjenjang melalui tahap verifikasi.

Kegiatan Musrenbangtan kali ini diharapkan bisa mensinkronkan usulan daerah dengan rancangan pusat (*top down*) dimana outputnya adalah kesepakatan rancangan kegiatan tahun depan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kementan, juga para Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah berperan aktif dalam melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga dan terlaksana dengan baik. Selama empat setengah tahun kinerja Kementerian Pertanian 2015-2019 telah menorehkan berbagai hasil yang menggembirakan. Terbaru, Kementan berhasil mempertahankan predikat Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPK selama tiga tahun berturut-turut.

Prestasi lain di sektor pertanian adalah peningkatan PDB sektor pertanian 2014-2018 secara drastis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB sektor pertanian tercatat naik Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp 1.370 triliun.

Peningkatan PDB pertanian didorong oleh peningkatan volume ekspor. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton.

Dua torehan positif lainnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di sector pertanian dan inflasi pangan. Pertumbuhan ekonomi pertanian Indonesia mencapai 3,7 persen, melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3,5 persen.

Sementara inflasi pangan selama periode 2014-2017 juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2017, inflasi pangan bias ditekan hingga 1,26 persen. Capaian tersebut menunjukkan inflasi pangan sudah jauh lebih terkendali, terutama bila dibandingkan inflasi pangan tahun 2014 yang mencapai 10,57 persen.

b. Paparan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun 2015-2018 rata-rata produksi daging meningkat 5,585%, produksi susu meningkat 3%. Kinerja UPSUS SIWAB 2017 - 31 Mei 2019: Akseptor IB: target 10 juta ekor, realisasi 95,576%. - Akseptor bunting: target 7,2 juta ekor, realisasi 66,426%, Kelahiran: IB: target 5,76 juta ekor, realisasi 61,49%.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada tahun 2020 masih melanjutkan program sebelumnya yaitu Sapi Indukan Wajib Bunting/Upsus Siwab dengan target 3 juta akseptor, pengembangan ternak ruminasia potong 5.000 ekor, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera/Bekerja (176 ribu RTM), pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan 4,9 juta dosis dan pengembangan kawasan berbasis korporasi 5 lokasi.

c. Sesi Pembahasan *Desk*

Permasalahan yaitu masih adanya provinsi yang belum mengajukan e-proposal. Solusi dari permasalahan diatas, yaitu dinas provinsi agar segera mempersiapkan proposal untuk diajukan. E-proposal akan dibuka kembali setelah musrenbantan yaitu pada tanggal 1 Juli 2019.

h. Pemantapan Rencana Kerja (Renja) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Pertemuan Pemantapan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 21-23 Agustus 2019 di Hotel Savero Depok. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Ekonomi dan Maritim Direktorat Jenderal Anggaran serta Narasumber ahli. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang didampingi oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. Pertemuan dilaksanakan dengan metode sidang pleno dan dibagi menjadi 5 (lima) sesi. Setiap sesi dibahas oleh para pakar/komisi ahli bidang perbibitan, pakan, kesehatan hewan dan kesmavet yaitu :

a. Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

b. drh. A. Agung Gde Putra, SH, M.Sc, PH.D

- c. drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D
- d. drh. Kurnia Achyadi, MS
- e. Ir. Bambang Setiadi

Hasil pertemuan sebagai berikut :

1. Ditjen Anggaran menyatakan bahwa tidak ada pembatasan untuk belanja modal, selama itu mendukung kinerja instansi. Namun untuk belanja barang ada pembatasan sesuai aturan yang berlaku.
2. UPT Perbibitan belum dikelola dengan professional sehingga penjualan ternak masih rendah dan tingkat kematian ternak tinggi
3. UPT Kesehatan Hewan belum dimanfaatkan secara optimal dan perlunya perbaikan sinergi UPT perbibitan dan UPT kesehatan hewan
4. Kinerja UPT tidak bisa optimal karena hampir sebagian pekerjaan UPT tidak sesuai dengan fungsi tersebut.
5. Perlu dilakukan penelaahan kembali terkait dengan penetapan target PNBPUPT
6. Mengidentifikasi uji coba *Belgian Blue* dimasing-masing lokasi terkait dengan perkembangannya, agar dapat diperoleh rekomendasi untuk pengembangan *Belgian Blue* selanjutnya.
7. Agar kinerja UPT berjalan baik, diharap mempertimbangkan pengadaan ternak agar tidak dilakukan oleh UPT.
8. Beberapa UPT meminta tambahan anggaran untuk meningkatkan kinerja fungsinya, antara lain:
 - BBPMSOH: membangun *Lab Bio Ssecurity Laboratorium 3*.
 - BPMSPH: pengadaan peralatan LCMS-MS 1 unit Rp.8.350.000.000 dan renovasi gedung kantor Rp 2.797.104.000
 - BPTU-HPT Siborongborong: pembangunan gudang pakan babi 2 unit dan pengolahan limbah
 - BPTU HPT Sembawa: pengadaan *Hay Baller* dan *Manure Spreader*.
9. Permasalahan Dan Alternatif Solusi
 - a. Dalam rangka peningkatan pengembangan sapi *Belgian Blue*, dapat dilakukan upaya Inseminasi Buatan dan tidak dengan melalui *transfer embryo*, sehingga sapi *Belgian Blue* dapat melahirkan normal tanpa cesar.

- b. Untuk meningkatkan kinerja UPT salah satu upaya yang dilakukan adalah memperhatikan komposisi populasi ternak yang dimiliki, misalnya untuk UPT perbibitan harusnya memiliki pejantan tidak lebih dari 5% dari populasi. Jika memiliki lebih dari 5% harus segera dijual.

i. Penyusunan Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Kegiatan penyusunan Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024. Kegiatan dihadiri oleh Tim Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, pejabat struktural dan fungsional Direktorat serta didampingi oleh tim pakar dari Value Alignment Advisory (VA2). Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain:

1. Pertemuan *kick off meeting* penyusunan Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Utama II. Rapat bertujuan untuk membahas jadwal penyusunan renstra dan mensinkronisasikan dengan tim dari VA2.
2. Pada tanggal 30 September 2019 membahas rancangan analisis strategis Ditjen PKH dan kontribusi strategis Ditjen PKH dengan Renstra Teknokratik Kementan dan RPJMN
3. Pada tanggal 1 Oktober 2019 membahas draft visi, misi, tujuan serta arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH tahun 2020-2024.
4. Pada tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rancangan Peta Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024;
5. Pada tanggal 21 Oktober 2019 membahas cascading sasaran dan indikator kinerja aktivitas level 3 dan 4 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
6. Pada tanggal 22 Oktober 2019 membahas cascading sasaran dan indikator kinerja aktivitas level 3 dan 4 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Adapun hasil yang dibahas sebagai berikut:

1. Kontribusi strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementan
2. Menentukan alternatif visi, misi, tujuan dan indikator tujuan

3. Formulasi arah kebijakan dan strategi sesuai dengan arahan RPJMN
4. Standar kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Cascading standar kinerja es 2, 3 dan 4 lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

j. Pembahasan Matriks Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019 di Ruang Rapat BPMSPH Bogor. Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dihadiri oleh Koordinator dan Tim Perencana Pusat Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan serta Narasumber dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencana Nasional. Beberapa hal yang dibahas antara lain:

1. Anggaran berbasis *outcome* ditempuh dengan strategi : (i) Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja; (ii) Restrukturisasi Program dan kegiatan didasarkan pada struktur organisasi; (iii) Alokasi Anggaran ke arah *Performance Based Budgeting*; dan (iv) Penajaman Informasi Kinerja : *outcome-output- aktivitas- input*;
2. Kondisi indikator kinerja saat ini : (i) Indikator Kinerja sulit terukur, karena Struktur organisasi berdasarkan fungsi bukan komoditi; (ii) Anggaran berbasis kinerja sulit terukur, karena kegiatan di Pusat menggunakan indikator kegiatan daerah; dan (iii) Aktivitas *outcome-output- aktivitas- input* belum dapat terlihat dari anggaran yang dialokasikan
3. Kondisi yang diharapkan : (i) Anggaran yang dialokasikan harus dapat mencerminkan *output* kegiatan yang akan dicapai; dan (ii) struktur anggaran dan struktur indikator program harus bersinergi agar menghasilkan evaluasi kinerja yang valid dan terukur
4. Indikator dan target 2020 – 2024 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung PN 1 : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Program/Kegiatan Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah : (i) Aneka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2020 (57 gram/kapita/hari), tahun 2024 (57 gram/kapita/hari); (ii)

- Produksi Daging tahun 2020 (3.98 juta ton), tahun 2024 (5.83 juta ton); dan (iii) Konsumsi Daging, tahun 2020 (7.1 Kg/kapita/tahun), tahun 2024 (8.8 Kg/kapita/tahun);
5. Kerangka Pikir peta jalan swasembada protein tahun 2024, arah kebijakan utama diantaranya adalah : (i) peningkatan populasi sapi untuk masyarakat berpenghasilan menengah atas; (ii) Pengembangan ternak unggas dan ikan; dan (iii) Pengembangan telur dan susu
 6. Perlu penambahan *output* baru pusat untuk masing – masing Direktorat Teknis yaitu “Peraturan/Norma/Standar/Kebijakan” yang mencerminkan karakteristik kegiatan pusat yaitu : perumusan, penyusunan norma/standar, pedoman, pembinaan, koordinasi, bimbingan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di daerah;
 7. Perubahan struktur ADIK Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 **per kegiatan** dengan ***output*** sebagai berikut :
 - a. **Peningkatan Produksi Pakan Ternak** : (i) Hijauan Pakan Ternak (Ha); (ii) Pakan Olahan dan Bahan Pakan (Ton); (iii) Mutu dan Keamanan Pakan (Sampel); dan (iv) Peraturan/Norma/Standar/Pedoman;
 - b. **Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan** : (i) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (Sampel); (ii) Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan (Dosis); (iii) Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (Sampel); (iv) Obat Hewan dan bahan Biologik (Dosis); (v) Kelembagaan Veteriner (Unit); dan (vi) Peraturan/Norma/ Standar/Pedoman (Dokumen);
 - c. **Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak** : (i) Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (Unit Usaha); (ii) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk (Sampel); (iii) Pengendalian Pematangan Betina Produktif (RPH); (iv) Sarana & Prasarana Produk Hewan (Unit); dan (v) Peraturan/Norma/Standar/Pedoman (Dokumen);
 - d. **Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)** : (i) Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Unit Usaha); (ii) Pengawasan Mutu dan

Keamanan Produk (Sample); (iii) Pengendalian Pemotongan Betina Produktif (RPH); (iv) Sarana & Prasarana Produk Hewan (Unit); dan (v) Peraturan/Norma/Standar/Pedoman (Dokumen);

e. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak: (i) Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan (unit); (ii) Pengembangan Pemasaran Peternakan (Unit); (iii) Kelembagaan dan Usaha Peternakan (Lokasi); (iv) Pengelolaan Informasi Pemasaran (Lokasi); (v) Peraturan/Norma/Standar/Pedoman (Dokumen);

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan : (i) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan); (ii) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan); dan (iii) Layanan Perkantoran (Layanan).

8. Tindaklanjut pertemuan : Perlu penyesuaian penyusunan *output* Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020, karena jika *output* lama dipertahankan maka hasil evaluasi penilaian indikator kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada aplikasi SMART menjadi kurang baik karena indikator kinerja dan anggaran berbasis kinerja sulit terukur karena kegiatan di Pusat menggunakan indikator kegiatan daerah serta aktivitas *outcome-output-aktivitas- input* belum dapat terlihat dari anggaran yang dialokasikan;

9. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat resmi ke Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk penyesuaian struktur ADIK yang baru karena akan terintegrasi dengan aplikasi RENJA KRISNA dan RKAKL.

k. Penilaian e-Proposal TA. 2019 Termin Tambahan

Rapat penilaian e-Proposal TA. 2019 termin tambahan dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2019 di Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Subbagian Program, dan dihadiri oleh Tim Perencana Pusat Direktorat Teknis yang menangani e-Proposal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan serta Narasumber dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan dan

PUSDATIN. Beberapa point penting yang dibahas pada rapat sebagai berikut:

1. Proposal Kabupaten/Kota yang telah di verifikasi oleh provinsi dan proposal provinsi yang telah di kirim ke Pusat akan dilakukan penilaian oleh pusat (Direktorat Teknis) untuk dinyatakan Lolos atau Tidak Lolos (**Nilai ≥ 70**);
2. Kriteria/Indikator Penilaian e-Proposal TA. 2020 Ditjen Peternakan dan Keswan mencakup : (i) pengembangan kawasan; (ii) kelembagaan; (iii) kinerja pengelolaan program/kegiatan; (iii) kriteria muatan usulan kegiatan/e-Proposal; dan (iv) pendanaan proposal.
3. Biro Perencanaan menyampaikan Jadwal pembukaan e-Proposal Kementerian Pertanian adalah : (i) Termin I (e-Proposal awal) 1 Februari – 31 Maret; (ii) Termin II Pasca Musrenbangtan (\pm Mei – Agustus); (iii) **Termin III Pasca Raker dan RDP DPR RI/Pagu alokasi (\pm Oktober)**; (iv) Termin IV pasca adanya penambahan APBN; dan (v) Termin Tambahan permintaan Eselon I karena adanya direktif Presiden, Menteri, dan/atau Pimpinan K/L lainnya;
4. Aplikasi e-Proposal Kementerian Pertanian TA. 2019 **Termin Tambahan (Permintaan Eselon II)** telah ditutup tanggal 11 Oktober 2019 untuk **entry data** OPD Provinsi /Kabupaten/Kota. Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian **DIWAJIBKAN** melakukan penilaian e-Proposal pada setiap Termin Pembukaan e-Proposal (selambatnya 30 hari pasca penutupan). Aplikasi e-Proposal TA. 2029 tersebut dapat diakses pada laman **<https://eproposal.pertanian.go.id/eprop/>** ;
5. Reviu pelaksanaan e-Proposal Kementerian Pertanian Tahun 2019 antara lain : (i) Masih ada kegiatan TP/Dekon yang belum diverifikasi oleh Provinsi; (ii) Pada Kegiatan TP di Ditjen PKH terdapat Usulan Anggaran yang tidak rasional sebesar Rp 6,9 Triliun di Sulawesi Tengah dan diharapkan agar Setiap Eselon I memantau dan berkoordinasi dengan OPD bermasalah ; (iii) Pengisian Database Perencanaan oleh OPD Kabupaten/Kota masih minimalis terkesan asal terisi; dan (iv) Masih banyak OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki *Masterplan/Actionplan* → Perlu tindaklanjut jika Menu ini akan dijadikan kewajiban di eProposal 2021;
6. Pagu Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sebesar Rp 2.073.121.296.000,-. Pembukaan E-Proposal tahun 2019 Termintambhaan adalah permintaan

- Eselon II terkait kegiatan : (i) Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (UPP) sesuai dengan arahan Menteri Pertanian merupakan Kegiatan Kemandirian Pakan mendukung #BEKERJA dan UPSUS SIWAB; (ii) Pengembangan Ternak Ruminansia Potong; dan (iii) Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak;
7. Penilaian e-Proposal per kegiatan per Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan secara *online* dengan memperhatikan data pendukung diantaranya (i) Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional; (ii) Realisasi Fisik t-1; (iii) Serapan Anggaran (t-1); dan (iv) Sisa Kerugian Negara (t-1) Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 8. Jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan Tahun Anggaran 2019 Kewenangan Provinsi (DK) sebanyak 744 proposal dan jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan kewenangan Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) sebanyak 4.247 proposal;
 9. Jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan TA. 2019 Termin Tambahan Kewenangan Provinsi (DK) sebanyak 23 Proposal jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan kewenangan Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) 266 proposal;
 10. Hasil penilaian e-Proposal TA. 2019 Termin Tambahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah selesai dilaksanakan untuk kegiatan Bitpro, Pakan, Keswan, Kesmavet, PPHNAK untuk Kewenangan Provinsi (DK) sebanyak 23 Proposal dan kewenangan Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) 266 proposal.

I. Penilaian e-Proposal TA. 2020 Termin III

Rapat penilaian e-Proposal TA.2020 termin III dilaksanakan pada tanggal 18-19 November 2019 di Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Subbagian Program, dan dihadiri oleh Tim Perencana Pusat Direktorat Teknis yang menangani e-Proposal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan serta Narasumber dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan dan PUSDATIN. Beberapa point penting yang dibahas pada rapat sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan menyampaikan jadwal pembukaan *e-Proposal* Kementerian Pertanian adalah : (i) Termin I (*e-Proposal* awal) 1 Februari – 31 Maret; (ii) Termin II Pasca Musrenbangtan (\pm Mei – Agustus); (iii) **Termin III Pasca Raker dan RDP DPR RI/Pagu alokasi (\pm Oktober)**; (iv) Termin IV pasca adanya penambahan APBN; dan (v) Termin Tambahan permintaan Eselon I karena adanya direktif Presiden, Menteri, dan/atau Pimpinan K/L lainnya;
2. Aplikasi **e-Proposal Kementerian Pertanian TA. 2020 Termin III Termin III Pasca Raker dan RDP DPR RI/Pagu alokasi (\pm Oktober)** telah ditutup tanggal 8 November 2019 untuk **entry data** OPD Provinsi /Kabupaten/Kota. Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian **DIWAJIBKAN** melakukan penilaian *e-Proposal* pada setiap Termin Pembukaan *e-Proposal* (selambatnya 30 hari pasca penutupan). Aplikasi *e-Proposal* TA. 2020 tersebut dapat diakses pada laman ***<https://eproposal.pertanian.go.id/eprop/>***;
3. Reviu pelaksanaan *e-Proposal* Kementerian Pertanian Tahun 2020 antara lain :
 - a. **Jadwal proposal** : (i) masih ada Kabupaten/Provinsi yang **tidak memperhatikan batas waktu entry data dan batas waktu verifikasi**, sehingga masih ada *e-Proposal* yang belum diverifikasi/belum dapat no register; dan (ii) Kabupaten/Provinsi **meminta perpanjangan waktu** pelaksanaan pengisian/verifikasi *e-Proposal* 2020;
 - b. **Database SIMLUHTAN** : (i) **Koordinasi antar OPD** belum optimal; (ii) Mekanisme pendaftaran **SIMLUHTAN** belum tersosialisasi dengan baik; dan (iv) Permasalahan registrasi kelompok tani kedalam aplikasi **SIMLUHTAN**;
 - c. **Penilaian/Verifikasi** : (i) Masih belum berjalan optimal, sekedar melanjutkan tanpa melakukan verifikasi; dan (ii) Masih ada beberapa *e-Proposal* yang tidak diverifikasi oleh Provinsi;
 - d. **Jumlah Proposal** : (i) Masih belum berdasar sesuai kebutuhan lapangan; dan (ii) Provinsi/Kabupaten/Kota belum memperhatikan fokus kawasan/fokus komoditas;
 - e. **User** : Terlalu sering berganti Penanggungjawab/Operator *e-Proposal*, sering lupa Username/Password yang berujung terlambat atau tidak mengisi *e-Proposal*;

- f. **Laporan** : Menu laporan masih perlu pengembangan/perbaikan berbagai menu rekap yang memudahkan bagi Pimpinan;
 - g. Masih ada kegiatan Dekon yang belum diverifikasi oleh Provinsi;
 - h. Masih ada kegiatan TP/Dekon yang belum diverifikasi oleh Provinsi;
 - i. Pengisian Database Perencanaan oleh OPD Kabupaten/Kota masih minimalis terkesan asal terisi;
 - j. Masih banyak OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki Masterplan/Actionplan → Perlu tindaklanjut jika Menu ini akan dijadikan kewajiban di e-Proposal 2021
4. Kebijakan pelaksanaan e-Proposal Kementerian Pertanian:
- a. Dalam setiap penyampaian Surat Bersama Anggaran (SB Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran), Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebaiknya menyiapkan rancangan pusat dan menyampaikan ke Biro Perencanaan untuk memudahkan kontrol e-Proposal;
 - b. Rancangan Pusat dan Input e-Proposal oleh OPD akan digunakan dalam aplikasi e-Musrenbangtan sebagai bahan desk Musrenbangtan dan Renja Kementerian Pertanian;
 - c. Dalam pelaksanaan e-Proposal Kementerian Pertanian memiliki 5 termin pembukaan. Pada setiap tutup termin, Eselon I/II lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan penilaian e-Proposal;
 - d. Eselon I agar memantau pelaksanaan e-Proposal Kementan pada setiap Termin secara berkala dan mengingatkan OPD yang bermasalah, serta menyampaikan progress e-Proposal setiap minggunya;
 - e. Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian **DIWAJIBKAN** melakukan Penilaian e-Proposal pada setiap Termin Pembukaan e-Proposal (Selambatnya 30 hari pasca penutupan);
 - f. Penilaian Termin II dst, hanya dilakukan untuk e-Proposal tambahan saja;
 - g. Eselon I agar melakukan Reviu hasil penilaian oleh Eselon I dan II dan reviu pelaksanaan e-Proposal setiap termin sebagai kelengkapan dokumen perencanaan

(Disampaikan ke Biro Perencanaan Surat Resmi Sedit/Sesba).

5. Jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan TA. 2020 Termin III **Kewenangan Provinsi (DK) sebanyak 19 Proposal (Rp 50.355.500.000,00)** dan jumlah usulan proposal kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan **kewenangan Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) 392 proposal (Rp 1.612.894.910.200,00).**

Hasil penilaian e-Proposal TA. 2020 Termin III Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah selesai dilaksanakan untuk kegiatan Bitpro, Pakan, Keswan, Kesmavet, PPHNAK untuk Kewenangan Provinsi (DK) sebanyak 19 Proposal dan kewenangan Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) 392 proposal.

3.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sebesar Rp.2,073 triliun. Selama berjalannya tahun anggaran terdapat beberapa perubahan anggaran melalui revisi DIPA yang menyebabkan terjadinya penambahan pagu anggaran menjadi Rp2.089.592.073.000. Revisi anggaran selama Tahun 2019 antara lain revisi refocusing, revisi buka blokir anggaran Bekerja, OPAL dan Loka Papua, revisi penambahan pagu BLU BBIB Singosari (Kanwil), Revisi penambahan pagu BLU Pusvetma dan revisi anggaran Bekerja kedua, revisi belanja pegawai, revisi pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target serta pagu PNPB.

Revisi pertama adalah revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kegiatan Bekerja, Petani Milenial, Serasi dan OPAL dengan pagu anggaran tetap, dengan rincian:

- a. Anggaran sebesar Rp673.600.560.000,- digunakan untuk memberikan bantuan ayam usia 4 minggu dan pakannya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 11 juta ekor di 13 provinsi dan 57 kabupaten;
- b. Anggaran sebesar Rp25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Petani Milenial yaitu bantuan ternak ayam/unggas/itik 500 ekor/kelompok, bantuan kandang Rp3.000.000,-/kelompok, dan bantuan pakan 500 kg/kelompok, dengan pelaksanaan kegiatan BPTU HPT Sembawa;
- c. Anggaran sebesar Rp25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Serasi yaitu bantuan ternak 500.000 ekor itik untuk 500.000 Ha rawa di Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Anggaran sebesar Rp7.100.000.000,- digunakan untuk kegiatan OPAL.

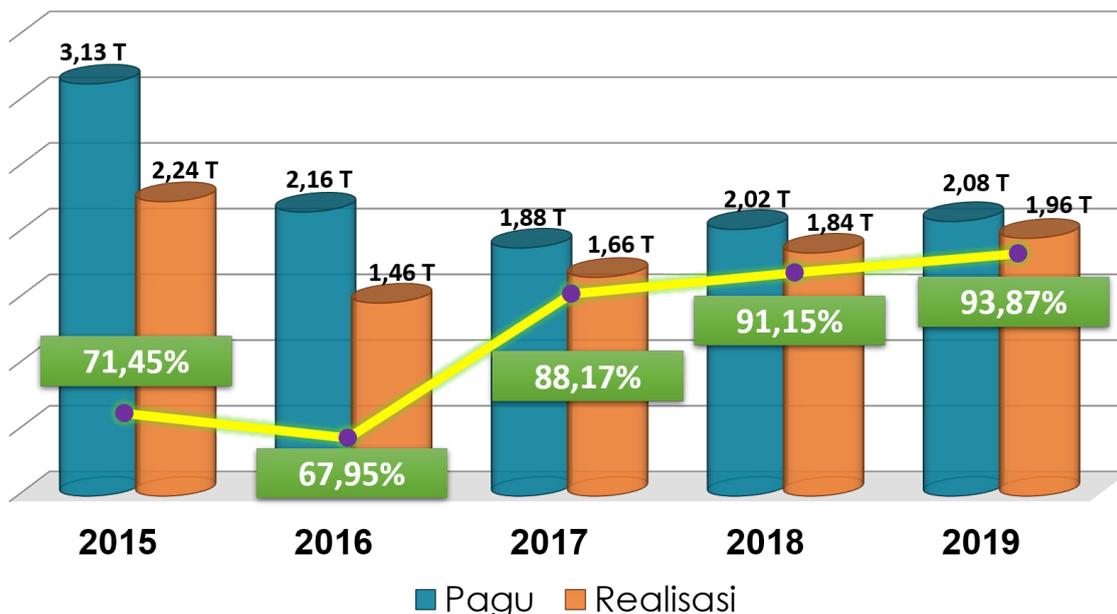
Revisi kedua adalah revisi buka blokir kegiatan OPAL sebesar Rp7.100.000.000,- dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Loka Veteriner di BBVet Maros sebesar Rp35.000.000.000,-. Revisi ketiga adalah penambahan pagu BLU di BBIB Singosari (revisi DIPA Kanwil) sebesar Rp4.000.000.000,- sehingga pagu total menjadi Rp2.077.121.296.000,-. Revisi keempat adalah revisi penambahan BLU di Pusvetma sebesar Rp5.746.547.000,- sehingga terjadi penambahan pagu total menjadi Rp2.082.867.843.000,- dan penyesuaian lokasi (Kab. Soppeng dan Selayar) dan biaya operasional Bekerja. Revisi kelima adalah revisi belanja pegawai dimana Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.081.859.000,- untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja pegawai. Penambahan alokasi belanja pegawai ini menyebabkan peambhan pagu total menjadi Rp2.083.949.702.000,-. Revisi keenam adalah revisi anggaran terkait pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target dan pagu PNBPNP dimana dalam revisi terjadi penambahan pagu PNBPNP di 8 satker UPT sebesar Rp5.642.335.000,- sehingga pagu total menjadi Rp2.089.592.037.000,-. Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2019 secara lengkap disajikan pada gambar berikut.

KRONOLOGI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019



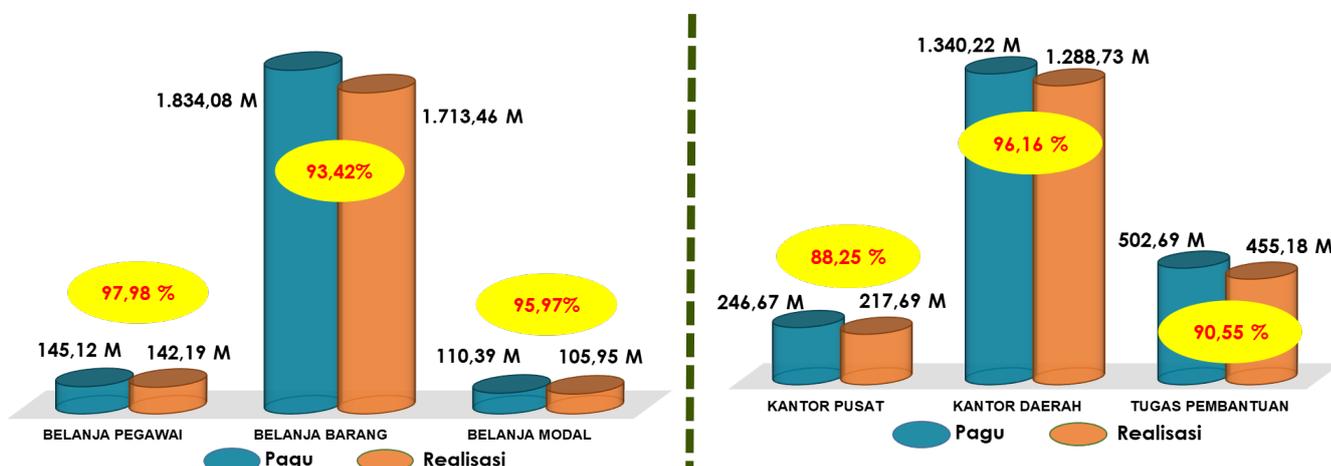
Gambar 3.24 Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2019

Dari total anggaran 2,089 triliun, sebesar 24,06% (Rp502 milyar) anggaran dialokasikan di kantor pusat. Sedangkan untuk kantor daerah sebesar 64,14% (Rp. 1,34 triliun), dan TP Provinsi sebesar 11,80% (Rp. 246 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 kantor pusat, 22 kantor daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi. Serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun anggaran 2019 adalah sebesar 93,87% atau Rp.1,849 triliun dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2,028 triliun.



Grafik 3.17 Serapan Anggaran Ditjen PKH 2015-2019

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Satker Pusat sebesar 88,25% atau Rp 217,687 miliar dari anggaran sebesar Rp.246,674 miliar, (ii) Satker UPT sebesar 96,16% atau Rp 1,288 triliun dari anggaran sebesar Rp 1,340 triliun, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 90,55% atau Rp 455,176 miliar dari anggaran sebesar Rp 502,694 miliar.



Grafik 3.18 Komposisi dan Penyerapan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2019

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah (i) Belanja Pegawai sebesar 97,98% atau Rp 142,187 miliar,- dari pagu anggaran Rp.145,121 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar 93,42% atau Rp 1,713 triliun dari pagu anggaran Rp 1,834 triliun,- (iii) Belanja Modal sebesar 95,97% atau Rp 105,949 miliar,- dari pagu anggaran Rp.110,39 miliar.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama adalah: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 93,84% atau Rp 1,242 triliun,- dari pagu anggaran Rp 1,323 triliun,- (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak 95,58% atau Rp 101,091 miliar,- dari pagu anggaran Rp.105,770 miliar,- (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 92,48% atau Rp 216,943 miliar,- dari pagu anggaran Rp 234,586 miliar,- (iv) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) 90,99% atau Rp.41,393 miliar,- dari pagu anggaran Rp 45,494 miliar,- (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 93,54% atau Rp 22,008 miliar,- dari pagu anggaran sebesar Rp 23,528 miliar,- dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 94,82% atau Rp 338,059 miliar,- dari pagu anggaran Rp 356,524 miliar.

3.5. Isu-Isu Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

3.5.1. Ekspor Pakan

Pakan ternak menjadi komoditas yang memiliki potensi ekspor yang menjanjikan. Produksi pakan ternak di Indonesia diproduksi oleh 82 pabrik pakan skala besar yang tersebar di 11 provinsi. Dalam rangka meningkatkan devisa negara, maka pemerintah sangat mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor pakan ke beberapa negara dengan memberikan kemudahan untuk melakukan ekspor antara lain proses perizinan ekspor yang diprioritaskan dan pendampingan pada saat proses Import Risk Analysis (IRA) yaitu pada saat tim dari negara tujuan ekspor datang ke Indonesia untuk memastikan bahwa produk peternakan yang akan di ekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Beberapa perusahaan yang telah melakukan ekspor pakan ke Timor Leste, yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT. Panca Patriot Prima dan PT. Sinar Indochem. Jenis pakan yang diekspor yaitu pakan ayam ras pedaging, pakan ayam ras petelur dan pakan babi. Jumlah ekspor pakan pada tahun 2019 sebanyak 4.852,90 ton dengan nilai US\$ 2.280.863,-. Rincian ekspor pakan disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.15. Data Ekspor Pakan Tahun 2019

No	Jenis Pakan	Negara Tujuan	Volume (MT)	Nilai (US\$)
1	Pakan Ayam Ras Pedaging	Timor Leste	4.124	1.938.280
2	Pakan Ayam Ras Petelur	Timor Leste	633,90	297.933
3	Pakan Babi	Timor Leste	95	44.650
Jumlah			4852,90	2.280.863

3.5.2. Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan

Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 dilaksanakan di 11 provinsi dan 25 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 13 Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas dan 20 Unit UPP Ruminansia.

Tujuan kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 untuk:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal
2. Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan dan teknologi pengolahan pakan
3. Meningkatkan kemampuan peternak/kelompok peternak dalam memproduksi pakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

Lokasi kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan pakan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.16. Lokasi Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Unit Pengolah Pakan	
			Jenis Pakan	Jumlah
1	Sumatera Utara	Serdang Berdagai	Ruminansia	1
		Kota Binjai	Ruminansia	1
2	Riau	Siak	Ruminansia	1
		Rokan Hulu	Ruminansia	1
3	Lampung	Lampung Selatan	Unggas	3
		Lampung Tengah	Ruminansia	1
		Tulang Bawang	Ruminansia	1
4	Banten	Serang	Unggas	1
		Tangerang	Unggas	1
5	Jawa Barat	Sukabumi	Ruminansia	1
		Cianjur	Ruminansia	1
		Subang	Ruminansia	2
			Unggas	1
		Garut	Ruminansia	1
		Cirebon	Ruminansia	1
6	Jawa Tengah	Klaten	Ruminansia	1
		Kota Salatiga	Ruminansia	1
7	DI Yogyakarta	Bantul	Ruminansia	1

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Unit Pengolah Pakan	
			Jenis Pakan	Jumlah
		Sleman	Ruminansia	1
8	Jawa Timur	Lumajang	Unggas	1
		Magetan	Ruminansia	1
		Bojonegoro	Ruminansia	2
9	NTB	Lombok Timur	Ruminansia	1
10	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Unggas	2
		HSU	Unggas	2
11	Gorontalo	Bone Bolango	Unggas	1
		Gorontalo	Unggas	1
Jumlah				33

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan distribusi alat dan mesin (alsin) pengolah pakan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada 33 kelompok UPP. Realisasi pengadaan alsin dan bangunan tercapai 100%, sementara pengadaan bahan pakan sebesar 1.431 ton dari target 1.587 ton atau sebesar 90,17%. Capaian pengadaan bahan pakan di masing-masing satker disajikan pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17. Pengadaan Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019

No	Satker	Target			Realisasi			(%)		
		Alsin (%)	Bangunan (%)	Bahan Pakan (ton)	Alsin (%)	Bangunan (%)	Bahan Pakan (ton)	Alsin (%)	Bangunan (%)	Bahan Pakan (%)
1	Sumatera Utara	100	100	108	100	100	108	100	100	100
2	Riau	100	100	108	100	100	108	100	100	100
3	Lampung	100	100	225	100	100	225	100	100	100
4	Banten	100	100	78	100	100	78	100	100	100
5	Jawa Barat	100	100	363	100	100	363	100	100	100
6	Jawa Tengah	100	100	108	100	100	108	100	100	100
7	DI. Yogyakarta	100	100	108	100	100	108	100	100	100
8	Jawa Timur	100	100	201	100	100	201	100	100	100
9	NTB	100	100	54	100	100	54	100	100	100
10	Kalimantan Selatan	100	100	156	100	100	0	100	100	0
11	Gorontalo	100	100	78	100	100	78	100	100	100
Total		100	100	1.587	100	100	1.431	100	100	90,17

3.5.3. Ekspor Obat Hewan

Industri obat hewan Indonesia telah memasuki era baru yang terbukti dengan beberapa perusahaan obat hewan telah berhasil menembus pasar internasional, sampai dengan akhir tahun 2019 ekspor obat hewan telah berhasil menembus 93 negara tujuan di kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia.

Berdasarkan data laporan eksportir obat hewan, obat hewan yang diekspor tersebut terdiri dari 3 jenis sediaan yaitu biologik, farmasetik serta premiks dan bahan baku obat hewan. Sediaan biologik yang diekspor yaitu vaksin AI, ND, IB, IBD, ILT, Coryza, EDS dan Fowl Fox. Sediaan farmasetik yang diekspor yaitu antelmentika, antidefisiensi, antibakteria, antiprotozoa, antiseptika dan desinfektansia. Sediaan premiks dan bahan baku yang diekspor yaitu feed supplement, feed additive, vitamin dan asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysine Sulphate, L- Tryptophan, L-Arginine).

Ekspor obat hewan dilakukan oleh produsen obat hewan yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).

Tahun	Nilai (Rp)
2015	167 M
2016	172 M
2017	144 M
2018	186 M
2019 (Jan-Sept)	136 M
TOTAL	805 M

Sumber: Data BPS 2015-2019



Gambar 3.25 Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2019

3.5.4. Pengembangan Belgian Blue

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan protein hewani terutama daging sapi yang selama ini sebagian masih diimport. Selain dengan program percepatan peningkatan populasi ternak, pemenuhan kebutuhan daging juga dilakukan dengan introduksi jenis sapi baru yang memiliki prosentase karkas yang tinggi, yaitu sapi Belgian Blue. Sapi ini merupakan rumpun sapi potong kelompok *Bos taurus* yang berasal dari negara Belgia. Keistimewaan sapi Belgian Blue yaitu mempunyai perototan/perdagingan yang sangat berkembang akibat dari *muscular hypertrophy* (mh) yakni pembesaran sel-sel otot akibat dari mutasi gen *myostatin*, atau dikenal dengan *double-muscling*.

Sapi Belgian Blue mempunyai keunggulan diantaranya memiliki perototan yang besar atau *double muscling*, kulit yang lebih tipis

daripada bangsa sapi lain, sedikit lemak dan pertumbuhan yang lebih cepat serta persentase karkas yang tinggi, kemampuan mengkonversi pakan secara efisien, artinya dengan “*feed intake*” yang lebih rendah, dan mampu menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi.

Namun ada beberapa kelemahan yang dimiliki sapi Belgian Blue antara lain sering terjadi kesulitan dalam melahirkan dan memerlukan tindakan operasi sesar, terutama dalam pembibitan bangsa murni Belgian Blue, hal ini bisa terjadi karena berat lahir pedet BB cukup besar antara 43 kg sampai 62,5 kg. Padahal, induk betina BB memiliki ukuran tulang pelvis yang kecil, sehingga untuk mengeluarkan pedet yang akan lahir harus dilakukan dengan cara operasi caesar. Sapi ini juga memerlukan manajemen pemeliharaan dan kualitas pakan yang baik untuk mendukung metabolisme tubuhnya agar pertumbuhan otot dapat berkembang secara optimal. Karena itu diperlukan arah pengembangan yang tepat agar pemanfaatan potensi genetik sapi Belgian Blue menjadi optimal melalui pembibitan galur murni maupun persilangan dalam rangka peningkatan produktifitas sapi potong nasional. Diharapkan sapi ini dapat dikembangkan di Indonesia dan meningkatkan produktifitas ternak potong nasional.

Tujuan Kegiatan pengembangan sapi Belgian Blue di Indonesia adalah untuk menambah keanekaragaman jenis sapi dan pemenuhan kebutuhan protein hewani. Tahun 2017 merupakan tahap awal dalam perkembangan sapi BB di Indonesia, pengembangannya hanya dilakukan di BET Cipelang dengan progress kegiatan jumlah sebanyak 19 ekor TE dan 99 ekor IB, dari 19 ekor TE posistif bunting sebanyak 5 ekor dan IB 40 ekor, serta kelahitan 5 ekor TE dan 37 ekor IB.

Sampai dengan bulan Desember 2019, perkembangan sapi Belgian blue yang dikembangkan di UPT lingkup Kementerian Pertanian menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Total kelahiran anak hasil TE/IB BB sampai dengan bulan Desember sebanyak 443 ekor dan yang bunting sebanyak 509 Ekor. Sampai dengan Desember 2019, kematian sapi BB hasil murni/ IB sebanyak 77 ekor sehingga jumlah sapi keturunan BB yang masih hidup sebanyak 366 ekor. Kematian tersebut diakibatkan terjadinya kelainan pada system pernafasan dan gangguan sistem pencernaan.

Produksi Semen BB Singosari sebanyak 17.922 straw dan Lembang 4.099 straw.

Dalam pelaksanaan kegiatan beberapa kendala yang dihadapi untuk pengembangan sapi Belgian Blue ini adalah :

- 1) Biaya yang dibutuhkan sangat tinggi,
- 2) Kelahiran ternak hasil TE harus dilakukan dengan operasi Caesar,
- 3) Penanganan induk dan anak pasca beranak setelah operasi Caesar,
- 4) Dibeberapa lokasi pengembangan tenaga ahli untuk pelaksanaan operasi Caesar masih minim sekali atau tidak ada sama sekali,
- 5) Perbedaan pola pemeliharaan pada ternak,
- 6) Adanya kemungkinan ditemukan kelainan pada system pernafasan yang mengakibatkan tidak berkembangnya paru-paru pada ternak tersebut,

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah :

- 1) Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan tingkat kebuntingan yang tinggi,
- 2) Pelatihan penanganan operasi dan pasca operasi bagi para petugas yang menangani kelahiran tersebut,
- 3) Pembuatan SOP sehingga adanya perlakuan yang sama di masing2 lokasi,
- 4) Pengamatan dan penanganan terkait kesehatan hewan yang lebih intensif lagi.

3.5.5. Kemandirian GGPS

Langkah langkah menuju kemandirian pembibitan ayam ras nasional adalah (1) Mencari ayam murni (*diverse line*) belum mengalami pemuliaan dan masih memiliki keragaman tinggi, (2) Mendapatkan galur murni, ayam memiliki sifat tertentu sesuai tujuan pemuliaan, (3) Pola pemuliaan seleksi ayam meningkatkan mutu genetik : *Pureline-GGPS-GPS-PS-FS*, (4) Kriteria seleksi untuk mendapatkan potensi genetik terbaik, fertilitas, konversi pakan, ADG (*Avarage Daily Gain*) dan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan lingkungan; (5) melakukan evaluasi hasil dari seleksi dengan memilih jantan dan betina terbaik, (6) Ayam terseleksi dengan keunggulan genetik terbaik, pertumbuhan berat badan tertinggi dengan konversi pakan rendah dan imunitas baik, (7) Pengujian performa pengujian lapangan dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan pemuliaan ayam diuji dengan lingkungan standar manajemen yang layak, (8) Multifikasi untuk mendapatkan produk komersial. Kunci keberhasilan menuju kemandirian pembibitan ayam ras nasional adalah 1) Perlu konsistensi, untuk mendapatkan satu keunggulan genetik, dari PL (*Pure Line*) sampai ke FS membutuhkan waktu 5 tahun dan 3 tahun untuk seleksi, 2) Dukungan investasi

memadai, membutuhkan biaya mahal untuk perbaikan mutu genetik, 3) Mendapatkan sumber ayam yang legal, 4) Dukungan praktisi dan memiliki riset dan *development* serta designer pakar genetika, 5) Transfer teknologi pembibitan dengan melakukan kerjasama dengan *principal strain*.

3.5.6. Pemenuhan Produk Hewan yang ASUH

Dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet. Penyediaan daging harus berasal dari Rumah Potong Hewan sedangkan untuk Hari Raya Kurban harus dilakukan pada lokasi yang memiliki fasilitas pemotongan hewan serta penanganan karkas/daging. Namun kondisi saat ini masih banyak sarana prasana di RPH maupun lokasi pemotongan hewan kurban sangat minim, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging yang akan dikonsumsi. Dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diterima oleh suatu daerah sehingga penjaminan daging ASUH belum optimal.

Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit yang meliputi sarana prasarana pemotongan hewan ruminansia. Pada tahun 2019 bantuan untuk rincian penyediaan sarana prasaran tersebut untuk Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Kurban di 3 lokasi yaitu Kota Tangerang Provinsi Banten, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari 3 target ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) tahun 2019 terrealisasi sebanyak 2 lokasi yaitu di Masjid Uswatuh Khasanah Kota Tangerang Provinsi Banten dan Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Sedangkan 1 lokasi di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terealisasi karena hambatan ijin dari Pemerintah daerah.

Sehingga total ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga tahun 2019 sebanyak 178. Adapun rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) tahun 2019 sebanyak 34,30 % dari target 30%. Dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan ketersediaan alsintan sebanyak

0.39%, meliputi 176 unit sampai dengan tahun 2018 menjadi 178 unit sampai dengan tahun 2019.

3.5.7. Penataan Tata Niaga Menggunakan Kapal Ternak

Pada tahun 2019 ada 6 kapal yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6. Pelabuhan angkut ternak yang sebelumnya hanya melalui Tenau dan Waingapu di Kupang NTT saat ini bertambah 2, yaitu Pelabuhan Badas di Bima NTB dan Pelabuhan Kwandang di Gorontalo. Kapal Ternak selain berlabuh di Tanjung Priok juga berlabuh di Balikpapan dan Banjarmasin. Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2019 telah berjalan 74 kali round voyage (pelayaran) sejak Januari-Desember 2019 dengan mengangkut ternak sebanyak 37.649 ekor. Loading factor mencapai 98%.

Rute pelayaran dan rekapitulasi Muatan Ternak yang didistribusikan setiap pelayaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.18. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2019

No.	Pangkalan/ Provinsi & Operator	Tahun	Nama Kapal	Jaringan Trayek	Jumlah Pelayaran	Jumlah Ternak yg diangkut (ekor)	Keterangan
1	Kupang, NTT	2019	CN-1	Kupang -201- Waingapu -867- Tanjung Priok -150- Cirebon -1038- Kupang	17	8.157	
2	Kupang, NTT	2019	CN-3	Kupang -99- Wini -26- Atapupu -1121- Tanjung Priok-1054 - Kupang	14	7.295	
3	Kupang, NTT	2019	CN-2	Kupang/Bima -1179/771- Tanjung Priok -1179- Kupang	12	6.064	
4	Kupang, NTT	2019	CN-4	Kupang - 99 - Wini 26 - Atapupu - 955,5 - Samarinda/Balikpapan - 782,5 - Kupang	13	6.935	Deviasi, ke DKI Jakarta untuk kebutuhan Qurban
5	Kupang, NTT	2019	CN-6	Kupang - 720 - Banjarmasin - 429 - Bima - 429 - Banjarmasin - 720 - Kupang	14	7.463	Deviasi, NTB ke DKI Jakarta untuk kebutuhan Qurban
6	Gorontalo	2019	CN-5	Gorontalo - 706 - Tarakan - 408 - Balikpapan/Samarinda - 191 - Palu - 191 - Balikpapan/Samarinda - 809 - Gorontalo	4	1.735	Deviasi, NTB ke DKI Jakarta untuk kebutuhan Qurban
Total Tahun 2019					74	37.649	Loading Factor 92%

Hasil monitoring pemanfaatan Kapal Ternak dari Bulan Januari sampai Desember 2019, sebagai berikut :

a. Kapal CN 1

Trayek dari Kupang dan Waingapu NTT tujuan Tanjung Priok DKI Jakarta Sejumlah 17 kali pelayaran. Tercatat sudah mengangkut 8.157 ekor sapi *loading factor* mencapai 95%.

b. Kapal CN 2

Trayek dari Kupang NTT / Bima NTB tujuan Tanjung Priok DKI Jakarta Sejumlah 12 Kali Pelayaran. Tercatat sudah mengangkut 6.064 ekor sapi dengan *loading factor* mencapai 100%. Dari Kupang sudah mengangkut 4.964 ekor sapi sedangkan dari NTB sudah mengangkut 1100 ekor sapi.

c. Kapal CN 3

Trayek dari Kupang, Wini, Atapupu tujuan Tanjung Priok DKI Jakarta sejumlah 14 Kali Pelayaran. Tercatat sudah mengangkut 7.295 ekor sapi dari Kupang *loading factor* mencapai 100%.

d. Kapal CN 4

Trayek dari Kupang, Wini, Atapupu tujuan Samarinda dan Balikpapan Kaltim total 13 Kali Pelayaran tercatat sudah mengangkut 6.935 ekor sapi.

e. Kapal CN 5

Trayek dari Gorontalo, tarakan tujuan Samarinda terjadi perubahan rute atau deviasi dari Bima tujuan DKI Jakarta sejumlah 4 pelayaran. Tercatat sudah mengangkut 1.735 ekor sapi. Dengan *loading factor* mencapai 86%.

f. Kapal CN 6

Trayek dari Kupang, Wini tujuan Banjarmasin dengan Bima tujuan DKI Jakarta sejumlah 14 pelayaran. Tercatat sudah mengangkut 7.643 ekor sapi. Dengan *loading factor* mencapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi

- a. Sepanjang tahun 2019 muatan masih didominasi dari NTT, sedangkan muatan dari NTB hanya untuk penyediaan kebutuhan Idul Adha.
- b. Masih kurangnya koordinasi antara Operator Kapal dengan Dinas terkait serta para pemangku kepentingan, salah satunya terkait penetapan jadwal pelayaran.
- c. Belum tersedia pedoman tata cara pengangkutan ternak sesuai kesrawan.
- d. Ongkos angkut ternak dianggap masih tinggi oleh beberapa pelaku usaha.
- e. Sistem pelaporan perlu ditingkatkan.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi

- a. Perlu mengevaluasi trayek kapal khususnya untuk trayek yang kurang optimal sehingga subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik.
- b. Keberadaan kapal khusus Ternak selain mendukung perdagangan yang sudah terbentuk antar wilayah (*Ships follow the trade*), juga membangun jaringan perdagangan antar daerah (*Ships promote the trade*). Untuk itu perlu komitmen dari pemda, K/L terkait serta para pelaku usaha.
- c. Operator Kapal Ternak agar menyusun penjadwalan trayek pelayaran dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas peternakan Provinsi, KSOP, dan Kantor Karantina serta para pemanfaat kapal, sehingga persiapan penyiapan muatan ternak dapat dilakukan dengan baik.

- d. Tahun 2020 penyelenggaraan kapal khusus ternak perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dengan Direktorat terkait Standard Penerapan Kesrawan didalam tatacara pengangkutan ternak.
 - 2) Biaya angkut ternak yang lebih kompetitif sehingga mendukung upaya *ships promote the trade*.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka tata kelola pemanfaatan kapal ternak sesuai pedoman.
- f. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan dan penyampaian laporan kepada pelaku usaha dan dinas terkait dalam penyampaian laporan melalui sistem online kapal ternak.

3.5.8. Pengembangan Peternakan Organik

Saat ini permintaan produk organik dunia terus tumbuh. Selama periode 2001-2016, penjualan makanan dan minuman organik dunia tumbuh pesat dengan pencapaian penjualan tahun 2016 sebesar US\$89,7 Milyar. Penjualan retail produk organik terbesar dunia tahun 2016 dikuasai oleh pasar Amerika Serikat (46%), kemudian diikuti oleh Jerman (11%), Prancis (8%) dan Tiongkok (7%). Pasar organik dunia untuk produk-produk organik berkembang dengan sangat cepat berhubung besarnya permintaan (IFOAM 2018). Nilai transaksi untuk komoditas organik di dunia mencapai angka US\$ 100 Milyar per tahun. Pasar terbesar dari komoditas organik saat ini adalah Amerika Serikat (AS). Kebutuhan AS akan produk organik mencapai 46% diikuti oleh Eropa sebesar 36%. Sementara pasar Eropa terbesar diduduki oleh Jerman sebesar 28% dan Perancis 20%. Sementara untuk pasar Asia pun dinilai masih memiliki potensi untuk dimasuki oleh produk organik Indonesia. Pada pasar Asia, Indonesia bisa ekspor ke China, Jepang, dan Korea Selatan.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya makanan sehat, meningkatkan permintaan pasar akan produk organik. Masyarakat kelas menengah kini semakin sadar untuk menerapkan pola hidup sehat termasuk mengkonsumsi produk pangan organik. Kesadaran tersebut muncul antara lain karena dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penderita penyakit degeneratif di usia produktif semakin meningkat pada kalangan perkotaan. Selain stress akibat jadwal kerja yang padat dan polusi lingkungan, penyakit degeneratif seperti kanker, darah tinggi, dan kolesterol juga dipicu oleh pola konsumsi makanan yang tidak sehat. Trend gaya hidup sehat ini mulai berkembang baik di masyarakat, masyarakat menyesuaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kondisi pertanian organik di Indonesia saat ini belum berkembang dengan baik, dimana masih terbatas jumlah supplier produk organik terutama produk peternakan. Beberapa kendala pengembangan produk

organik antara lain, masih kurangnya pemahaman filosofi organik di kalangan petani, secara umum masih dikelola secara tradisional dan skala kecil, keaslian produk organik (belum disertifikasi), supply tidak konsisten baik dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas, penanganan pasca panen yang kurang baik (mutu turun dan kehilangan sifat organik), kurangnya kerjasama antara supplier dan supermarket (resiko waste), serta kurangnya pengetahuan tentang produk organik oleh buyer di supermarket.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam pengembangan peternakan sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi pengembangan ternak organik dan identifikasi potensi pengembangan pupuk organik. Identifikasi mencakup beberapa komponen produksi ternak, yaitu benih/bibit ternak organik, pakan dan nutrisi organik, obat hewan organik, serta tempat pemeliharaan, kandang, serta peralatan yang memenuhi kaidah organik. Identifikasi potensi pengembangan pupuk organik meliputi identifikasi produk dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang berpotensi besar untuk disertifikasi organik
- b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Penerapan dan Sertifikasi Produk Ternak Organik Bimbingan Teknis Fasilitator organik. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan bimbingan teknis fasilitator organik yang berperan sebagai pendamping pelaksanaan sertifikasi organik. Fasilitator meliputi petugas pusat dan daerah yang menangani langsung kegiatan sertifikasi organik ini, dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang penerapan dan sertifikasi sistem pertanian organik.
- c. Fasilitasi dan pendampingan sertifikasi organik pangan dan non pangan (*pilot project*). Fasilitasi sertifikasi organik dilaksanakan di kelompok peternak pangan dan non pangan yang telah teridentifikasi menerapkan prinsip-prinsip organik. Fasilitasi berupa bantuan sarana budidaya dan pengolahan produk ternak organik, serta proses sertifikasi organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).
- d. Pendampingan dokumen sistem mutu (doksistu) sistem pertanian organik. Pendampingan dokumentasi sistem mutu organik merupakan kegiatan mendokumentasikan kegiatan yang kelompok lakukan dalam menerapkan sistem pertanian organik. Pendampingan ini sangat diperlukan mengingat keterbatasan kelompok dalam administrasi / pencatatan kegiatan.
- e. *Pre assesment*. Kegiatan *pre assesment* dilaksanakan dalam rangka persiapan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik. Pengecekan akhir kesiapan dokumen sistem mutu kelompok dan pelaksanaan audit internal.

- f. Perumusan draft revisi SNI Sistem Pertanian Organik. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keberadaan SNI Sistem Pertanian Organik 6729:2016 dinilai perlu untuk disesuaikan. Kementerian Pertanian yang dikordinir oleh Ditjen Tanaman Pangan berinisiasi untuk merevisi SNI tersebut. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan tugas untuk menyusun draft revisi SNI organik pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN

4.1. Sapi Dan Kerbau

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi dan kerbau sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan populasi produksi ternak dan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan peternak, maka dari itu Ditjen PKH pada tahun 2020 memiliki kebijakan dan strategi dengan melaksanakan Kegiatan Prioritas diantaranya:

- a. Optimalisasi Reproduksi
- b. Indukan Impor
- c. Integrasi Sapi-Sawit
- d. Penyediaan Benih dan Bibit Ternak
- e. Penanggulangan Pematangan Betina Produktif
- f. Penyediaan Pakan, Benih, dan Bibit HPT
- g. Penanganan Gangguan Reproduksi dan PHMS
- h. Sharing Kompensasi Impor Bakalan 1 : 20
- i. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
- j. Supply Chain
- k. Fasilitasi Investasi Dan Pembiayaan (KUR)

4.2. Kambing/Domba

Dalam rangka meningkatkan produksi tujuan ekspor kambing/domba sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan populasi produksi ternak dan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan peternak, maka dari itu Ditjen PKH pada tahun 2020 memiliki kebijakan dan strategi dengan melaksanakan Kegiatan Prioritas diantaranya:

- a. Penyediaan Benih dan Bibit Ternak
- b. Penyediaan Pakan, Benih, dan Bibit HPT
- c. Fasilitasi Permodalan/Pembiayaan (KUR)
- d. Penanggulangan PHMS
- e. Pemenuhan Persyaratan Ekspor
- f. Penguatan Market Intelijen dan Akses Pasar
- g. Peningkatan nilai Tambah dan Daya Saing
- h. Fasilitasi Investasi dan Pembiayaan (KUR)

4.3. Unggas

Dalam rangka meningkatkan produksi tujuan ekspor unggas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan populasi produksi ternak dan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan peternak, maka dari itu Ditjen PKH

pada tahun 2020 memiliki kebijakan dan strategi dengan melaksanakan Kegiatan Prioritas diantaranya:

- a. Kemandirian GGPS
- b. Pengembangan Ayam Lokal
- c. Penyediaan Pakan (Pabrik Pakan)
- d. Pengelolaan Tepung Telur
- e. Penanggulangan PHMS
- f. Pemenuhan Persyaratan Ekspor
- g. Penguatan Market Inteljen dan Akses Pasar
- h. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
- i. Fasilitasi Investasi dan Pembiayaan (KUR)

4.4. Babi

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi tujuan ekspor ternak babi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan populasi produksi ternak dan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan peternak, maka dari itu Ditjen PKH pada tahun 2020 memiliki kebijakan dan strategi dengan melaksanakan Kegiatan Prioritas diantaranya:

- a. Penyediaan Bibit
- b. Pengendalian PHMS
- c. Penguatan Market Inteljen dan Akses Pasar
- d. Fasilitasi Investasi dan Pembiayaan (KUR)

4.5. Lain-lain

Selain kegiatan-kegiatan di atas, kebijakan dan strategi lain guna meningkatkan populasi dan produksi ternak dan ekspor yang dilakukan Ditjen PKH pada tahun 2020 diantaranya yaitu dengan melakukan pembinaan budidaya burung wallet dan dengan menyiapkan regulasi dan deregulasinya.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara umum capaian Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2019 berhasil dilaksanakan dengan nilai realisasi keuangan maupun realisasi fisik baik Program/Kegiatan di Direktorat Teknis maupun Program/Kegiatan di Sekretariat sebagai Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya berada di atas 90% dari target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi fisik beberapa Program/Kegiatan Ditjen PKH berada di atas 100%.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019.

Laporan tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019 disusun untuk memberikan informasi pencapaian Program/Kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Dalam laporan ini juga disampaikan beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian Program/Kegiatan, diantaranya:

- a. Produksi daging sapi/kerbau hanya terealisasi sebesar 68,13% dari target yang telah ditetapkan. Produksi daging sapi pada tahun 2019 mengalami penurunan atau (-2,39%) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja Upsus SIWAB periode 2017-2019 telah berpengaruh dalam peningkatan jumlah populasi sapi dan kerbau, namun belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka importasi daging. Akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2019 yaitu: (1) meningkatnya volume impor daging sapi; (2) tidak berhasilnya pengadaan sapi indukan impor; (3) gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi; (4) pemotongan betina produktif; (5) produktivitas sapi dan kerbau dengan *Body Conditioning Score* (BCS) yang masih rendah; (6) skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan; (7) kekurangan jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb, dan ATR); dan (8) kurangnya sarana dan prasarana.
- b. Tahun 2019 target status kesehatan hewan yang ditetapkan adalah 80% dengan capaian 78,1%. Capaian status kesehatan hewan dibawah target dikarenakan beberapa hal antara lain: (1) Adanya wabah Rabies di beberapa lokasi di Provinsi NTB; dan (2) Adanya penurunan jumlah provinsi

bebas rabies semula 9 Provinsi menjadi 8 Provinsi karena Provinsi NTB sebelumnya merupakan wilayah bebas Rabies.

5.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun rekomendasi tindak lanjut solusi sebagai bahan perbaikan ke depannya antara lain:

- a. Melanjutkan Kegiatan Strategis percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau di dalam negeri yang dapat diupayakan dengan meningkatkan penanggulangan gangguan reproduksi pada indukan sapi, penanganan pemotongan sapi betina produktif, perbaikan pakan sapi, penguatan kelembagaan peternak, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia pendukung kegiatan, penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N₂ Cair dan kontainer, penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya, perbaikan pendataan terkait data capaian optimalisasi reproduksi (kelahiran IB dan kawin alam) melalui perbaikan identitas ternak, dan pengembangan sapi potong pada kelompok peternak. Selain itu juga perlu ada alokasi anggaran untuk pemenuhan alsintan pasca panen untuk peternakan seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebagai sarana fasilitasi pemotongan hewan kurban. Selain itu, perlu juga dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana RPH.
- b. Upaya meningkatkan Status Kesehatan Hewan di masa depan diantaranya dengan menyediakan vaksin melalui dana TP yang dialokasikan ke beberapa wilayah di Indonesia sebagai usaha untuk memperluas wilayah bebas dalam mencapai target. Ditjen PKH juga memiliki stok vaksin pusat yang akan digunakan jika terjadi wabah. Alokasi vaksin, tidak hanya diberikan pada wilayah endemis, namun juga diberikan ke wilayah yang bebas penyakit sebagai upaya pencegahan masuknya penyakit di wilayah tersebut. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga melalui surveilans yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner di masing-masing wilayah kerja.

Demikian penyajian Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan bermanfaat.